



LAPORAN KINERJA

BALAI PPMHKP BALIKPAPAN
TRIWULAN I TAHUN 2026



Lokasi

📍 Jl. Syarifudin Yoes - Ringroad
Balikpapan Kalimantan Timur

Hubungi Kami

☎ 0542 - 7581284

📍 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id

🌐 www.kkp.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKJ) Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Balai PPMHKP) Balikpapan Triwulan I Tahun 2026 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Balai PPMHKP Balikpapan dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Laporan ini menguraikan informasi terkait pencapaian kinerja, kendala dan upaya harus dilakukan dalam rangka pencapaian target Triwulan I Tahun 2026.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Balai PPMHKP Balikpapan Tahun 2026. Secara umum target indikator kinerja yang ditetapkan pada periode Triwulan I Tahun 2026 telah dicapai sesuai target yang ditetapkan. Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Balai PPMHKP Balikpapan di masa mendatang.

Ungkapan terimakasih kepada seluruh pihak dan jajaran pegawai Balai PPMHKP Balikpapan yang telah membantu dan mendukung pencapaian kinerja Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan I Tahun 2026.

Kami menyadari laporan ini jauh dari sempurna, untuk itu saran, tanggapan maupun masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan kedepannya.

Balikpapan, 16 April 2026
Kepala Balai PPMHKP Balikpapan



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Eko Sulystianto

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
RINGKASAN EKSEKUTIF	5
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG.....	9
1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	10
1.3 STRATEGI ORGANISASI	12
1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN	13
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1 VISI DAN MISI.....	14
2.2 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	15
2.3 PENGUKURAN KINERJA	17
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 CAPAIAN KINERJA.....	19
3.2 ANALISIS DAN EVALUASI	21
3.3 REALISASI ANGGARAN.....	37
3.4 EFISIENSI ANGGARAN.....	39
BAB IV. PENUTUP	
4.1 KESIMPULAN	41
4.2 REKOMENDASI	42
LAMPIRAN	43

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026.....	7
Tabel 2. Target Indikator Kinerja Kegiatan Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan I Tahun 2026.....	17
Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan I Tahun 2026.....	21
Tabel 4. Capaian Sasaran Kegiatan 1 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan I Tahun 2026	22
Tabel 5. Capaian Sasaran Kegiatan 2 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan I Tahun 2026	27
Tabel 6. Capaian Sasaran Kegiatan 3 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan I Tahun 2026.....	29
Tabel 7. Nilai Persepsi, Nilai Interval SKM, Nilai Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	35
Tabel 8. Nilai Rata-rata (NRR) Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat.....	36
Tabel 9. Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan I Triwulan I Tahun 2026.....	38
Tabel 10. Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan Triwulan I Triwulan I Tahun 2026.....	38

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai PPMHKP Balikpapan.....	11
Gambar 2. Peta Strategis Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan I Tahun 2026	16
Gambar 3. Dashboard Capaian IK dan IKU Pada Sistem Aplikasi Kinerjaku Triwulan I Tahun 2026.....	19
Gambar 4. Kegiatan Sertifikasi CPIB di Kapal Pada Aplikasi SIAP MUTU	23
Gambar 5. Kegiatan Inspeksi Penerapan HACCP di Unit Pengolahan Ikan	25
Gambar 6. Tangkap Layar Aplikasi SIDAK Triwulan I Triwulan I Tahun 2026	33
Gambar 7. Tangkap Layar Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan I Triwulan I Tahun 2026 Pada Website https://ptsp.kkp.go.id/skm/	37
Gambar 8. Tangkap Layar Realisasi Anggaran Sampai Dengan Triwulan I Pada Website https://spanint.kemenkeu.go.id/	39

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan I Tahun 2026 mencerminkan hasil pencapaian selama periode tersebut. Penilaian atas tingkat keberhasilan pencapaian sasaran kinerja Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan I Tahun 2026 diukur dengan membandingkan target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja pada tiap perspektif yang relevan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Balai PPMHKP Balikpapan Tahun 2026 untuk mencapai kondisi yang diinginkan sebagai suatu *outcome / impact* dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk kegiatan Balai PPMHKP Balikpapan selama Tahun 2026.

Pada Tahun 2026 Balai PPMHKP Balikpapan mempunyai 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2026. Pengukuran atas pencapaian kinerja dilakukan secara triwulanan, semester dan tahunan. Pencapaian atas target indikator kinerja menjadi Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan pada periode Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 112.71 % dengan kategori istimewa, nilai capaian Triwulan I Tahun 2026 lebih rendah dari nilai capaian triwulan I tahun 2025 sebesar 113.70.

Penurunan nilai capaian ini disebabkan karena perbedaan cara perhitungan capaian IKU Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan dan IKU Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan di tahun 2025 dan di 2026 dimana pada tahun 2025 capaian IKU dihitung pada pencapaian unit usaha yang disertifikasi pada sektor produksi primer (6 sertifikasi) dan pasca panen (3 sertifikasi). Sedangkan di tahun 2026 capaian IKU dihitung dari efektifitas pelaksanaan kegiatan pengendalian mutu dan pengawasan mutu pada sektor produksi primer dan pasca panen.

Secara keseluruhan capaian indikator kinerja kegiatan Balai PPMHKP Balikpapan pada periode Triwulan I Tahun 2026 sudah tercapai dengan baik. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja 11 Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan pada Triwulan I Tahun 2026, terdapat 5 Indikator Kinerja Kegiatan dengan kategori pencapaian memenuhi atau melebihi target dan 6 Indikator Kinerja yang belum memiliki realisasi pada Triwulan I, karena target pencapaian dilakukan per semester atau tahunan.

Uraian Indikator Kinerja Kegiatan dengan kategori pencapaian memenuhi atau melebihi target adalah sebagai berikut :

1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan
2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan
3. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai PPMHKP Balikpapan
4. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Balai PPMHKP Balikpapan
5. Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup Balai PPMHKP Balikpapan

Uraian Indikator Kinerja Kegiatan yang belum memiliki nilai capaian pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Persentase implementasi metode terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang ditetapkan lingkup Balai KIPM Balikpapan
2. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai PPMHKP Balikpapan
3. Nilai pembangunan Integritas lingkup Balai PPMHKP Balikpapan
4. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai PPMHKP Balikpapan
5. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai PPMHKP Balikpapan
6. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Balai PPMHKP Balikpapan

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1. Dengan Nilai Capaian Kinerja Organisasi sebesar 118 % berdasarkan data dari website <https://kinerjaku.kkp.go.id/>

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2026	Target MARET	Capaian MARET	%	Target s/d MARET	Capaian s/d MARET	%	Kategori
SK01	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu keamanan hasil kelautan perikanan						109,41			109,41		
IKSK.1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan Data Dukung 1	Persen (%)	Maximize	Nilai Posisi Akhir	72	72	74,2	103,06	72	74,2	103,06	Baik
IKSK.2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan Data Dukung 1	Persen (%)	Maximize	Nilai Posisi Akhir	72	72	83,34	115,75	72	83,34	115,75	Istimewa
SK02	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar											
IKSK.02.1	Persentase implementasi metode terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang ditetapkan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	Persen (%)	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71	0			0	0		

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2026	Target MARET	Capaian MARET	%	Target s/d MARET	Capaian s/d MARET	%	Kategori
SK.03	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Balai PPMHKP Balikpapan						116			116		
IKSK.03.1	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82,5	0			0	0		
IKSK.03.2	Nilai pembangunan integritas lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	77	0			0	0		
IKSK.03.3	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	86,2	0			0	0		
IKSK.03.4	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai PPMHKP Balikpapan Data Dukung 1	Persen (%)	Maximize	Nilai Posisi Akhir	86	86	100	116,28	86	100	116,28	Istimewa
IKSK.03.5	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92,1	0			0	0		
IKSK.03.6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71,75	0			0	0		
IKSK.03.7	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Balai PPMHKP Balikpapan Data Dukung 1	Persen (%)	Maximize	Nilai Posisi Akhir	77	77	100	120	77	100	120	Istimewa
IKSK.03.8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan Data Dukung 1	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	3,5	3,5	3,91	111,71	3,5	3,91	111,71	Istimewa

Tabel 1. Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NKO) Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan I Tahun 2026

KINERJA KEUANGAN TRIWULAN I TAHUN 2026

Capaian Kinerja keuangan Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan I Tahun 2026 sampai dengan Triwulan I telah terealisasi sebesar Rp. 1.291.729,278,- atau sebesar 23.08 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 5.596.305.000,-.

myintress.kemendagri.go.id/layout/data-view/perservice/pembayaran/detailLaporanRealisasi

Apps

MyIntress

Cari Menu, contoh: Monitoring Tutup Periode

Tahun Anggaran: 2026

SITI MADUAN
SATKER-56780

Admin

Anggaran

Komitmen

Bendahara

Pembayaran

Persediaan

Aset Tetap

Piutang

Rekonsiliasi

Akuntansi dan Pelaporan

Tematik

Referensi

Realisasi Belanja Satker Per Jenis Belanja

Kembali

Download

Filter

PDF

XLSX

FILTER AKTIF: PERIODE AWAL: MARET PERIODE AKHIR: JANUARI

Cari Laporan...

NO	KODE / NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA									TOTAL
			PESAWAN	BARANG	MUTUAL	BERAN RANGA	SURSEK	NEGAS	BARANGS	LAIN LAIN	TRANSFER	
1	527010 BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELUATAN DAN PERIKANAN BALIKPAPAN	PAGU	4.292.002.000	1.204.303.000	0	0	0	0	0	0	0	5.096.305.000
		REALISASI	1.012.149.300	279.579.978	0	0	0	0	0	0	0	1.291.729.278
		SSA	3.279.852.700	1.024.723.022	0%	0%	0%	0%	8%	0%	0%	21.900
GRAND TOTAL		PAGU	4.292.002.000	1.204.303.000	0	0	0	0	0	0	0	5.096.305.000
		REALISASI	1.012.149.300	279.579.978	0	0	0	0	0	0	0	1.291.729.278
		%	23.98%	23.44%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	23.08%
		SSA	3.279.852.700	1.024.723.022	0	0	0	0	0	0	0	4.304.575.722

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Balai PPMHKP Balikpapan merupakan salah satu UPT BPPMHKP - Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai PPMHKP Balikpapan dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai PPMHKP Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Triwulan I Tahun 2026 untuk mencapai visi dan misi Balai PPMHKP Balikpapan. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan Balai PPMHKP Balikpapan serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Balai PPMHKP Balikpapan.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas. Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, UPT menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan
- b) Pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut dan verifikasi penerbitan sertifikat pada unit penangkapan ikan, unit pembenihan ikan, unit pembudidayaan ikan, unit produksi pakan ikan, unit produksi obat ikan, unit distribusi obat ikan, unit penanganan hasil kelautan dan perikanan, unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan dan unit distribusi hasil kelautan dan perikanan
- c) Pelaksanaan surveilens, pengambilan dan pengujian contoh, dan pemeriksaan tindak lanjut hasil surveilens pada unit penangkapan ikan, unit pembenihan ikan, unit pembudidayaan ikan, unit produksi pakan ikan, unit produksi obat ikan, unit distribusi obat ikan, unit penanganan hasil kelautan dan perikanan, unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan dan unit distribusi hasil kelautan dan perikanan
- d) Pelaksanaan penerbitan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan
- e) Pelaksanaan pemantauan kesegaran ikan, residu bahan berbahaya terhadap hasil kelautan dan perikanan serta racun hayati di perairan
- f) Pelaksanaan pengelolaan dan penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional, sistem manajemen mutu laboratorium dan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi
- g) Pelaksanaan kerja sama terkait layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan
- h) Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi terkait pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan
- i) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dan
- j) Pelaksanaan urusan ketatausahaan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPPMHKP, Kepala Balai PPMHKP Balikpapan dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan kelompok Jabatan Fungsional.

Jumlah SDM aparatur yang mendukung Balai PPMHKP Balikpapan sejumlah 18 pegawai (17 orang PNS dan 1 orang CPNS) , 11 orang PPPK, 3 orang PPPK Paruh Waktu dan 1 orang PJLP. ASN di BKIPM Balikpapan terdiri dari 2 pegawai pejabat struktural, 2 pegawai fungsional umum, 9 pegawai fungsional inspektur mutu, 2 pegawai fungsional arsiparis, 3 pegawai fungsional keuangan, 1 pegawai fungsional BMN, 3 orang Pengelola Layanan Operasional, 4 orang Operator Layanan Operasional, 3 orang Penata Layanan Operasional dan 1 orang Pengadministrasi Perkantoran. Distribusi pegawai yang berimbang ini diperlukan dalam membentuk *workforce* yang efektif dan efisien.



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai PPMHKP Balikpapan

1.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ORGANISASI

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Balai PPMHKP Balikpapan disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, serta diseleraskan dengan perkembangan lingkungan yang terjadi. Sejalan dengan arah dan kebijakan BPPMHKP untuk mewujudkan organisasi dan dukungannya terhadap mandate yang diberikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian Kebijakan Ekonomi Biru dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan (prioritas).

Aspek strategis organisasi merupakan penjabaran lebih detail dari tujuan Balai PPMHKP Balikpapan dengan indikator dan target yang terukur. Aspek strategis tersebut dijabarkan melalui Sasaran Kegiatan Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Meningkatkan ekspor produk perikanan dengan pengendalian dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan mulai dari hulu sampai hilir, sejak ikan ditangkap sampai di ekspor ke negara tujuan.

Penjaminan keberterimaan produk perikanan di Negara tujuan dilakukan melalui pemenuhan standar mutu dan keamanan dari sektor produksi primer dan sektor produksi pasca panen, pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI dan pemenuhan standar produk sesuai persyaratan negara tujuan, sehingga produk perikanan yang diekspor diterima di negara tujuan ekspor.

Sasaran Kegiatan 2 : Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar

Peningkatan ekspor hasil kelautan dan perikanan selain melalui pengendalian dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan, juga dilakukan melalui pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi.

Sasaran Kegiatan 3 : Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Balai PPMHKP Balikpapan

Melaksanakan pengelolaan organisasi yang bersih, efektif dan terpercaya melalui penyediaan data dan informasi yang baik, benar dan akurat, peningkatan kompetensi sumberdaya manusia aparatur, kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan serta melakukan inovasi guna peningkatan kinerja dan mengevaluasi pelayanan kinerja melalui pelaksanaan survey kepuasan masyarakat.

1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dan penyajian LKj Triwulan I Tahun 2026 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

- a. Bab I – Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
- b. Bab II – Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- c. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;
- e. Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dan hal-hal lainnya

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. VISI DAN MISI

Sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan visi dan misinya yaitu :

Visi : Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan, dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian berlandaskan gotong royong

Misi :

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 2 Triwulan I Tahun 2026, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, Balai PPMHKP Balikpapan sebagai UPT dari BPPMHKP menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) misi KKP dalam Renstra 2020-2026, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2026, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Balai PPMHKP Balikpapan sebagai UPT BPPMHKP turut bertanggungjawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu :

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan;

2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik

2.2. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta strategis, sasaran kegiatan dan indikator kinerja Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan I Tahun 2026 ditunjukkan pada Gambar 2. dan Tabel 2. dibawah ini.



Gambar 2. Peta Strategis Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan I Tahun 2026

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Triwulan I Tahun 2026
IKK. 1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	%	72
IKK. 2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	%	72
IKK. 3	Persentase implementasi metode terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang ditetapkan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	%	71
IKK. 4	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	Indeks	82.5
IKK. 5	Nilai pembangunan integritas lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	Nilai	77
IKK. 6	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	Nilai	86.2
IKK. 7	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	Persen	86
IKK. 8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	Nilai	92.1
IKK. 9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	Nilai	71.75
IKK. 10	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	Persen	77
IKK. 11	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	Nilai	3.5

Tabel 2. Target Indikator Kinerja Kegiatan Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan I Tahun 2026

2.3. PENGUKURAN KINERJA

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian

IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize.

Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah :

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut :

a. Polarisasi Maximize

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi lebih tinggi dari target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

b. Polarisasi Minimize

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{1 + (1 - \text{Realisasi/Target})\} \times 100\%$$

c. Polarisasi Stabilize

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

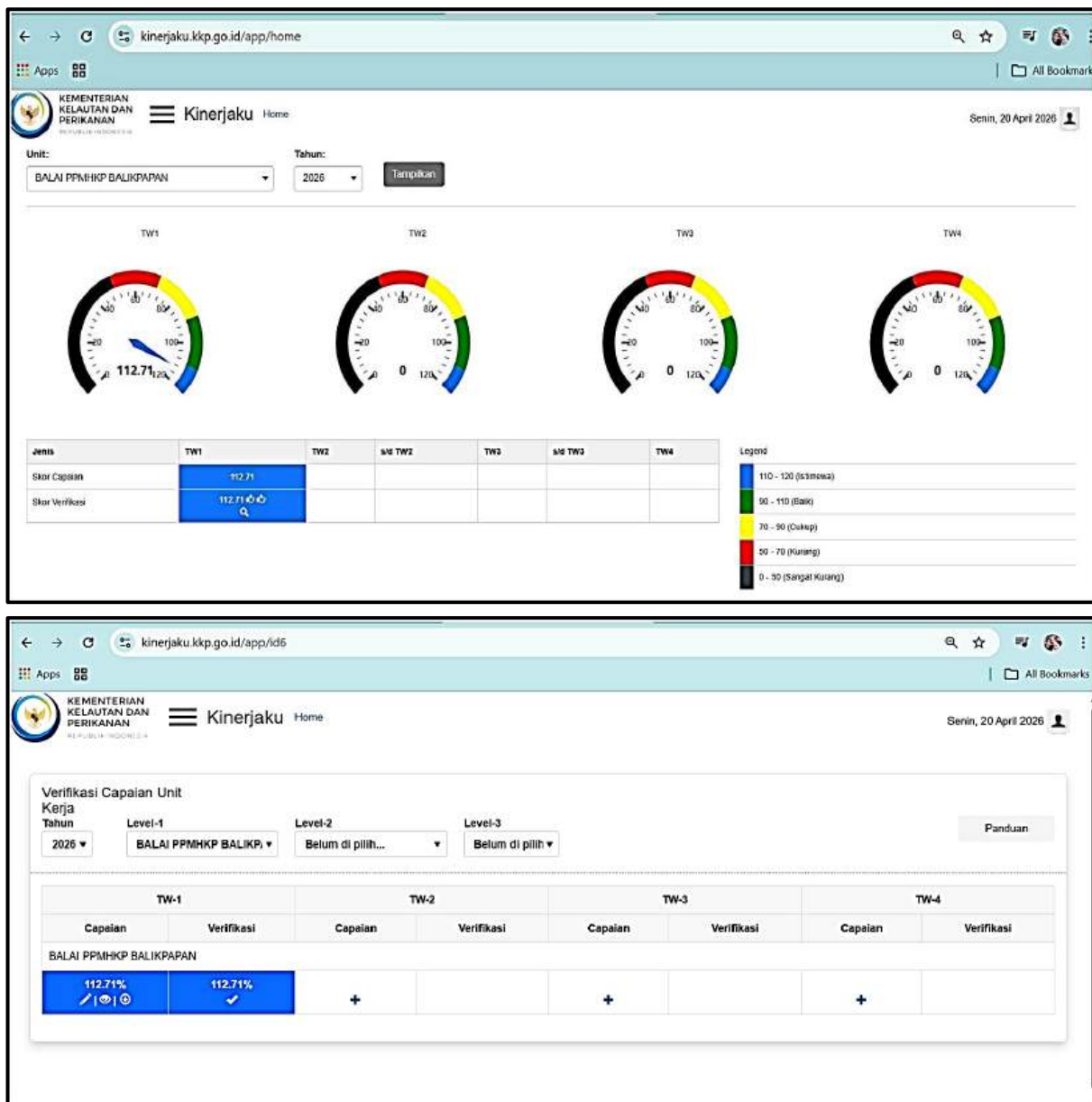
4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :

BIRU	HIJAU	KUNING	MERAH	HITAM
110 - 120	90 - < 110	70 - < 90	50 - < 70	< 50
Istimewa	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Secara umum target kinerja Balai PPMHKP Balikpapan pada Triwulan I Triwulan I Tahun 2026 telah tercapai, hal ini ditandai dengan Nilai Capaian Organisasi (NKO) sebesar 112.71 % dengan kategori istimewa, berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di <https://kinerjaku.kkp.go.id>



Gambar 3. Dashboard Capaian IK dan IKU pada Sistem Aplikasi Kinerjaku

Nilai capaian kinerja merupakan gambaran nilai kinerja Balai PPMHKP Balikpapan secara keseluruhan. Nilai capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 sebesar 112.71 %, capaian ini lebih rendah dari capaian Nilai Kinerja Organisasi Triwulan I tahun 2025 yaitu sebesar 113,17 %. Penurunan nilai capaian ini disebabkan karena perbedaan cara perhitungan capaian IKU Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan dan IKU Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan di tahun 2025 dan di 2026 dimana pada tahun 2025 capaian IKU dihitung pada pencapaian unit usaha yang disertifikasi pada sektor produksi primer (6 sertifikasi) dan pasca panen (3 sertifikasi). Sedangkan di tahun 2026 capaian IKU dihitung dari efektifitas pelaksanaan kegiatan pengendalian mutu dan pengawasan mutu pada sektor produksi primer dan pasca panen.

Rekapitulasi capaian kinerja Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan I Tahun 2026 secara keseluruhan, dapat dilihat pada Tabel 3.

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Triwulan I Tahun 2026			
			Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	%	Kategori
SK 1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan Perikanan						
IKK. 1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	%	72	74.2	103.06	Baik
IKK. 2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	%	72	83.34	115.75	Istimewa
SK 2. Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar						
IKK. 3	Persentase implementasi metode terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang ditetapkan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	%	-	-	-	-

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Triwulan I Tahun 2026			
			Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	%	Kategori
SK. 3. Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Balai PPMHKP Balikpapan						
IKK. 4	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	Indeks	-	-	-	-
IKK. 5	Nilai pembangunan integritas lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	Nilai	-	-	-	-
IKK. 6	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	Nilai	-	-	-	-
IKK. 7	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	Persen	86	100	116.28	Istimewa
IKK. 8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	Nilai	-	-	-	-
IKK. 9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	Nilai	-	-	-	-
IKK. 10	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	Persen	77	100	120	Istimewa
IKK. 11	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	Indeks	3.5	3.91	111.71	Istimewa

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan I Tahun 2026

3.2. ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian kinerja berdasarkan sasaran kegiatan secara lebih detail berdasarkan indikator kinerjanya serta dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra Balai KIPM Balikpapan, adalah sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan menjadi tolok ukur dalam keberhasilan program dan kegiatan Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan I Tahun 2026. Nilai capaian kegiatan Balai PPMHKP Balikpapan untuk sasaran kegiatan 1 pada Triwulan I Tahun 2026 tersebut adalah 109.41 % dengan kategori baik.

Indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan perikanan adalah :

1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan.
2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan.

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2025	Triwulan I Tahun 2026				Renstra 2026 - 2029		Kategori
		Realisasi TW. I	Target TW. I	Realisasi TW. I	(%)	Target	(%)		
SK 1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan									
IKK. 1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	100	72	74.2	103.06	72	103.06	Baik	
IKK. 2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	120	72	83.34	115.75	72	115.75	Istimewa	

Tabel 4. Capaian Sasaran Kegiatan 1 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan

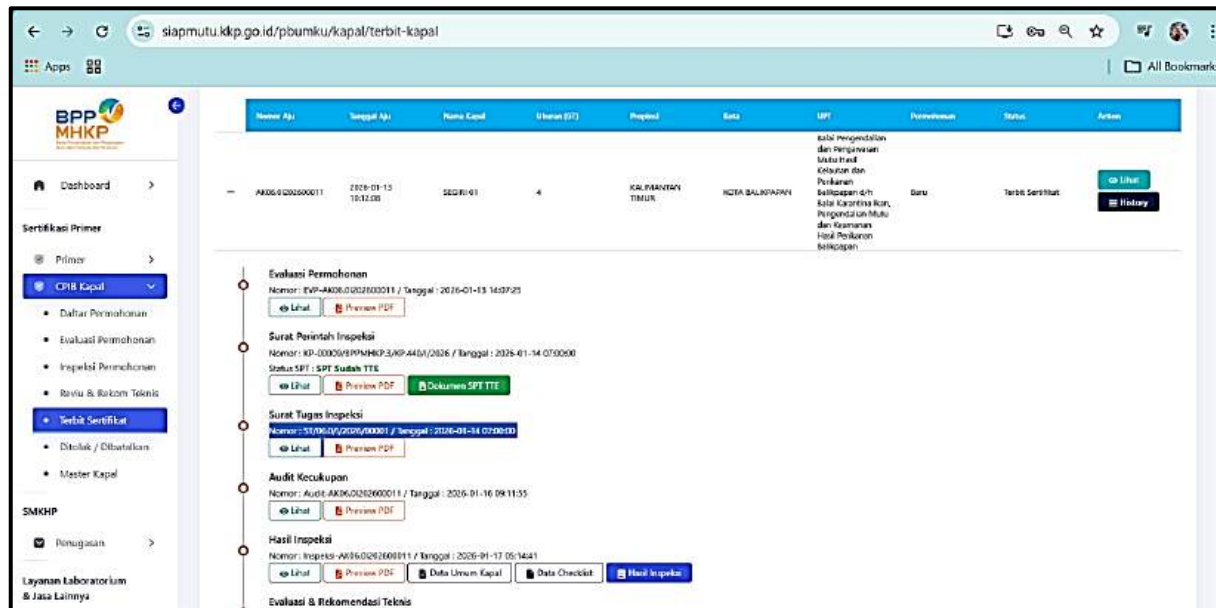
IKK. 1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan

Kegiatan yang dilakukan dalam upaya mendukung Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dari hulu sampai hilir adalah dengan kegiatan pengendalian dan pengawasan pada produk hasil kelautan dan perikanan yaitu :

- a. Kegiatan pengendalian dilakukan melalui pelaksanaan sertifikasi meliputi Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB), Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB), Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik (CPOIB), Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB) dan dari perikanan tangkap meliputi Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di kapal. Output dari kegiatan pengendalian adalah sertifikat yang diterbitkan kepada pelaku usaha perikanan oleh Otoritas Kompeten.
- b. Kegiatan pengawasan dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan surveilen Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB), Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB), Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik (CPOIB), Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB) dan dari perikanan tangkap meliputi Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di kapal. Output dari kegiatan pengawasan adalah Surat Keterangan Hasil Surveilen (SKHS) yang diterbitkan kepada pelaku usaha perikanan yang telah tersertifikasi CPIB, CBIB, CPIB di Kapal, CPPIB, CPOIB dan CDOIB serta telah dilakukan surveilen terhadap penerapannya di unit usaha tersebut.

Sektor produksi perikanan primer merujuk pada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya. Pelaksanaan kegiatan pengendalian pada sektor produksi primer dilakukan berdasarkan permohonan yang masuk pada sistem OSS maupun secara manual. Selama Triwulan I Tahun 2026, terdapat 1 jenis permohonan sertifikasi sektor produksi primer yaitu Sertifikasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di Kapal.

Pelaksanaan sertifikasi CPIB di Kapal dilakukan dengan metode inspeksi penilaian mandiri (*self assesment*) pada Kapal dengan kapasitas > 5 GT yang berlokasi di Kota Balikpapan. Jumlah SDM yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi CPIB dan CBIB pada Triwulan I Tahun 2026 sebanyak 1 orang inspektur mutu dan 1 orang calon inspektur mutu (pendamping). Output dari kegiatan pengendalian pada sektor produksi primer pada Triwulan I Tahun 2026 terdiri dari Sertifikat CPIB di Kapal sebanyak 1 sertifikat.



Gambar 4. Sertifikasi CPIB di Kapal Pada Aplikasi SIAP MUTU

Kegiatan pengawasan mutu di sektor produksi primer dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan surveilen terhadap unit usaha yang telah menerapkan CBIB, CPIB, CPIB di Kapal, CPPIB, CPOIB dan CDOIB. Pada triwulan I tahun 2026 telah disusun program kegiatan surveilen pada unit usaha yang telah menerapkan CPIB dan CBIB. Sedangkan untuk kegiatan surveilen pada penerapan CPPIB, CPOIB dan CDOIB di tahun 2026 tidak ada kegiatan karena dalam 1 periode sertifikasi, kegiatan surveilen hanya dilakukan 1 kali.

Dalam upaya peningkatan kompetensi personil, sebanyak 4 (empat) orang Inspektur Mutu, 1 (satu) orang calon Inspektur Mutu dan 1 (satu) orang PPPK Pengelola Layanan Operasional mengikuti Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI) pada tanggal 02 -04 Maret 2026 yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petugas dalam mendukung pelaksanaan pengawasan serta sertifikasi mutu hasil perikanan, sekaligus menjadi dasar dalam pelaksanaan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait penerapan standar mutu dan keamanan pangan.

Realisasi terhadap IKU Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan TW I Tahun 2026 sebesar 74.20 % berdasarkan Surat Kepala Pusat Mutu Pasca Panen Nomor B.450/BPPMHKP.4/RC.610/IV/2026 tanggal 16 April 2026 tentang Capaian Indikator Kinerja “Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang

Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan” Triwulan I Tahun 2026. Bila dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja ini pada triwulan I Tahun 2025 sebesar 100 %, nilai capaian di triwulan I tahun 2026 memiliki nilai capaian yang lebih rendah. Hal ini disebabkan karena perbedaan formula perhitungan terhadap nilai capaian pada triwulan berjalan.

Keberhasilan pencapaian melebihi target kinerja sebesar 74.20 % atau persentase pencapaian sebesar 103.06 % tersebut disebabkan meningkatnya tingkat kesadaran dan komitmen pelaku usaha dan sinergi yang baik dengan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu di hulu. Selain itu pencapaian hasil tersebut juga disebabkan oleh koordinasi yang baik dengan pelaku usaha sehingga kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan adanya proses produksi saat pelaksanaan inspeksi dapat terpenuhi.

Realisasi anggaran lingkup Kegiatan Pengawasan Mutu Produksi Primer Triwulan I Tahun 2026 sebesar 0 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 35.560.000,-. Efisiensi anggaran pada pelaksanaan IKU ini dapat tercapai oleh pengaturan SDM pelaksana kegiatan dan didukung pelaksanaan kegiatan inspeksi dengan metode inspeksi penilaian mandiri (*self assesment*)

IKK. 2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen adalah pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu terhadap unit usaha yang telah menerapkan program persyaratan dasar, manajemen keamanan pangan berbasis HACCP dan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. Adapun lingkup kegiatan pengendalian mutu dan pengawasan mutu yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Pengendalian mutu adalah semua kegiatan yang meliputi inspeksi, surveilen dan pengambilan contoh dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
- b. Pengawasan mutu adalah kegiatan untuk melihat konsistensi terhadap penerapan standar dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan melalui kegiatan surveilen

Kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencapaian target yang telah dilakukan selama triwulan I tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengendalian penerapan jaminan mutu di Unit Pengolahan Ikan (UPI) melalui kegiatan inspeksi dan surveilen penerapan HACCP.
 - a. Kegiatan inspeksi dilakukan pada Bulan Februari 2026 pada 2 UPI pada 5 ruang lingkup produk yaitu :
 - Tanggal 12 Februari 2026 pada UPI PT. Samudra Manggala Abadi, dengan 2 ruang lingkup produk yaitu :
 - 1) Frozen Shrimp
 - 2) Frozen Demersal Fish



Gambar 5. Kegiatan Inspeksi Penerapan HACCP di Unit Pengolahan Ikan PT. Samudra Manggala Abadi

- Tanggal 19 Februari 2026 pada CV. Tiga A (Unit Manggar) dengan 4 ruang lingkup produk yaitu :
 - 1) Fresh Demersal Fish
 - 2) Fresh Pelagic Fish
 - 3) Fresh Shrimp
 - 4) Fresh Swimming Crab



Gambar 6. Kegiatan Inspeksi Penerapan HACCP di UPI. CV. Tiga A

- b. Pelaksanaan surveilen pada Bulan Januari 2026 telah dilakukan pada 7 Unit Pengolahan Ikan (UPI). Terdapat 1 UPI yang tidak dilakukan surveilen penerapan HACCP disebabkan tidak ada proses produksi yaitu PT. Borneo Ocean Naully dengan ruang lingkup Dried Seaweed. Adapun surveilen UPI telah dilakukan pada UPI sebagai berikut :

- 1) PT. Sumber Kalimantan Abadi
- 2) PT. Syam Surya Mandiri
- 3) PT. Ocean Paradise Fishery
- 4) PT. Nusaybah Alby Saing
- 5) CV. Multi Sarana Jaya
- 6) CV. Tiga A (Unit Manggar)
- 7) CV. Tiga A (Unit Kampung Baru)

Jadwal	UPT Pembina	PJ Pusat	Ketua Tim	UPI	RL	Status
29 JAN	BL BALIKPAPAN	Ghina Octavia Tamt...	Winda Anggraini	TIGAA, CV	3	SKHS
28 JAN	BL BALIKPAPAN	Ghina Octavia Tamt...	Amul Hasani	MULTI SARANA JAYA, CV	1	SKHS
27 JAN	BL BALIKPAPAN	Ghina Octavia Tamt...	Amul Hasani	NUSAYBAH ALBY SAING, PT	1	SKHS
27 JAN	BL BALIKPAPAN	Ghina Octavia Tamt...	Winda Anggraini	OCEAN PARADISE FISHERY, PT	2	SKHS
20 JAN	BL BALIKPAPAN	Ghina Octavia Tamt...	Frederica Elnis Maharani	TIGAA, CV	6	SKHS
14 JAN	BL BALIKPAPAN	Ghina Octavia Tamt...	Kadson Bahubara	SVAM SURYAMANDIRI, PT	2	SKHS
14 JAN	BL BALIKPAPAN	Ghina Octavia Tamt...	Novita	SUMBER KALIMANTAN ABADI, PT	2	SKHS

Gambar 7. Tangkap Layar Kegiatan Surveilien Penerapan HACCP di UPI

2. Pelaksanaan pengendalian penerapan jaminan mutu di Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan UMKM melalui kegiatan inspeksi penerapan Program Kelayakan Dasar untuk penerbitan SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan). Sertifikasi pelaksanaan GMP dan SSOP di UPI dan UMKM melalui inspeksi secara langsung (*on site*) dan melalui pemenuhan dokumen-dokumen pendukung melalui website SKP Online
 - Inspeksi secara langsung pada UPI CV. Multi Sarana Jaya pada tanggal 10 Maret 2026 dengan 1 ruang lingkup produk yaitu Dried Seaweed



Gambar 7. Kegiatan Inspeksi Onsite Penerapan Program Kelayakan Dasar (GMP-SSOP) di UPI

- Penerbitan SKP melalui pemenuhan dokumen pendukung melalui website SKP Online pada 2 UPI sebagai berikut :
 - a. PT. Atlas Agung Abadi (Unit Manggar) pada tanggal 26 Januari 2026 dengan 4 ruang lingkup produk yaitu Fresh Demersal Fish, Fresh Pelagic Fish, Fresh Shrimp dan Fresh Swimming Crab
 - b. PT. Atlas Agung Abadi (Unit Kampung Baru) pada tanggal 26 Januari 2026 dengan 4 ruang lingkup produk yaitu Fresh Demersal Fish, Fresh Pelagic Fish dan Fresh Shrimp

The screenshot shows the 'SKP ONLINE' web application. The left sidebar contains a menu with 'Dashboard', 'Data UPI', 'User', 'Alur Proses', 'Produk', and 'SKP'. The 'SKP' menu is active, displaying a table of 'Data SKP Terbit'. The table includes columns for 'No', 'Nama UPI', 'Produk ID', 'Produk BN', 'No. Ijin', 'No. SKP', 'Tgl Terbit / Squid', 'ROK', 'ALOKAT', 'Provinsi', 'SUBSIDIO NO URS', and 'B'. Two rows of data are shown, both for 'PT. ATLAS ALOKAT'. The interface is in Indonesian.

Gambar 8. Kegiatan Inspeksi Penerapan Program Kelayakan Dasar (GMP-SSOP) di UPI Melalui Pemenuhan Kelengkapan Dokumen

Capaian indikator diperoleh dengan menghitung persentase tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP, HACCP dan SPDI. dibagi dengan jumlah dari unsur pembentuk. Realisasi terhadap IKU Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan TW I Tahun 2026 sebesar 83.34 % berdasarkan Surat Kepala Pusat Mutu Pasca Panen Nomor B.450/BPPMHKP.4/RC.610/IV/2026 tanggal 16 April 2026 tentang Nilai Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen dengan data sebagai berikut :

- Efektifitas pengendalian dan pengawasan HACCP di UPI (**A**) sebesar 91.67 %
- Efektifitas pengendalian dan pengawasan SKP di UPI dan UMKM (**B**) sebesar 83.34 %

- Efektifitas pengendalian dan pengawasan SPDI di pelaku usaha perikanan (C) sebesar 75 %
- Berdasarkan data efektifitas pengendalian dan pengawasan HACCP, SKP dan SPDI tersebut maka capaian untuk IKU Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 83.34 %

Capaian Indikator Kinerja ini pada triwulan I tahun 2025 memiliki nilai capaian 83.34 % atau persentase capaian sebesar 115.75 %. Bila dibandingkan dengan nilai capaian Triwulan I Tahun 2026 sebesar 110 %, capaian triwulan I tahun 2026 memiliki nilai capaian yang lebih rendah. Hal ini disebabkan karena perbedaan formula perhitungan terhadap nilai capaian pada triwulan berjalan.

Pencapaian nilai melebihi target kinerja sebesar 83.34 % tersebut disebabkan oleh meningkatnya tingkat kesadaran dan komitmen para pelaku usaha perikanan dalam penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta pemenuhan pasar dagang produk perikanan yang semakin kompetitif terutama untuk tujuan konsumen luar negeri (ekspor). Keberhasilan ini dapat tercapai dengan pelaksanaan pemberian layanan berupa edukasi kepada pelaku usaha baik melalui pendampingan untuk penjaminan produk dari hulu sampai hilir.

Realisasi anggaran lingkup Kegiatan Pengawasan Mutu Pasca Panen Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp. 1.202.000,- atau sebesar 1.77 % dari pagu anggaran setelah pemblokiran anggaran sebesar Rp. 67.729.000,-. Efisiensi pelaksanaan kegiatan validasi produk pada sektor produksi pasca panen didukung dengan pelaksanaan kegiatan melalui verifikasi pemenuhan dokumen untuk kegiatan sertifikasi SKP.

Sasaran Kegiatan 2 : Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif menjadi tolok ukur dalam keberhasilan program dan kegiatan Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan I Tahun 2026. Sasaran kegiatan 2 lingkup Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan I Tahun 2026 belum memiliki nilai capaian

karena capaiannya dilakukan melalui hasil kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP berdasarkan implementasi SNI ISO / IEC 17020 : 2012, SNI ISO / IEC 17025 : 2017 dan penerapan Quality Manajemen System (QMS) di lingkup Balai PPMHKP Balikpapan.

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2025	Triwulan I Tahun 2026			Renstra 2026 - 2029		Kategori
		Realisasi Triwulan I	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	(%)	Target	(%)	
SK 2. Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar								
IKK. 3	Persentase implementasi metode terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang ditetapkan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	-	-	-	-	71	-	-

Tabel 5. Capaian Sasaran Kegiatan 2 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan

IKK. 3. Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Ditetapkan Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan

Nilai pemenuhan indikator kinerja ini merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap :

- Laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 : 2017 serta dinyatakan dalam bentuk persentase berdasarkan tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.
- Lembaga inspeksi dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada

ISO/IEC 17020 : 2012 dan dinyatakan dalam bentuk persentase berdasarkan tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa lembaga inspeksi telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki

- c. Nilai kualitas pelaksanaan Quality Manajemen System (QMS) dari rata-rata penerapan sistem jaminan mutu

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri. ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Perhitungan capaian indikator kinerja persentase implementasi metode terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang ditetapkan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan Tahun 2026 dilakukan secara tahunan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP terhadap pelaksanaan kegiatan penerapan SNI ISO / IEC 17020 : 2012, SNI ISO / IEC 17025 : 2017 dan nilai kualitas penerapan QMS.

Sasaran Kegiatan 3 : Tatakelola Pemerintahan Yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Balai PPMHK Balikpapan

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan menjadi tolak ukur dalam keberhasilan program dan kegiatan Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan I Tahun 2026. Nilai capaian sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan periode Triwulan I Tahun 2026 tersebut adalah 116 %. Indikator kinerja kegiatan yang memiliki nilai capaian pada triwulan I untuk mengukur keberhasilan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan adalah :

1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai PPMHKP Balikpapan
2. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Balai PPMHKP Balikpapan
3. Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup Balai PPMHKP Balikpapan

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2025	Triwulan I Tahun 2026				Renstra 2026 - 2029		Kategori
		Realisasi Triwulan I	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	(%)	Target	(%)		
	SK. 3. Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan								
IKK. 4	Indeks Professional ASN lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	-	-	-	-	82,5	-	-	
IKK. 5	Nilai pembangunan integritas lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	-	-	-	-	77			
IKK. 6	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	-	-	-	-	86,2	-	-	
IKK. 7	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	100	86	100	116,28	86	116,28	Istimewa	
IKK. 8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	-	-	-	-	92.1	-	-	
IKK. 9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	-	-	-	-	71.75	-	-	
IKK. 10	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	100	77	100	120	77	120	Istimewa	
IKK. 11	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	-	3.5	3.91	111.71	3.5	111.71	Istimewa	

Tabel 6. Capaian Sasaran Kegiatan 3 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan

IKK. 4. Indeks Profesional ASN Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Perhitungan capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai PPMHKP Balikpapan tahun 2026 dilakukan setiap semester sehingga pada Triwulan I Tahun 2026 belum memiliki nilai capaian.

IKK. 5. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan fokus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang PEMBANGUNAN Integritas di Lingkungan KKP.

Nilai pembangunan integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jendral terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi :

- a. Pembangunan zona integritas (bobot 30 %)
- b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15 %)
- c. Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS (bobot 15 %)
- d. Penanganan benturan kepentingan (bobot 15 %)
- e. Pelaporan harta kekayaan (LHKAN) (bobot 15 %)
- f. Pengendalian kecurangan (bobot 10%)

Perhitungan capaian indikator kinerja persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona itegritas lingkup Balai PPMHKP Balikpapan Tahun 2026 dilakukan per semester.

IKK. 6. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rekonsiliasi kinerja merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek yaitu :

1. Aspek kepatuhan : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian Target IKU, Renaksi, LKJ / LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ / LCK TW III
2. Aspek kesesuaian : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan kesesuaian informasi data.
3. Aspek ketercapaian : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2024 pada aplikasi kinerjaku

Perhitungan capaian indikator kinerja nilai rekonsiliasi kinerja satker Balai PPMHKP Balikpapan Tahun 2026 dilakukan secara tahunan sehingga pada Triwulan I Tahun 2026 belum memiliki nilai capaian.

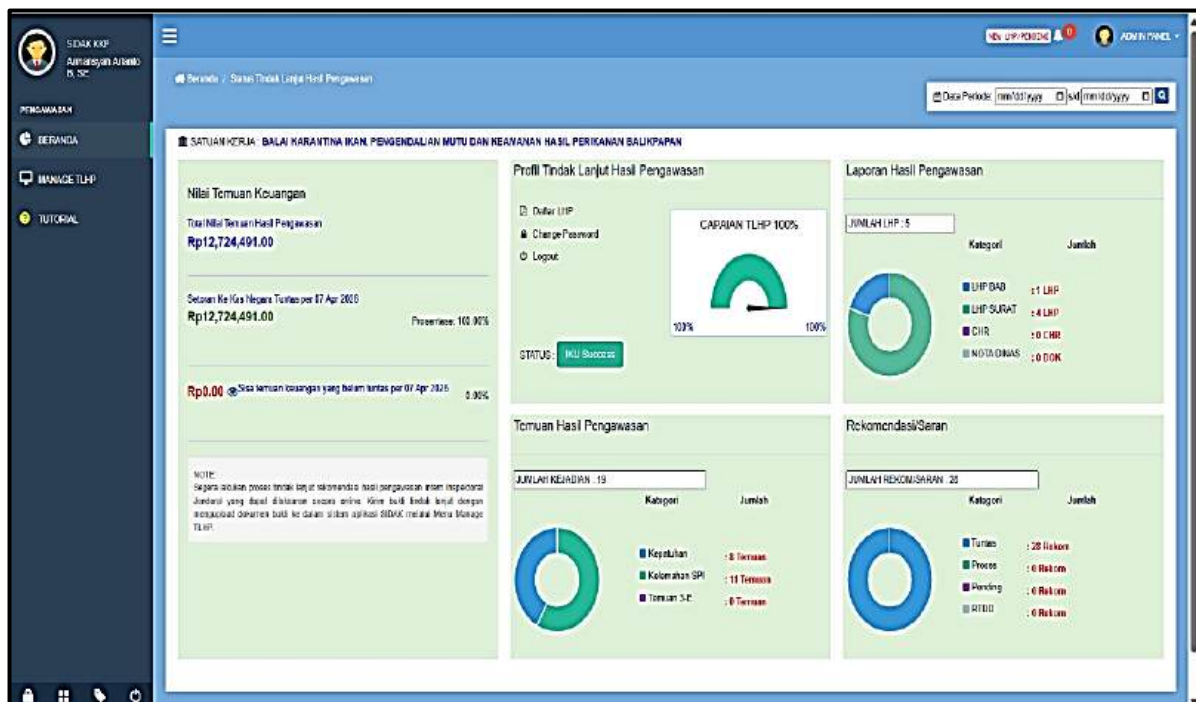
IKK. 7. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal Balai PPMHKP

Balikpapan yang sudah ditindaklanjuti (proses dan / atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan dengan pengukuran target kumulatif tahunan sebesar 86 % pada Triwulan I Tahun 2026.

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai PPMHKP Balikpapan adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit Eselon I lingkup KKP sampai dengan waktu pengukuran. Pengecualian apabila tidak terdapat temuan dari Inspektorat Jenderal Mitra, maka capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Level II sesuai dengan *capture dashboard* pada Aplikasi SIDAK.

Selama Triwulan I Tahun 2026 tidak terdapat rekomendasi hasil pengawasan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan dari Inspektorat Jendral KKP sehingga untuk nilai capaian diperoleh dari tangkap layar pada Aplikasi SIDAK. Capaian indikator kinerja presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai PPMHKP Balikpapan pada periode Triwulan I tahun 2024 adalah 100 % dari target sebesar 86 %. Apabila dibandingkan dengan dengan nilai capaian pada triwulan I Tahun 2025, indikator kinerja ini memiliki nilai capaian yang sama yaitu 100 % dan bila dibandingkan dengan target RENSTRA 2026 – 2029 memiliki nilai persentase capaian sebesar 116.28 % dari target 86 % dengan kategori istimewa.



ID	Unit Kerja	Jenis Pengawasan	Nomor LRP	Tanggal Register	Objek Pengawasan	STATUS	Aksi
2588	BALAI KAWANTRAL, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN	Evaluasi	T.02002.4/PPM/4/2023	2023-05-07	Hasil Evaluasi PMP Tahun 2022-2023 pada Balai Kawantral, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KKP) Balikpapan	FUNGSI	Detail
2587	BALAI KAWANTRAL, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN	Evaluasi	T.02002.4/PPM/4/2023	2023-05-08	Hasil Evaluasi Policy eran Publik pada Balai Kawantral dan Pengendalian Mutu Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur	FUNGSI	Detail
1872	BALAI KAWANTRAL, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN	Evaluasi	R.76004/PPM/4/2022	2022-04-05	Hasil Evaluasi dan Implementasi SOP pada Balai Kawantral, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KKP) Balikpapan Tahun 2022	FUNGSI	Detail
1276	BALAI KAWANTRAL, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN	Audit	40754TAM/PPM/2021	2021-03-31	LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA BALAI KAWANTRAL BALIKPAPAN TA.2020-2021	FUNGSI	Detail
961	BALAI KAWANTRAL, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN	Evaluasi	1.09.1407.4/PPM/4/2020	2020-08-04	Estimasi Pemenuhan Harga Pokok Produksi (PMP) di Balai KKP Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur	FUNGSI	Detail

Gambar 9. Tangkap Layar Aplikasi SIDAK Triwulan I Tahun 2026

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan di lingkup Balai PPMHKP Balikpapan telah dilakukan dengan cara peningkatan kinerja pegawai, penggunaan anggaran Triwulan I Tahun 2026 sesuai ketentuan yang berlaku. Pagu anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan indikator ini adalah Rp. 23.482.000,- dan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 belum ada realisasi anggaran atau 0 % dari pagu yang tersedia disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran sejak awal Triwulan I Tahun 2026.

IKK. 8. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai PPMHKP Balikpapan

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai ini diperoleh dari data input dan output satker didalam aplikasi MyIntress Kementerian Keuangan.

Pencapaian nilai IKPA berdasarkan ketaatan pada 8 indikator yaitu :

1. Revisi DIPA (bobot 10 %)
2. Deviasi RPD (bobot 15 %)
3. Penyerapan anggaran (bobot 20 %)
4. Belanja kontraktual (bobot 10 %)
5. Penyelesaian tagihan (bobot 10 %)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10 %)

7. Dispensasi SPM (pengurang nilai IKPA)
8. Capaian output (bobot 25 %)

Perhitungan capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Balai PPMHKP Balikpapan Tahun 2024 dilakukan per semester sehingga pada Triwulan I Tahun 2026 belum memiliki nilai capaian.

IKK. 9. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BKIPM Balikpapan

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian / Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Kinerja anggaran mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor : 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing-masing.

Target yang ditetapkan untuk nilai kinerja anggaran tahun 2026 adalah 71.75 sedangkan pengukuran capaiannya dilakukan tahunan pada aplikasi Online Monitoring SMART DJA sehingga pada triwulan I tahun 2026 belum memiliki nilai capaian.

IKK. 10. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SiRUP Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan

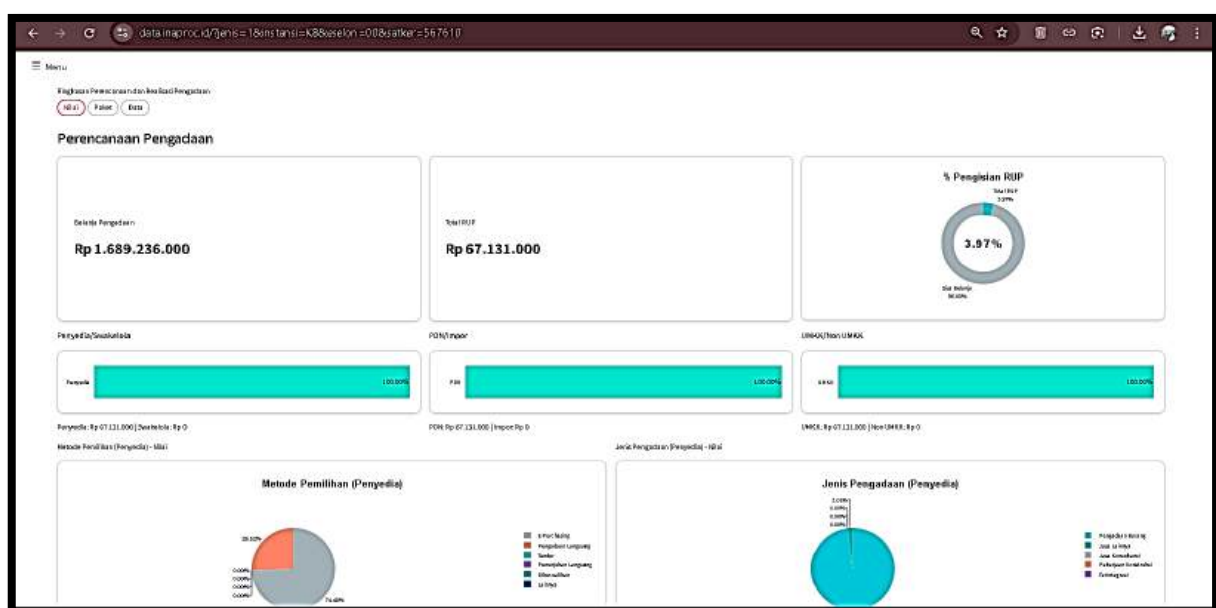
Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan

dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Target yang ditetapkan untuk capaian indikator kinerja persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Balai PPMHKP Balikpapan adalah 77 % sedangkan pengukuran capaiannya dilakukan setiap triwulan. Capaian indikator ini pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 100 % atau 120 % dari target sebesar 77 % berdasarkan penyampaian Nota Dinas dari Sekretariat Jendral KKP Nomor 283/SJ.7/PL.410/IV/2026 tanggal 7 April 2026 tentang Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP triwulan I tahun anggaran 2026.

Pencapaian nilai kinerja tersebut diupayakan melalui revisi RUP pada SIRUP pasca efisiensi anggaran berdasarkan kertas kerja klarifikasi yang telah disusun, sehingga dapat mencegah terjadinya persentase pengumuman RUP pada SIRUP melebihi 100 %. Data sesuai kertas kerja klarifikasi untuk nilai Pagu Terumumkan pasca efisiensi, setelah dilakukan penyesuaian oleh LKPP digunakan sebagai acuan untuk menjadi Pagu Pengadaan di dalam Statistik Moner SIRUP, sedangkan revisi RUP yang dilakukan UPT pada SIRUP akan membentuk data baru sebagai Pagu Terumumkan di dalam Statistik Moner SIRUP. Pagu anggaran yang tersedia untuk indikator kinerja ini sebesar Rp. 1.143.921.000,-.



ID	Nama Kegiatan	Nama Paket	Pagu (Rp)	Status	Aspek	APBN	U	Revisi	Aksi
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Industri Obat Perikanan	Jamuan Makan	34.000.000	January 2026	APBN				
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Industri Obat Perikanan	Pembayaran Listrik	141.000.000	January 2026	APBN				
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Industri Obat Perikanan	Langganan Jasa Internet	24.000.000	January 2026	APBN				
4	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Industri Obat Perikanan	Belanja Kebutuhan Rumah Tinggal Perikanan	50.000.000	January 2026	APBN				
5	Dukungan Manajemen Internal	Kemudahan Saluran Air	41.000.000	March 2026	APBN				

Gambar 10. Tangkap Layar Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)

IKK. 11. Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BKIPM menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat / pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/>. Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing 47 UPT. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian pelayanan, biaya jasa pelayanan, produk pelayanan, kecepatan respon dari aplikasi sistem pelayanan, kemudahan dalam penggunaan fitur aplikasi sistem layanan, kualitas isi / konten aplikasi sistem layanan dan layanan konsultasi dan pengaduan. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari UPT lingkup BKIPM.

Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “Nilai rata-rata tertimbang” masing- masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

IKM	=	<u>Total dari Nilai Persepsi Per Unsur</u> Unsur Yang Terisi	X Nilai Penimbang Total
------------	----------	---	--------------------------------

Untuk memudahkan interpretasi penilaian SKM yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

SKM Unit Pelayanan x 25

Nilai Persepsi	Nilai Interval SKM	Nilai Interval Konversi SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,532 - 4,00	88,31 -100,00	A	Sangat Baik

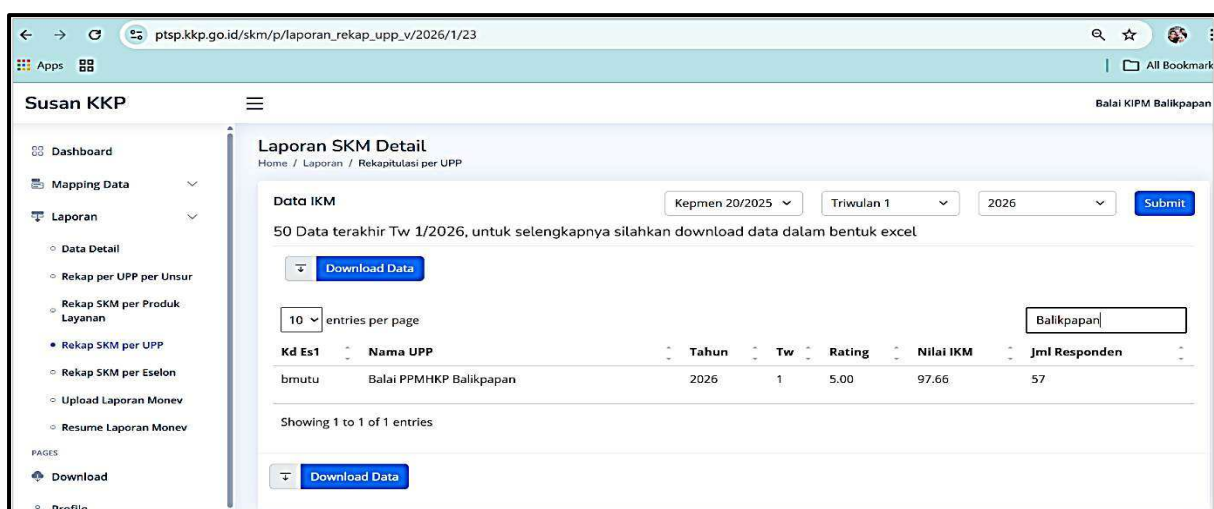
Tabel 7. Nilai Persepsi, Nilai Interval SKM, Nilai Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Berdasarkan Surat dari Sekretaris BPPMHKP Nomor 1066/BPPMHKP.1/HM.450/IV/2026 tentang Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BPPMHKP Triwulan I Tahun 2026 tanggal 10 April 2026 diketahui bahwa Nilai IKM Balai PPMHKP Balikpapan mencapai 3.91 dan SKM mencapai 97.66. Pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan diperoleh hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 3.91 maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori SANGAT BAIK, karena masih berada dalam Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Internal konversi Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan 3.532 – 4.00. Capaian Indikator Kinerja indeks kepuasan masyarakat lingkup Balai PPMHKP Balikpapan sampai

dengan Triwulan I tahun 2026 sebesar 3.91 atau dengan persentase capaian sebesar 111.71 % dari target yang ditetapkan yaitu 3.5. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I tahun 2025 karena perbedaan perhitungan target. Keberhasilan peningkatan pencapaian ini disebabkan peningkatan pelayanan publik dan pembenahan fasilitas layanan yang lebih memadai

No.	Unsur SKM	Nilai Rata-rata
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan	3.89
2	Kemudahan prosedur pelayanan	3.88
3	Kesesuaian jangka waktu penyelesaian pelayanan	3.95
4	Kesesuaian biaya jasa pelayanan	3.86
5	Kesesuaian produk pelayanan	3.91
6	Kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh / unggah) dari aplikasi sistem pelayanan	3.82
7	Kemudahan dalam penggunaan fitur aplikasi sistem layanan	3.84
8	Kualitas isi / konten aplikasi sistem layanan	4.00
9	Layanan konsultasi dan pengaduan	4.00
Rata-rata		3.91

Tabel 8. Nilai Rata-rata (NRR) Hasil Survei Kepuasan Masyarakat



Gambar 11. Tangkap Layar Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan I Tahun 2026 Pada Website <https://ptsp.kkp.go.id/skm>

Dari hasil analisa hasil Survey Kepuasan Masyarakat dapat diketahui bahwa :

- a. Unsur layanan terendah yang didapatkan adalah kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh / unggah) dari aplikasi sistem pelayanan dengan nilai capaian 3.82
- b. Unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu kualitas isi / konten aplikasi sistem layanan dan layanan konsultasi dan pengaduan dengan nilai capaian 4.00

Rencana tindak lanjut untuk unsur yang memiliki capaian nilai terendah dilakukan melalui peningkatan penggunaan layanan aplikasi SIAP MUTU. Kualitas pelayanan perlu terus ditingkatkan terutama unsur pelayanan yang memperoleh nilai lebih rendah, agar nilai SKM yang diperoleh dapat dipertahankan atau lebih ditingkatkan lagi sehingga dapat memberikan pelayanan yang memuaskan untuk pelanggan / stakeholder. Dalam hal pencapaian IKU ini tidak terdapat komponen / alokasi anggaran secara khusus dalam RKAKL tahun anggaran 2026.

3.3. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Balai PPMHKP Balikpapan pada tahun anggaran 2026 sebesar Rp. 5.596.305.000,- serta pemblokiran anggaran sebesar Rp. 130.917.000,-, sehingga alokasi anggaran yang bisa digunakan setelah blokir adalah Rp. 5.465.388.000,-. Penyerapan anggaran Balai PPMHKP Balikpapan sampai dengan Triwulan I Triwulan I Tahun 2026 adalah Rp. 1.291.729,278,- atau sebesar 23.08 % dari pagu anggaran yang tersedia.

Anggaran ini digunakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja. Hal ini dibuktikan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 112,71 %, dimana Nilai Kinerja Organisasi (NKO) ini merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	4.292.002.000	1.012.795.959	23.58
2	Belanja Barang	1.304.303.000	241.602.503	21.44
3	Belanja Modal	0	0	0
	Total	5.596.305.000	1.291.729.278	23.08

Tabel 9. Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan I Tahun 2026

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	Pengendalian Mutu	161.360.000	1.202.000	0.74
2	Manajemen Mutu	86.000.000	-	0
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP	5.348.945.000	1.290.527.278	24.13
	Total	5.596.305.000	1.291.729.278	23.08

Tabel 10. Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan Triwulan I Tahun 2026

← → ↺ myintress.kemenkeu.go.id/data-view/pensewa/pembayaran/detailLaporanRealisasi

0% ☆ 📄 📄 📄 📄 📄 📄

Myintress

Cari Menu, contoh: Monitoring Tutup Periode

Tahun Anggaran: 2026 SITIHADIYAH SATKER-SATKER

Admin Anggaran Komitmen Bendahara Pembayaran Persediaan Aset Tetap Piutang Rekonsiliasi Akuntansi dan Pelaporan Tematik Referensi

Realisasi Belanja Satker Per Jenis Belanja

← Kembali

📄 Download

Filter PDF XLIX

Filter Aktif: PERIODE AKHIR: MARET PERIODE AWAL: JANUARI

Cari di halaman...

NO	KODE NAMA SATKER	KELOMPOK	JENIS BELANJA										TOTAL
			PGDI	BADANG	MODAL	DEBANGKA	SUBSIDI	HIBAH	BANBOS	LAIN-LAIN	TRANSFER		
1	507010 BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELUATAN DAN PERIKABAN BALIKPAPAN	PGDI	4.292.000.000	1.304.303.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.596.305.000
		REALISASI	1.012.949.300	279.579.978	0	0	0	0	0	0	0	0	1.291.729.278
		%	23.58%	21.44%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	23.08%
		SISA	3.279.050.700	1.024.723.022	0	0	0	0	0	0	0	0	4.304.575.722
GRAND TOTAL		PGDI	4.292.000.000	1.304.303.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.596.305.000
		REALISASI	1.012.949.300	279.579.978	0	0	0	0	0	0	0	0	1.291.729.278
		%	23.58%	21.44%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	23.08%
		SISA	3.279.050.700	1.024.723.022	0	0	0	0	0	0	0	0	4.304.575.722

Gambar 8. Tangkap Layar Realisasi Anggaran Balai PPMHKP Balikpapan Sampai Dengan Triwulan I 2026 Pada Website <https://myintress.kemenkeu.go.id/>

Berdasarkan capaian indikator kinerja kegiatan pada Triwulan I Tahun 2026, penyerapan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan telah tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Pengukuran capaian indikator kinerja kegiatan Triwulan I Triwulan I Tahun 2026 telah tercapai dengan adanya dukungan Anggaran DIPA Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan I

Tahun 2026.

2. Sebanyak 5 (lima) kegiatan yang merupakan target pada Triwulan I memiliki capaian melebihi target, dengan dukungan anggaran yang tersedia.
3. Capaian realisasi anggaran Triwulan I Tahun 2026 berdasarkan Aplikasi MyIntress adalah Rp. 1.291.729.278,- atau sebesar 23.08 % dari pagu anggaran Rp. 5.596.305.000,-.

BAB. IV. PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan I Tahun 2026 menyajikan capaian sasaran strategis yang tercermin dalam capaian indikator kinerja Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan I Tahun 2026. Capaian tersebut dilakukan perbandingan terhadap target tahun berjalan, tahun sebelumnya dan juga target Renstra 2025 - 2029 sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan berikutnya. Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan I Tahun 2026 dapat disimpulkan beberapa hal antara lain :

1. Nilai capaian indikator kinerja Balai PPMHKP Balikpapan periode Triwulan I Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 112,71 % dengan kategori **ISTIMEWA** yang dapat dilihat pada aplikasi kinerjaku di <https://kinerjaku.kkp.go.id/>
2. Pencapaian kinerja Balai PPMHKP Balikpapan periode Triwulan I Triwulan I Tahun 2026 sangat baik dengan diperolehnya Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 112,71 % pada aplikasi kinerjaku.
3. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Triwulan I Tahun 2026, sebanyak 5 indikator kinerja capaiannya telah melebihi target.
4. Realisasi penyerapan anggaran Balai PPMHKP Balikpapan pada Triwulan I Triwulan I Tahun 2026 mencapai Rp. 1.291.729.278,- atau sebesar 23.08 % dari pagu anggaran Rp. 5.596.305.000,-.

4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan analisis dan evaluasi kinerja Balai PPMHKP Balikpapan pada Triwulan I Tahun 2026 sebagai upaya untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan ditindaklanjuti, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan rencana aksi yang telah ditetapkan di awal Triwulan I Tahun 2026 untuk pencapaian kinerja sesuai target dan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang untuk pencapaiannya dipengaruhi oleh faktor eksternal. Pelaksanaan kegiatan dan anggaran diintegrasikan dengan pemenuhan target kinerja, sehingga dapat menggambarkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja;

2. Melakukan perbaikan / tindak lanjut terhadap aspek-aspek yang dinilai kurang pada pelaksanaan kegiatan;
3. Pencapaian kinerja Balai PPMHKP Balikpapan triwulan I Tahun Anggaran 2026 yang tertuang dalam Laporan Kinerja dipublikasikan melalui website PPID Balai PPMHKP Balikpapan

3.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI TRIWULAN SEBELUMNYA

1. Telah dilakukan perencanaan kegiatan untuk pencapaian kinerja di Triwulan I Tahun 2026 beserta waktu kegiatan dan penanggung jawab untuk setiap kegiatan
2. Pencapaian kinerja Balai PPMHKP Balikpapan triwulan IV Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Laporan Kinerja telah dipublikasikan melalui website PPID Balai PPMHKP Balikpapan sehingga dapat dengan mudah diakses.

LAMPIRAN

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI PPMHKP BALIKPAPAN

NAMA INDIKATOR : PERSENTASE HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKTOR PRODUKSI PRIMER YANG MEMENUHI STANDAR MUTU DAN KEAMANAN PANGAN LINGKUP BALAI PPMHKP BALIKPAPAN

NAMA TIMJA : PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PRODUKSI PRIMER

PERIODE LAPORAN : TRIWULAN I / 2026

Nama Sasaran Kegiatan :		Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan							
Nama Indikator Kinerja :		Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan							
T / R	Tahun 2026							Capaian Tahun 2026	Target Tahun 2026
	Q1	Q2	SM. 1	Q3	Q4	SM. 2	Tahunan		
Target (%)	72								72 %
Realisasi (%)	74.20								
% Capaian	103.06								

Catatan :

Q1, Q2, Q3, Q4 : Capaian selama triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4

SM. 1 : Capaian Q1 + Capaian Q2

SM. 2 : Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan : Capaian di akhir tahun 2024

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya ?)

Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produk Primer memiliki peran strategis dalam menjamin mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, mulai dari tahap produksi hingga distribusi. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pangan yang aman dan berkualitas, tuntutan terhadap standar mutu produk perikanan, khususnya untuk pasar ekspor, juga semakin tinggi. Hal ini menuntut kesiapan sistem pengendalian mutu yang adaptif, terintegrasi, dan mampu memenuhi persyaratan internasional yang terus berkembang.

Terdapat beberapa isu utama yaitu :

1. Penyesuaian Kelembagaan.
Implementasi perubahan kelembagaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 masih memerlukan penguatan pemahaman di kalangan pemangku kepentingan. Proses adaptasi terhadap struktur dan tata kelola baru berdampak pada perlunya peningkatan sosialisasi serta harmonisasi pelaksanaan tugas di lapangan.
2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana
Dukungan fasilitas operasional belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan kegiatan pengawasan dan pengendalian mutu, sehingga berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan tugas, khususnya dalam menjangkau lokasi usaha yang tersebar.

3. Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran

Kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada ruang gerak pelaksanaan kegiatan, sehingga diperlukan strategi prioritas program dan inovasi dalam pelaksanaan tugas agar tetap mencapai target kinerja secara optimal.

Implikasi :

Isu-isu tersebut berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan mutu hasil perikanan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi daya saing produk di pasar internasional. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi sumber daya yang tersedia guna memastikan jaminan mutu dan keamanan produk tetap terjaga.

Deskripsi keberhasilan apabila tercapai target, jika tidak tercapai apa yang menjadi akar masalah (Mengapa hal tersebut terjadi ?)

1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar **volume atau jumlah** produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal **yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan** yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten
2. Capaian indikator dihitung berdasarkan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di sektor produksi primer dan penilaian tingkat efektifitas terhadap unit usaha untuk memastikan produk hasil perikanan yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan terhadap dimensi pengendalian mutu dan dimensi pengawasan mutu
3. Pada Triwulan I Tahun 2026 hanya terdapat 1 (satu) kegiatan pengendalian yaitu sertifikasi CPIB di kapal
4. Capaian indikator dihitung setiap triwulan
5. Realisasi terhadap IKU Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan TW I Tahun 2026 sebesar 74.20 % berdasarkan Surat Kepala Pusat Mutu Pasca Panen Nomor B.450/BPPMHKP.4/RC.610/IV/2026 tanggal 16 April 2026 tentang Capaian Indikator Kinerja “Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan” Triwulan I Tahun 2026 dengan data sebagai berikut :
 - Tingkat efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (A) sebesar 70 %
 - Tingkat efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (B) sebesar 71 %
 - Tingkat efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB di Kapal (C) sebesar 90 %
 - Tingkat efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (D) sebesar 70 %
 - Tingkat efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (E) sebesar 70 %
 - Tingkat efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (F) sebesar 70 %

$$\begin{aligned}
 \% X &= \frac{A + B + C + D + E + F}{xn} \\
 &= \frac{70 + 71 + 90 + 70 + 70 + 70}{6} \\
 &= 74.20 \%
 \end{aligned}$$

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator disertakan foto / dokumentasi

1. Melaksanakan Sertifikasi CPIB di Kapal Segiri 01 Kota Balikpapan.



2. Penyusunan Program Inspeksi dan Surveilans CBIB, CPIB, CPIB di Kapal, CPPIB, CPOIB dan CDOIB lingkup Balai PMHKP Balikpapan Tahun 2026

3. Mengikuti pelatihan teknis untuk peningkatan kompetensi personil
Sebanyak 4 (empat) orang Inspektur Mutu, 1 (satu) orang calon Inspektur Mutu dan 1 (satu) orang PPPK Pengelola Layanan Operasional mengikuti Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI) pada tanggal 02 -04 Maret 2026 meningkatkan kapasitas petugas dalam mendukung pelaksanaan pengawasan serta sertifikasi mutu hasil perikanan, sekaligus menjadi dasar dalam pelaksanaan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait penerapan standar mutu dan keamanan pangan.

Adapun daftar nama nama yang mengikuti Pelatihan tersebut adalah :

- Ir. Kadson Batubara, M.Si
- Amrul Hasani, S.Pi., M.Tr.Pi
- Zainal, S.Pi
- Heri Supriadi
- Frederik Sanda
- Akil, A.Md

Rekomendasi rencana aksi untuk triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
1. Melaksanakan sosialisasi berkelanjutan terkait perubahan kelembagaan kepada pelaku usaha dan stakeholder terkait. 2. Meningkatkan koordinasi lintas unit kerja untuk memastikan keselarasan pelaksanaan tugas dan fungsi. 3. Melaksanakan atau mengikuti pelatihan teknis secara berkala guna meningkatkan kompetensi petugas pengawas dan inspektur mutu dalam memenuhi standar mutu internasional yang terus berkembang.	Timja Pengendalian dan Pengawasan Produksi Primer

Hasil TL rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Menindaklanjuti rekomendasi peningkatan kompetensi SDM, Inspektur Mutu BPPMHKP Balikpapan telah mengikuti kegiatan Training of Trainer (ToT) Pelatihan Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI) pada tanggal 02 – 04 Maret 2026, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petugas dalam mendukung pelaksanaan pengawasan serta sertifikasi mutu hasil perikanan, sekaligus menjadi dasar dalam pelaksanaan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait penerapan standar mutu dan keamanan pangan.	Timja Pengendalian dan Pengawasan Produksi Primer

Balikpapan, 16 April 2026
Kepala Balai KIPM Balikpapan



Eko Sulystianto



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id EMAIL bppmhkp@kkp.go.id

Nomor : B. 299/BPPMHKP.3/RC.610/IV/2026 15 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Capaian Indikator Kinerja "Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan" Triwulan I Tahun 2026

Yth. (Daftar Terlampir)
di Tempat

Sehubungan dengan Penilaian Capaian Indikator Kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Triwulan I tahun 2026, dengan ini kami sampaikan nilai capaian Tingkat Efektifitas Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pusat Mutu Produksi Primer Triwulan 1 Tahun 2026 untuk digunakan sebagai data pendukung IKU UPT yaitu Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan. (sebagaimana rincian terlampir).

Demikian kami menyampaikan, atas perkenan dan dukungan baik yang diberikan, kami mengucapkan terimakasih.

Kepala Pusat Mutu Produksi Primer



Ditandatangani
Secara Elektronik

Muhammad Hatta Arisandi

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
2. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Lampiran Surat
Nomor : B. 299/BPPMHKP.3/RC.610/IV/2026
Tanggal : 15 April 2026

A. Daftar Nama Penerima

1. Kepala Balai Besar PPMHKP Surabaya I;
2. Kepala Balai PPMHKP Medan I;
3. Plt. Kepala Balai PPMHKP Tanjung Pinang;
4. Kepala Balai PPMHKP Lampung;
5. Plt. Kepala Balai PPMHKP Jakarta;
6. Plt. Kepala Balai PPMHKP Semarang;
7. Plt. Kepala Balai PPMHKP Surabaya II;
8. Plt. Kepala Balai PPMHKP Entikong;
9. Kepala Balai PPMHKP Balikpapan;
10. Kepala Balai PPMHKP Banjarbaru;
11. Plt. Kepala Balai PPMHKP Tarakan;
12. Plt. Kepala Balai PPMHKP Denpasar;
13. Plt. Kepala Balai PPMHKP Mataram;
14. Plt. Kepala Balai PPMHKP Makassar;
15. Plt. Kepala Balai PPMHKP Manado;
16. Plt. Kepala Balai PPMHKP Ambon;
17. Plt. Kepala Balai PPMHKP Jayapura;
18. Kepala Stasiun PPMHKP Banda Aceh;
19. Plt. Kepala Stasiun PPMHKP Medan II;
20. Plt. Kepala Stasiun PPMHKP Tanjung Balia Asahan;
21. Plt. Kepala Stasiun PPMHKP Padang;
22. Kepala Stasiun PPMHKP Pekanbaru;
23. Kepala Stasiun PPMHKP Jambi;
24. Kepala Stasiun PPMHKP Palembang;
25. Plt. Kepala Stasiun PPMHKP Bengkulu;
26. Kepala Stasiun PPMHKP Pangkalpinang;
27. Kepala Stasiun PPMHKP Batam;
28. Kepala Stasiun PPMHKP Merak;
29. Plt. Kepala Stasiun PPMHKP Bandung;
30. Kepala Stasiun PPMHKP Cirebon;
31. Plt. Kepala Stasiun PPMHKP Yogyakarta;
32. Kepala Stasiun PPMHKP Pontianak;
33. Kepala Stasiun PPMHKP Palangkaraya;
34. Kepala Stasiun PPMHKP Kupang;
35. Kepala Stasiun PPMHKP Bima;
36. Kepala Stasiun PPMHKP Mamuju;
37. Kepala Stasiun PPMHKP Palu;
38. Kepala Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai;
39. Plt. Kepala Stasiun PPMHKP Kendari;

- 40. Kepala Stasiun PPMHKP Baubau;
- 41. Kepala Stasiun PPMHKP Gorontalo;
- 42. Plt. Kepala Stasiun PPMHKP Tahuna;
- 43. Kepala Stasiun PPMHKP Ternate;
- 44. Kepala Stasiun PPMHKP Sorong;
- 45. Kepala Stasiun PPMHKP Merauke

Kepala Pusat Mutu Produksi Primer



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Muhammad Hatta Arisandi

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Nomor : B. 299/BPPMHKP.3/RC.610/IV/2026
Tanggal : 15 April 2026

A. Data Rekapitulasi Tingkat Efektifitas Sertifikasi Primer UPT lingkup BPPMHKP
TW 1 2026

No	Satuan Kerja	Target (%)	TE CBIB	TE CPIB	TE CDOIB-CPOIB	TE CPPIB	TE CPIB Kapal	Realisasi IKU UPT	% Capaian IKU UPT
1	Balai Besar PPMHKP Surabaya I	72,00	89,44	71,00	70,00	90,00	89,33	81,95	113,83%
2	Balai PPMHKP Medan I	72,00	80,17	70,00	70,00	70,00	70,00	72,03	100,05%
3	Balai PPMHKP Tanjung Pinang	72,00	71,00	71,00	70,00	70,00	85,83	73,57	102,18%
4	Balai PPMHKP Lampung	72,00	88,33	71,00	70,00	90,00	70,00	77,87	108,15%
5	Balai PPMHKP Jakarta	72,00	90,00	70,00	70,00	70,00	90,00	78,00	108,33%
6	Balai PPMHKP Semarang	72,00	71,00	70,00	88,33	70,00	90,00	77,87	108,15%
7	Balai PPMHKP Surabaya II	72,00	71,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,20	97,50%
8	Balai PPMHKP Entikong	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
9	Balai PPMHHKP Balikpapan	72,00	70,00	71,00	70,00	70,00	90,00	74,20	103,06%
10	Balai PPMHKP Banjarbaru	72,00	89,17	90,00	70,00	70,00	89,67	81,77	113,57%
11	Balai PPMHKP Tarakan	72,00	90,00	70,00	70,00	70,00	70,00	74,00	102,78%
12	Balai PPMHKP Denpasar	72,00	71,00	71,00	70,00	70,00	90,00	74,40	103,33%
13	Balai PPMHKP Mataram	72,00	89,44	70,00	70,00	70,00	70,00	73,89	102,62%
14	Balai PPMHKP Manado	72,00	71,00	70,00	70,00	70,00	90,00	74,20	103,06%
15	Balai PPMHKP Makassar	72,00	81,00	70,00	70,00	70,00	90,00	76,20	105,83%
16	Balai PPMHKP Ambon	72,00	70,00	71,00	70,00	70,00	88,75	73,95	102,71%
17	Balai PPMHKP Jayapura	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
18	Stasiun PPMHKP Banda Aceh	72,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	97,22%
19	Stasiun PPMHKP Medan II	72,00	71,00	70,00	70,00	70,00	90,00	74,20	103,06%

20	Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	72,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	97,22%
21	Stasiun PPMHKP Padang	72,00	71,00	71,00	65,00	65,00	85,00	71,40	99,17%
22	Stasiun PPMHKP Pekanbaru	72,00	94,17	77,67	65,00	65,00	85,00	77,37	107,46%
23	Stasiun PPMHKP Jambi	72,00	90,00	90,00	70,00	70,00	70,00	78,00	108,33%
24	Stasiun PPMHKP Palembang	72,00	70,00	88,33	70,00	70,00	66,67	73,00	101,39%
25	Stasiun PPMHKP Bengkulu	72,00	90,00	70,00	65,00	65,00	83,33	74,67	103,70%
26	Stasiun PPMHKP Pangkalpinang	72,00	88,33	70,00	70,00	70,00	70,00	73,67	102,31%
27	Stasiun PPMHKP Batam	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
28	Stasiun PPMHKP Merak	72,00	88,33	90,00	88,33	70,00	70,00	81,33	112,96%
29	Stasiun PPMHKP Bandung	72,00	84,44	85,00	83,33	65,00	65,00	76,55	106,33%
30	Stasiun PPMHKP Cirebon	72,00	71,00	71,00	70,00	70,00	65,00	69,40	96,39%
31	Stasiun PPMHKP Yogyakarta	72,00	71,00	70,00	70,00	70,00	88,33	73,87	102,59%
32	Stasiun PPMHKP Pontianak	72,00	86,00	70,00	70,00	70,00	70,00	73,20	101,67%
33	Stasiun PPMHKP Palangkaraya	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
34	Stasiun PPMHKP Kupang	72,00	71,00	71,00	70,00	70,00	70,00	70,40	97,78%
35	Stasiun PPMHKP Bima	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
36	Stasiun PPMHKP Mamuju	72,00	66,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,20	90,56%
37	Stasiun PPMHKP Palu	72,00	85,00	85,00	65,00	65,00	65,00	73,00	101,39%
38	Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai	72,00	71,00	70,00	70,00	70,00	90,00	74,20	103,06%
39	Stasiun PPMHKP Kendari	72,00	70,00	70,00	70,00	70,00	90,00	74,00	102,78%
40	Stasiun PPMHKP Baubau	72,00	83,67	70,00	70,00	70,00	88,33	76,40	106,11%
41	Stasiun PPMHKP Gorontalo	72,00	84,17	66,00	65,00	65,00	65,00	69,03	95,88%
42	Stasiun PPMHKP Tahuna	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
43	Stasiun PPMHKP Ternate	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
44	Stasiun PPMHKP Sorong	72,00	65,00	65,00	70,00	70,00	70,00	68,00	94,44%

45	Stasiun PPMHKP Merauke	72,00	71,67	70,83	65,00	65,00	65,00	67,50	93,75%
	Jumlah		3430,33	3226,83	3130,00	3115,00	3415,25	3263,48	
	% Realisasi IKU Primer		76,23	71,71	69,56	69,22	75,89	72,52	
	% Capaian IKU Primer		107,37	102,44	92,74	92,30	105,41	100,72	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Realisasi Indikator Kinerja Pusat Mutu Produksi Primer :
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan sebesar 72,52%
2. Capaian Indikator Kinerja Pusat Mutu Produksi Primer :
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan dengan target 72% adalah 100,72%

Rumus (realisasi/target x 100%)= (72,52/72) x 100% = 100,72%

B. Link Drive

Sertifikasi CDOIB-CPOIB dan CPPIB

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W29wYoHcLUaYxrWWx772Ost5cjiaxRzR/e/dit?usp=sharing&ouid=102833906237343655433&rtpof=true&sd=true>

Sertifikasi CPIB Kapal

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TNIUPD_Zudp61bfvNAdG0-wXvNfSoX-0/edit?usp=sharing&ouid=102833906237343655433&rtpof=true&sd=true

Sertifikasi CBIB - CPIB

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fzFfp7Wf6md8xgbTQh9TGQllyqaUt-DAp1h1Nw6pwio/edit?gid=1937912344#gid=1937912344>

C. Manual IKU Pusat Mutu Produksi Primer 2026

<https://drive.google.com/file/d/1zHOyWrDwH1-E3VDI3il15DUm3Q8atCnV/view?usp=sharing>

**SERTIFIKASI HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKTOR PRODUKSI PRIMER
YANG MEMENUHI STANDAR MUTU DAN KEAMANAN PANGAN**

Nama UPT : Balai PPMHKP Balikpapan
Periode / Tahun : Triwulan I Tahun 2026

No.	Jenis Sertifikasi	Nama Kapal	Nama Pemilik Kapal	Alamat	Tipe Kapal	Ukuran Kapal	Jenis Produk	Nomor Sertifikat	Tanggal Inspeksi	Masa Berlaku Sertifikat	Keterangan
1	CPIB di Kapal	SEGIRI 01	Maulid Saktiawan	Jl. Mulawarman RT. 33 Kota Balikpapan - Kalimantan Timur	Kapal Penangkap	< 5 GT	Ikan Demersal Segar	ID-CPIB-K-64-260004	15 Januari 2026	20 Januari 2026 - 20 Januari 2030	Baru



Balikpapan, 06 April 2026

Kepada,

Eko Sulystianto

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI PPMHKP BALIKPAPAN

NAMA INDIKATOR : PERSENTASE HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKTOR PRODUKSI PASCA PANEN YANG MEMENUHI STANDAR MUTU DAN KEAMANAN PANGAN LINGKUP BALAI PPMHKP BALIKPAPAN

NAMA TIMJA : PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PASCA PANEN

PERIODE LAPORAN : TRIWULAN I / 2026

Nama Sasaran Kegiatan :		Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan							
Nama Indikator Kinerja :		Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan							
T / R	Tahun 2025							Capaian	Target
	Q1	Q2	SM. 1	Q3	Q4	SM. 2	Tahunan	Tahun 2025	Tahun 2025
Target (%)	72								72
Realisasi (%)	83.34								
% Capaian	115.75								

Catatan :

Q1, Q2, Q3, Q4 : Capaian selama triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4

SM. 1 : Capaian Q1 + Capaian Q2

SM. 2 : Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan : Capaian di akhir tahun 2024

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya ?)

- Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen adalah pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu terhadap unit usaha yang telah menerapkan program persyaratan dasar, manajemen keamanan pangan berbasis HACCP dan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.
- Pengendalian mutu adalah semua kegiatan yang meliputi inspeksi, surveilen dan pengambilan contoh dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
- Pengawasan mutu adalah kegiatan untuk melihat konsistensi terhadap penerapan standar dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan melalui kegiatan surveilen.
- Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu adalah ukuran pelaksanaan sistem pengendalian dan pengawasan mutu yang dilakukan oleh pemerintah terhadap unit usaha untuk memastikan produk hasil perikanan yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, ditetapkan melalui penilaian terhadap dimensi pengendalian mutu dan dimensi pengawasan mutu

Terdapat isu utama yaitu :

1. Sertifikasi HACCP pada pelaku saha merupakan bentuk kepatuhan terhadap persyaratan oleh UPI yang bersifat wajib (*mandatory*) dan mutlak apabila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanan
2. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, penyelenggaraan dan pengawasan sertifikasi produk hasil kelautan dan perikanan dari hulu ke hilir wajib memperhatikan persyaratan dan KBLI yang sesuai dengan PP terbaru

Deskripsi keberhasilan apabila tercapai target, jika tidak tercapai apa yang menjadi akar masalah (Mengapa hal tersebut terjadi ?)

1. Capaian indikator diperoleh dengan menghitung persentase tingkat efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP, HACCP dan SPDI. dibagi dengan jumlah dari unsur pembentuk
2. Capaian indikator dihitung setiap triwulan
3. Realisasi terhadap IKU Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan TW I Tahun 2026 sebesar 83.34 % berdasarkan Surat Kepala Pusat Mutu Pasca Panen Nomor B.450/BPPMHKP.4/RC.610/IV/2026 tanggal 16 April 2026 tentang Nilai Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen dengan data sebagai berikut :
 - Efektifitas pengendalian dan pengawasan HACCP di UPI (A) sebesar 91.67 %
 - Efektifitas pengendalian dan pengawasan SKP di UPI dan UMKM (B) sebesar 83.34 %
 - Efektifitas pengendalian dan pengawasan SPDI di pelaku usaha perikanan (C) sebesar 75 %
 - Berdasarkan data efektifitas pengendalian dan pengawasan HACCP, SKP dan SPDI tersebut maka capaian untuk IKU Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 83.34 %

$$\begin{aligned}\% X &= \frac{A + B + C}{xn} \\ &= \frac{91.67 + 83.34 + 75}{2} \\ &= 83.34 \%\end{aligned}$$

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator disertakan foto / dokumentasi

1. Melakukan pengendalian penerapan jaminan mutu di Unit Pengolahan Ikan (UPI) melalui kegiatan inspeksi dan surveilen penerapan HACCP.

a. Kegiatan inspeksi dilakukan pada Bulan Februari 2026 pada 2 UPI pada 5 ruang lingkup produk yaitu :

- Tanggal 12 Februari 2026 pada UPI PT. Samudra Manggala Abadi, dengan 2 ruang lingkup produk yaitu :
 - 1) Frozen Shrimp
 - 2) Frozen Demersal Fish



- Tanggal 19 Februari 2026 pada CV. Tiga A (Unit Manggar) dengan 4 ruang lingkup produk yaitu :
 - 1) Fresh Demersal Fish
 - 2) Fresh Pelagic Fish
 - 3) Fresh Shrimp
 - 4) Fresh Swimming Crab



b. Pelaksanaan surveilen pada Bulan Januari 2026 telah dilakukan pada 7 Unit Pengolahan Ikan (UPI). Terdapat 1 UPI yang tidak dilakukan surveilen penerapan HACCP disebabkan tidak ada proses produksi yaitu PT. Borneo Ocean Naully dengan ruang lingkup Dried Seaweed. Adapun surveilen UPI telah dilakukan pada UPI sebagai berikut :

- 1) PT. Sumber Kalimantan Abadi
- 2) PT. Syam Surya Mandiri
- 3) PT. Ocean Paradise Fishery
- 4) PT. Nusaybah Alby Saing
- 5) CV. Multi Sarana Jaya
- 6) CV. Tiga A (Unit Manggar)
- 7) CV. Tiga A (Unit Kampung Baru)

- Inspeksi secara langsung pada UPI CV. Multi Sarana Jaya pada tanggal 10 Maret 2026 dengan 1 ruang lingkup produk yaitu Dried Seaweed



- Penerbitan SKP melalui pemenuhan dokumen pendukung melalui website SKP Online pada 2 UPI sebagai berikut :
 - a. PT. Atlas Agung Abadi (Unit Manggar) pada tanggal 26 Januari 2026 dengan 4 ruang lingkup produk yaitu Fresh Demersal Fish, Fresh Pelagic Fish, Fresh Shrimp dan Fresh Swimming Crab
 - b. PT. Atlas Agung Abadi (Unit Kampung Baru) pada tanggal 26 Januari 2026 dengan 4 ruang lingkup produk yaitu Fresh Demersal Fish, Fresh Pelagic Fish dan Fresh Shrimp

[illegible]

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Rekomendasi rencana aksi untuk triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
1. Melakukan koordinasi dengan pelaku usaha dan instansi teknis yang melakukan pembinaan jaminan mutu di UMKM dan UPI sebagai kegiatan pendukung sertifikasi HACCP, SKP dan SPDI 2. Peningkatan kompetensi inspektur mutu melalui pelatihan / diklat penjaminan mutu	Timja Pengendalian dan Pengawasan Pasca Panen

Hasil TL rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Telah dilakukan perencanaan kegiatan Tahun 2026 untuk pelaksanaan pemenuhan persyaratan sistem jaminan mutu ke pelaku usaha hasil perikanan	Timja Pengendalian dan Pengawasan Pasca Panen



Balikpapan, 16 April 2026
Kepala Balai KIPM Balikpapan

Eko Sulystianto



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR
16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP
10041

TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppmhkp@kkp.go.id

Nomor : B. 450/BPPMHKP.4/RC.610/IV/2026 16 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Nilai Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil
Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pascapanen

Yth. (Daftar Terlampir)

Dalam rangka pengukuran dan pelaporan kinerja di lingkungan BPPMHKP periode Triwulan 1 Tahun 2026, bersama ini terlampir disampaikan nilai pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen untuk digunakan sebagai data pengukuran IKU UPT, yaitu Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Mutu Pascapanen



Ditandatangani
Secara Elektronik

Widya Rusyanto

Tembusan:
Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Lampiran

Nomor : B. 450/BPPMHKP.4/RC.610/IV/2026

Tanggal : 16 April 2026

DAFTAR NAMA PEJABAT BPPMHKP

1. Kepala Balai Besar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Surabaya
2. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Medan I
3. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tanjung Pinang
4. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Lampung
5. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jakarta
6. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Semarang
7. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Surabaya II
8. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong
9. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Balikpapan
10. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Banjarbaru
11. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tarakan
12. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Denpasar
13. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mataram
14. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar
15. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado
16. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon
17. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jayapura
18. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Banda Aceh
19. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Medan II
20. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan

- Perikanan Tanjung Balai Asahan
21. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Padang
 22. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pekanbaru
 23. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jambi
 24. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palembang
 25. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu
 26. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pangkalpinang
 27. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Batam
 28. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merak
 29. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bandung
 30. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Cirebon
 31. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Yogyakarta
 32. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pontianak
 33. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palangkaraya
 34. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kupang
 35. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bima
 36. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mamuju
 37. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palu
 38. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Luwuk Banggai
 39. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kendari
 40. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Baubau
 41. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Gorontalo
 42. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahuna
 43. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ternate

44. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sorong
45. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke

Kepala Pusat Mutu Pascapanen



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Widya Rusyanto

**NILAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKTOR PASCAPANEN
TRIWULAN I TAHUN 2026**

No	UPT	Target	TE HACCP	TE SKP	TE SPDI	Nilai Capaian IKU UPT
1	Balai Besar PPMHKP Surabaya I	72%	93,20%	86,95%	75,00%	85,05%
2	Balai PPMHKP Ambon	72%	98,34%	90,00%	62,50%	83,61%
3	Balai PPMHKP Balikpapan	72%	91,67%	83,34%	75,00%	83,34%
4	Balai PPMHKP Banjarbaru	72%	97,00%	98,67%	75,00%	90,22%
5	Balai PPMHKP Denpasar	72%	98,89%	96,67%	75,00%	90,19%
6	Balai PPMHKP Entikong	72%	77,78%	77,78%	75,00%	76,85%
7	Balai PPMHKP Jakarta	72%	90,23%	89,38%	91,06%	90,22%
8	Balai PPMHKP Jayapura	72%	70,00%	90,83%	62,50%	74,44%
9	Balai PPMHKP Lampung	72%	98,34%	90,00%	75,00%	87,78%
10	Balai PPMHKP Makassar	72%	93,75%	90,56%	80,00%	88,10%
11	Balai PPMHKP Manado	72%	88,55%	84,92%	75,00%	82,82%
12	Balai PPMHKP Mataram	72%	93,62%	90,65%	75,00%	86,42%
13	Balai PPMHKP Medan I	72%	93,70%	91,06%	75,00%	86,59%
14	Balai PPMHKP Semarang	72%	93,89%	91,53%	75,00%	86,81%
15	Balai PPMHKP Surabaya II	72%	95,42%	89,76%	62,50%	82,56%
16	Balai PPMHKP Tanjungpinang	72%	91,39%	90,27%	75,00%	85,55%
17	Balai PPMHKP Tarakan	72%	93,74%	89,29%	75,00%	86,01%
18	Stasiun PPMHKP Aceh	72%	77,78%	77,78%	75,00%	76,85%
19	Stasiun PPMHKP Bandung	72%	87,24%	78,90%	75,00%	80,38%
20	Stasiun PPMHKP Batam	72%	85,74%	84,62%	62,50%	77,62%
21	Stasiun PPMHKP Bau-Bau	72%	77,78%	77,78%	62,50%	72,69%
22	Stasiun PPMHKP Bengkulu	72%	90,89%	70,33%	87,50%	82,91%
23	Stasiun PPMHKP Bima	72%	77,78%	77,78%	62,50%	72,69%
24	Stasiun PPMHKP Cirebon	72%	98,34%	90,00%	87,50%	91,95%
25	Stasiun PPMHKP Gorontalo	72%	73,89%	76,11%	87,50%	79,17%
26	Stasiun PPMHKP Jambi	72%	68,33%	86,35%	75,00%	76,56%
27	Stasiun PPMHKP Kendari	72%	99,17%	100,00%	62,50%	87,22%
28	Stasiun PPMHKP Kupang	72%	90,88%	89,77%	75,00%	85,22%
29	Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai	72%	77,78%	93,89%	75,00%	82,22%
30	Stasiun PPMHKP Mamuju	72%	66,68%	66,68%	75,00%	69,45%
31	Stasiun PPMHKP Medan II	72%	91,93%	90,14%	75,00%	85,69%
32	Stasiun PPMHKP Merak	72%	73,82%	73,82%	62,50%	70,05%
33	Stasiun PPMHKP Merauke	72%	77,78%	77,78%	75,00%	76,85%
34	Stasiun PPMHKP Padang	72%	54,43%	76,65%	75,00%	68,69%
35	Stasiun PPMHKP Palangkaraya	72%	54,43%	73,87%	75,00%	67,77%

No	UPT	Target	TE HACCP	TE SKP	TE SPDI	Nilai Capaian IKU UPT
36	Stasiun PPMHKP Palembang	72%	77,78%	97,22%	78,97%	84,66%
37	Stasiun PPMHKP Palu	72%	65,56%	81,53%	62,50%	69,86%
38	Stasiun PPMHKP Pangkalpinang	72%	97,78%	97,22%	62,50%	85,83%
39	Stasiun PPMHKP Pekanbaru	72%	92,22%	92,78%	62,50%	82,50%
40	Stasiun PPMHKP Pontianak	72%	67,78%	80,00%	62,50%	70,09%
41	Stasiun PPMHKP Sorong	72%	77,78%	90,00%	62,50%	76,76%
42	Stasiun PPMHKP Tahuna	72%	54,43%	54,43%	62,50%	57,12%
43	Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	72%	100,00%	94,72%	62,50%	85,74%
44	Stasiun PPMHKP Ternate	72%	74,45%	93,89%	75,00%	81,11%
45	Stasiun PPMHKP Yogyakarta	72%	100,00%	77,78%	75,00%	84,26%

Kepala Pusat Mutu Pascapanen



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Widya Rusyanto

**HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKTOR PRODUKSI PASCA PANEN
YANG MEMENUHI STANDAR MUTU DAN KEAMANAN PANGAN LINGKUP BKIPM BALIKPAPAN**

Nama UPT : Balai KIPM Balikpapan
Periode / Tahun : Triwulan I / 2026

No.	Jenis Sertifikasi	Nama UPI	Alamat	Peringkat / Grade	Jenis Produk / Ruang Lingkup	Nomor Sertifikat	Tanggal Inspeksi	Masa Berlaku Sertifikat	Keterangan
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	HACCP	PT. Samudra Manggala Abadi	Jl. Persatuan No. 44, Desa / Kelurahan Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, East Kalimantan - Indonesia	C C	Frozen Demersal Fish Frozen Shrimp	063/PM/HACCP/PB/02/26 063/PM/HACCP/PB/02/26	12 Februari 2026	17 Februari 2026 - 17 Februari 2028	Baru
2	HACCP	CV. Tiga A	Jl. Rekreasi No. 11, Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan East Kalimantan - Indonesia	B B B B	Fresh Demersal Fish Fresh Pelagic Fish Fresh Shrimp Fresh Swimming Crab	008/PM/HACCP/PS/03/26 009/PM/HACCP/PS/03/26 010/PM/HACCP/PS/03/26 011/PM/HACCP/PS/03/26	19 Februari 2026	04 Maret 2026 - 04 Maret 2028	Perpanjangan



Balikpapan, 06 April 2026
Kepala Balai KIPM Balikpapan,

Eko Sulystianto

**HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKTOR PRODUKSI PASCA PANEN
YANG MEMENUHI STANDAR MUTU DAN KEAMANAN PANGAN LINGKUP BKIPM BALIKPAPAN**

Nama UPT : Balai KIPM Balikpapan
Periode / Tahun : Triwulan I / 2026

No.	Jenis Sertifikasi	Nama UPI	Alamat	Peringkat / Grade	Jenis Produk / Ruang Lingkup	Nomor Sertifikat	Tanggal Terbit Sertifikat	Masa Berlaku Sertifikat	Keterangan
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	SKP	PT. Atlas Agung Abadi	Jl. 21 Januari, Kel. Kampung Baru, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	A	Fresh Shrimp	41259/64/SKP/SG/II/2026	26 Januari 2026	26 Januari 2026 - 26 Januari 2028	
2	SKP	PT. Atlas Agung Abadi	Jl. 21 Januari, Kel. Kampung Baru, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	A	Fresh Pelagic Fish	41260/64/SKP/SG/II/2026	26 Januari 2026	26 Januari 2026 - 26 Januari 2028	
3	SKP	PT. Atlas Agung Abadi	Jl. Rekreasi No. 11, Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan Kalimantan Timur	A	Fresh Swimming Crab	41261/64/SKP/SG/II/2026	26 Januari 2026	26 Januari 2026 - 26 Januari 2028	
4	SKP	PT. Atlas Agung Abadi	Jl. Rekreasi No. 11, Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan Kalimantan Timur	A	Fresh Shrimp	41262/64/SKP/SG/II/2026	26 Januari 2026	26 Januari 2026 - 26 Januari 2028	
5	SKP	PT. Atlas Agung Abadi	Jl. 21 Januari, Kel. Kampung Baru, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	A	Fresh Demersal Fish	41263/64/SKP/SG/II/2026	26 Januari 2026	26 Januari 2026 - 26 Januari 2028	
6	SKP	PT. Atlas Agung Abadi	Jl. Rekreasi No. 11, Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan Kalimantan Timur	A	Fresh Pelagic Fish	41264/64/SKP/SG/II/2026	26 Januari 2026	26 Januari 2026 - 26 Januari 2028	
7	SKP	PT. Atlas Agung Abadi	Jl. Rekreasi No. 11, Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan Kalimantan Timur	A	Fresh Demersal Fish	41265/64/SKP/SG/II/2026	26 Januari 2026	26 Januari 2026 - 26 Januari 2028	



Balikpapan, 06 April 2025
Kepala Balai KIPM Balikpapan,

Eko Sulystianto

**HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKTOR PRODUKSI PASCA PANEN
YANG MEMENUHI STANDAR MUTU DAN KEAMANAN PANGAN LINGKUP BKIPM BALIKPAPAN**

Nama UPT : Balai KIPM Balikpapan
Periode / Tahun : Triwulan I / 2026

No.	Jenis Kegiatan	Nama UPI	Alamat	Peringkat / Grade	Jenis Produk / Ruang Lingkup	Tanggal Surveilen dan Pengambilan Contoh	Tanggal Terbit SKHS	Nomor SKHS	Keterangan
1	2	3	4	5	6	9		8	11
1	Surveilen HACCP	PT. Sumber Kalimantan Abadi	Jl. Mulawarman No. 99, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, East Kalimantan - Indonesia	A A	Frozen Cooked Shrimp Frozen Raw Shrimp	14 Januari 2026	28 Januari 2026	1/06.0/SKV/01/26	
2	Surveilen HACCP	PT. Syam Surya Mandiri	Jl. Propinsi No. 01, Kampung Kajang, Kel. Sungai Meriam, Kec. Anggana, Kab. Kutai Kartanegara, East Kalimantan - Indonesia	A A	Frozen Cooked Shrimp Frozen Raw Shrimp	14 Januari 2026	30 Januari 2026	2/06.0/SKV/01/26	
3	Surveilen HACCP	CV. Tiga A	Jl. Rekreasi No. 11, Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan East Kalimantan - Indonesia	B B B B B B	Fresh Demersal Fish Fresh Pelagic Fish Fresh Shrimp Live Crab Live Shell Live Snail	20 Januari 2026	23 Februari 2026	3/06.0/SKV/01/26	
4	Surveilen HACCP	PT. Ocean Paradise Fishery	Jl. Poros Limunjan Gg. Sulawesi RT. 019 Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung, Berau East Kalimantan - Indonesia	B B	Frozen Demersal Fish Frozen Shrimp	27 Januari 2026	02 Maret 2026	5/06.0/SKV/01/26	
5	Surveilen HACCP	PT. Nusaybah Alby Saing	Jl. 21 Januari RT. 47 Kelurahan Baru Tengah Balikpapan, East Kalimantan - Indonesia	B	Fresh Demersal Fish	27 Januari 2026	02 Maret 2026	6/06.0/SKV/01/26	
6	Surveilen HACCP	CV. Multi Sarana Jaya	Jl. Emboen Suryana, Kel. Sambutan, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, East Kalimantan - Indonesia	B	Dried Seaweed	28 Januari 2026	02 Maret 2026	7/06.0/SKV/01/26	

No.	Jenis Kegiatan	Nama UPI	Alamat	Peringkat / Grade	Jenis Produk / Ruang Lingkup	Tanggal Surveilans dan Pengambilan Contoh	Tanggal Terbit SKHS	Nomor SKHS	Keterangan
1	2	3	4	5	6	9		8	11
	Surveilans HACCP	CV. Tiga A	Jl. 21 Januari Kampung Baru, Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan East Kalimantan - Indonesia	B B B	Fresh Demersal Fish Fresh Pelagic Fish Fresh Shrimp	29 Januari 2026	27 Februari 2026	4/06.0/SKV/01/26	



Balikpapan, 06 April 2026
Kepala Balai KIPM Balikpapan,

[Handwritten signature]
Eko Sulystianto

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI PPMHKP BALIKPAPAN

NAMA INDIKATOR : PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN
UNTUK PERBAIKAN KINERJA LINGKUP BALAI PPMHKP BALIKPAPAN

NAMA TIMJA : DUKUNGAN MANAJERIAL

PERIODE LAPORAN : TRIWULAN I / 2026

Nama Sasaran Kegiatan		Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan							
Nama Indikator Kinerja		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai PPMHKP Balikpapan							
T / R	Tahun 2026							Capaian	Target
	Q1	Q2	SM. 1	Q3	Q4	SM. 2	Tahunan	Tahun 2026	Tahun 2026
Target (%)	86								86%
Realisasi (%)	100								
% Capaian	116,28								

Catatan :

Q1, Q2, Q3, Q4 : Capaian selama triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4

SM. 1 : Capaian Q1 + Capaian Q2

SM. 2 : Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan : Capaian di akhir tahun 2024

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya ?)

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendukung kegiatan pengawasan dalam mengelola data pemantauan tindak lanjut secara real time antara Inspektorat Jenderal dengan satker yang diperiksa melalui Sistem Informasi Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (SIDAK) adalah aplikasi berbasis Web.

Modul Aplikasi SIDAK (SISTEM INFORMASI DATA TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAAN APIP KKP) dirancang dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam menjalankan aplikasi, serta membantu Inspektorat Jenderal dalam menjalankan tugasnya dengan lebih efektif.

Aplikasi SIDAK dapat diakses melalui url <https://sidak.kkp.go.id> Untuk akses yang optimal gunakan browser google chrome Saat mengakses url tersebut, Anda akan melihat langsung halaman login aplikasi

Terdapat beberapa isu utama yaitu :

1. Dokumen yang telah dirilis atau diupload pada aplikasi SIDAK bersifat RAHASIA, dimohon untuk tidak mempublikasikan dokumen ini secara publik.
2. Profiling User Management (Profil Pengguna Aplikasi SIDAK) sangat diperlukan untuk mengetahui akses pengguna aplikasi SIDAK. Dengan adanya profil pengguna akan sangat membantu admin dalam melihat pengguna sesuai dengan akses yang telah ditetapkan. Hal ini untuk menjaga agar akses LHP tetap terjaga

keamanan dan kerahasiaannya. Dengan mengetahui data Pengguna, Admin dapat memetakan hak akses untuk setiap tingkatan unit kerja.

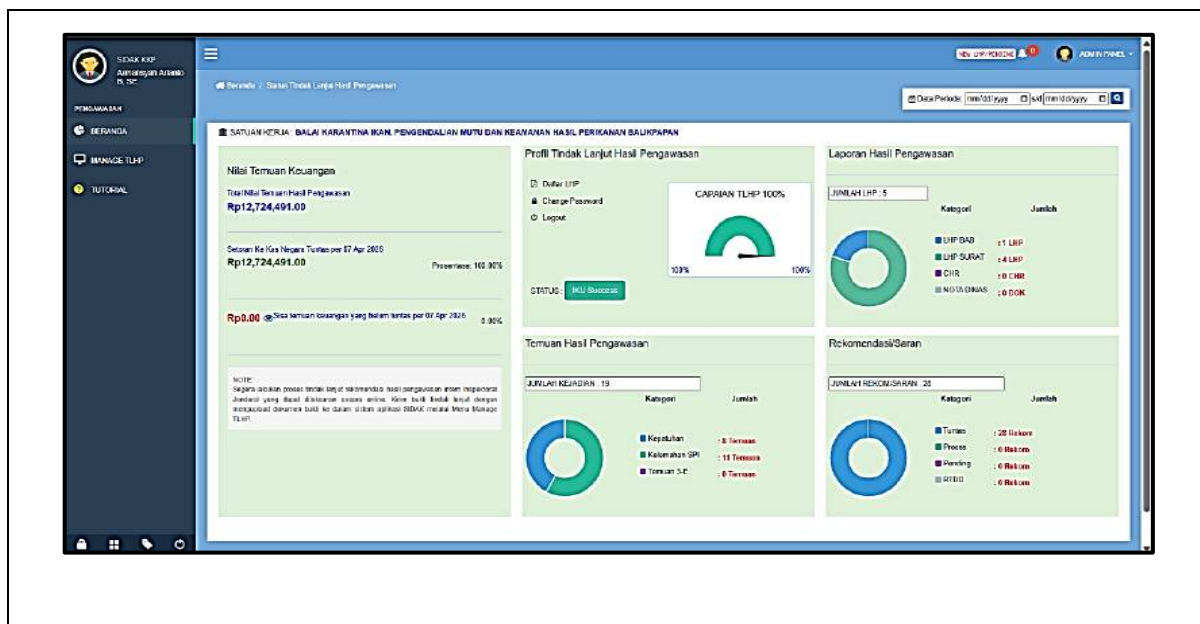
Deskripsi keberhasilan apabila tercapai target, jika tidak tercapai apa yang menjadi akar masalah (Mengapa hal tersebut terjadi ?)

1. Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan berfungsi untuk melihat data hasil laporan pengawasan yang telah diklasifikasikan pada beberapa bentuk dokumen LHP yang resmi diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal yaitu LHP bentuk BAB, Surat, Catatan Hasil Reviu ataupun Nota Dinas yang disampaikan kepada auditi dalam setiap kegiatan pengawasan.
2. Prosentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan berfungsi untuk menyajikan data prosentase tindak lanjut hasil pengawasan. Prosentase disajikan dalam diagram jarum jam yang merupakan capaian indikator kinerja TLHP. Jika capaian melebihi target 80% akan memunculkan status SUKSES berwarna hijau sebaliknya jika kurang dari 80% akan memunculkan status FAILED berwarna merah.
3. Temuan Hasil Pengawasan berfungsi untuk melihat jumlah temuan/kejadian hasil pengawasan. Temuan hasil pengawasan diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok temuan yaitu Kepatuhan, Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, dan Efektifitas, Efisiensi dan Ekonomis
4. Jumlah Rekomendasi Pengawasan berfungsi untuk melihat jumlah rekomendasi/saran yang tertuang dalam laporan hasil pengawasan. Temuan hasil pengawasan diklasifikasikan ke dalam 4 kategori rekomendasi sesuai dengan status rekomendasi Tuntas, Proses, Pending, Temuan hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti (TPTD).
5. Nilai Temuan Keuangan berfungsi untuk melihat nilai temuan keuangan yang bersifat potensi kerugian keuangan negara yang berasal dari hasil kegiatan pengawasan. Pada fitur ini juga menampilkan nilai keuangan yang telah didindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara sehingga menggambarkan prosentase tindak lanjut temuan keuangan.
6. Capaian indikator dihitung setiap terdapat kegiatan pengawasan pada satker

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator disertakan foto / dokumentasi

Profil TLHP yang menampilkan profil temuan dengan status TUNTAS warna HIJAU, PROSES warna ORANGE, PENDING warna MERAH.

ID	Unit Kerja	Jenis Pengawasan	Nomor LHP	Tanggal Register	Objek Pengawasan	STATUS	Aksi
2588	BALAI KARANTINA, PENGENDALIAN MUTU DAN KEZABAHAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN	Evaluasi	T.878072.4RIP-KB/VII/2023	2023-08-07	Hasil Evaluasi PIRIP Tahun 2022/2023 pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Balikpapan	TUNTAS	QL Detail
2587	BALAI KARANTINA, PENGENDALIAN MUTU DAN KEZABAHAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN	Evaluasi	T.880572.4RIP-KB/VII/2023	2023-08-16	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Publik pada Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Balikpapan	TUNTAS	QL Detail
1672	BALAI KARANTINA, PENGENDALIAN MUTU DAN KEZABAHAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN	Evaluasi	62.7847.4RIP-AB/VI/2022	2022-06-05	Hasil Evaluasi dan Implementasi TLHP pada Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Balikpapan Tahun 2022	TUNTAS	QL Detail
1276	BALAI KARANTINA, PENGENDALIAN MUTU DAN KEZABAHAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN	Audit	467318.4RIP-11/III/2021	2021-03-31	LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA PISER GRUPM BALIKPAPAN TA.2020-2021	TUNTAS	QL Detail
891	BALAI KARANTINA, PENGENDALIAN MUTU DAN KEZABAHAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN	Evaluasi	1.38.14172.4RIP-41/III/2020	2020-09-14	Evaluasi Pemantauan Rongas Dalam Pabrik (PIRIP) di Balai KIPM Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur	TUNTAS	QL Detail



Rekomendasi rencana aksi untuk triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Memantau dan Menindak Lanjuti jika terdapat Laporan Hasil Pemeriksaan pada aplikasi SIDAK	Timja Dukungan Manajerial

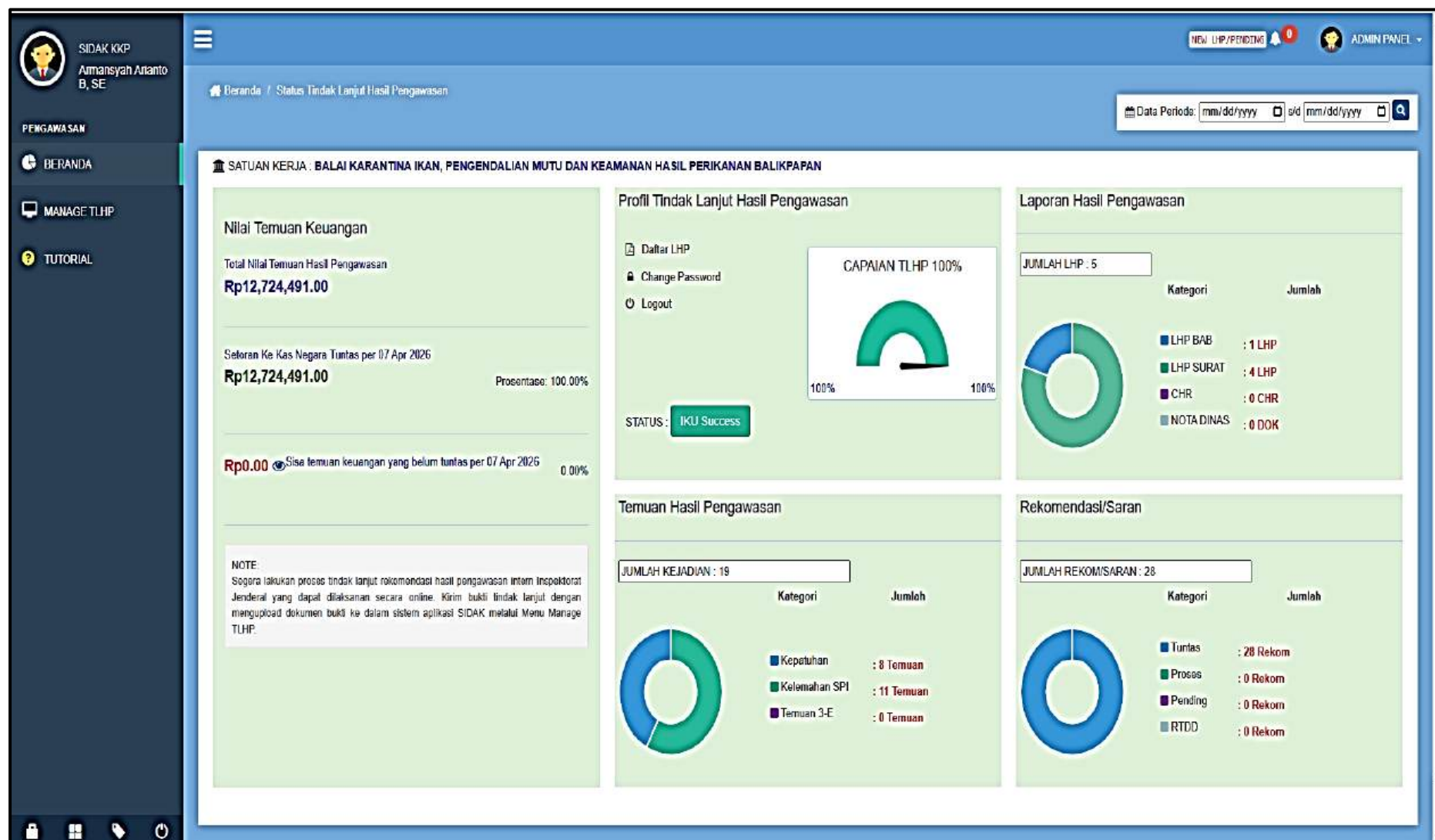
Hasil TL rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Tidak ada temuan BPK pada tahun anggaran 2024	Timja Dukungan Manajerial



Balikpapan, 06 April 2026
 Kepala Balai KIPM Balikpapan

Eko Sulystianto

TANGKAP LAYAR APLIKASI SIDAK SATKER BALAI KIPM BALIKPAPAN TRIWULAN I TA. 2026



SIDAK KKP
Amansyah Ananto
B, SE

NEW LHP/PENDING

ADMIN PANEL

HOME / BADAN PPM-KP / BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN

Data Periode: 01-Jan-2019 s/d 07-Apr-2026

Jumlah Laporan : 5 Dokumen

Jumlah Temuan : 19 Temuan

Jumlah Rekomendasi : 26

Nilai Keuangan : Rp12,724,491

Tuntas : 26 Rekomendasi

Proses : 0 Rekomendasi

Pending : 0 Rekomendasi

Sisa Nilai Keuangan : Rp0

Search:

ID	Unit Kerja	Jenis Pengawasan	Nomor LHP	Tanggal Register	Objek Pengawasan	STATUS	Aksi
2588	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN	Evaluasi	T.176/ITJ.4/HP.470/VIII/2023	2023-08-07	Hasil Evaluasi PNBP Tahun 2022-2023 pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM) Balikpapan	TUNTAS	Q Detail
2587	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN	Evaluasi	T.183/ITJ.4/HP.430/VIII/2023	2023-08-16	Hasil Evaluasi Pelayanan Publik pada Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur	TUNTAS	Q Detail
1872	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN	Evaluasi	R.76/ITJHP.440/IV/2022	2022-04-05	Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM) Balikpapan Tahun 2022	TUNTAS	Q Detail
1276	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN	Audit	4675/ITJHP.11/III/2021	2021-03-31	LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA PADA BKIPM BALIKPAPAN TA.2020-2021	TUNTAS	Q Detail
901	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN	Evaluasi	1.09.14/ITJ.4/HP.410/IX/2020	2020-09-14	Evaluasi Penerimaan Negara Dukan Pajak (PNDP) di Balai KIPM Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur	TUNTAS	Q Detail

Showing 1 to 5 of 5 entries

Previous 1 Next

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI PPMHKP BALIKPAPAN

NAMA INDIKATOR : PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN PBJ YANG DIUMUMKAN PADA SIRUP
LINGKUP BALAI PPMHKP BALIKPAPAN

NAMA TIMJA : DUKUNGAN MANAJERIAL

PERIODE LAPORAN : TRIWULAN I TAHUN 2026

Nama Sasaran Kegiatan		: Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan							
Nama Indikator Kinerja		: Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan							
T / R	Tahun 2026							Capaian Tahun 2026	Target Tahun 2026
	Q1	Q2	SM. 1	Q3	Q4	SM. 2	Tahunan		
Target	77								77 %
Realisasi	100								
% Capaian	120								

Catatan :

Q1, Q2, Q3, Q4 : Capaian selama triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4

SM. 1 : Capaian Q1 + Capaian Q2

SM. 2 : Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan : Capaian di akhir tahun 2026

Isu Utama dan Implikasinya
Indikator kinerja ini merupakan suatu ukuran yang menggambarkan capaian IKU untuk persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Identifikasi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja sebagai data dukung pembentuk nilai pagu pengadaan yang selanjutnya dilakukan proses revisi RUP pada aplikasi SIRUP berdasarkan dokumen kertas kerja bertujuan untuk mencegah terjadinya persentase pengumuman RUP pada aplikasi SIRUP melebihi atau kurang dari 100%. Data yang terbentuk pada dokumen kertas kerja untuk nilai Pagu Terumumkan merupakan nilai yang sama dengan nilai yang tercantum dalam rekap RUP Terumumkan pada aplikasi SIRUP. Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%. Maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini. Dari hasil perhitungan dan olah data, berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa nomor 283/SJ.7/PL.410/IV/2026 Tanggal 07 April 2026 capaian persentase RUP Terumumkan Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan I tahun 2026 sebesar 100,00%

Deskripsi keberhasilan apabila tercapai target, jika tidak tercapai apa yang menjadi akar masalah (Mengapa hal tersebut terjadi ?)

Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan I tahun 2026 yaitu sebesar 100,00% (sesuai Nota Dinas. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa KKP) dari target Triwulan I tahun 2026 pada sebesar 77%. Capaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP ini diperoleh dari perhitungan berikut:

Formulasi pengukuran/penilaian :

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada aplikasi SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

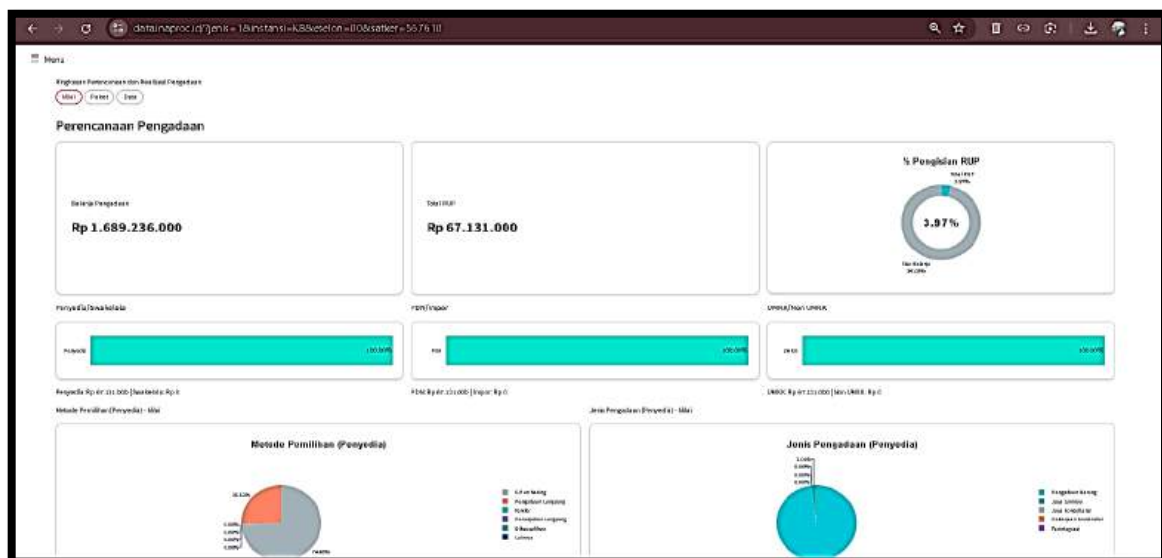
Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%. Maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator.

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Balai PPMHKP Balikpapan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

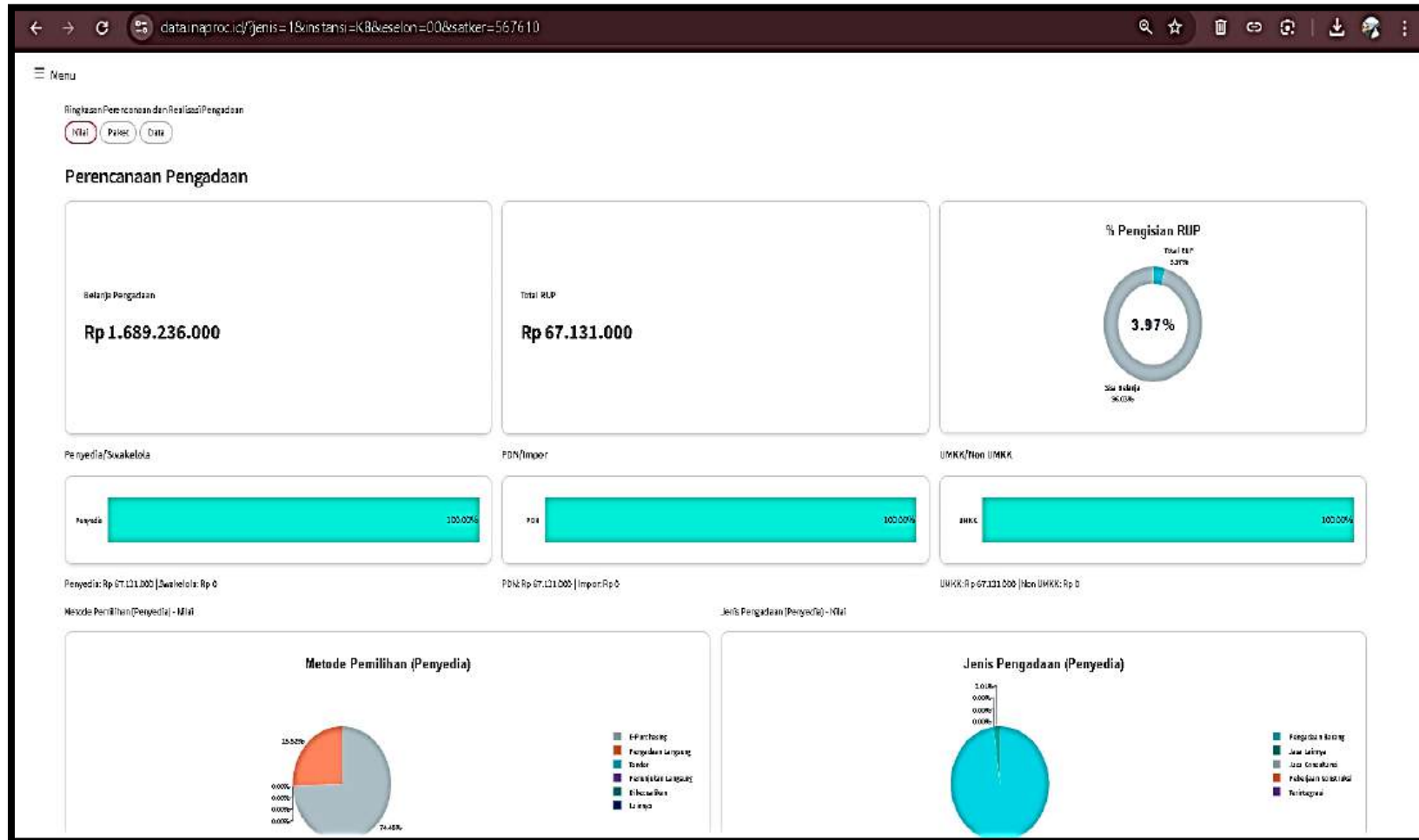
$$\frac{1,143,921,000}{1,143,921,000} \times 100\% = 100\%$$

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator disertakan foto / dokumentasi

Penyampaian Rencana Umum Pengadaan Tahun 2026 pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)



TANGKAP LAYAR PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP)



← → ↻ sirup.inaproc.id/sirup/rup/penyedia

SRUP Rekap RUP Cari Paket Kelola Data Unduh FAQ Berita Dashboard Ketentuan Kontak 2026 ppkrafiina-218

+ Paket Penyedia + Paket Penyedia Tahun Jamak Hapus Draft Finalisasi Draft

Tampilkan 10 entri Status Cari

No	Nama Kegiatan	Nama Paket	Peg. (Rp.)	Waktu Pemilihan	Sumber Dana	A	FD	U	Hapus	Actions
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	Jamuan Makan Integrasi	34.000.000	January 2026	APBN	☒	☒	☐	☐	
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	Pembayaran Listrik Integrasi	141.600.000	January 2026	APBN	☒	☒	☐	☐	
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	Langganan Jasa Internet Integrasi	24.000.000	January 2026	APBN	☒	☒	☐	☐	
4	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	Belanja Keperluan Rumah Tangga Perkantoran Integrasi	30.000.000	January 2026	APBN	☒	☒	☐	☐	
5	Dukungan Manajemen Internal	Pemeliharaan Saluran Air Integrasi	41.000.000	March 2026	APBN	☒	☒	☐	☐	

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 283/SJ.7/PL.410/IV/2026

Yth. : 1. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
9. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
10. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
11. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa

Hal : Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 1 Tahun Anggaran 2026

Lampiran : Satu berkas

Tanggal : 7 April 2026

Sehubungan dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2026, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengumuman RUP dalam aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) merupakan kewajiban Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Hasil rekapitulasi Capaian IKU Persentase RUP Terumumkan dari 156 (seratus lima puluh enam) Satuan Kerja Pengelola DIPA Aktif sesuai pagu anggaran yang tersedia lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2026 periode Triwulan 1 sampai dengan waktu *cut off* tanggal 7 April 2025 pukul 22:00 WIB sebesar **99,75%**. (daftar rekapitulasi terampir);

3. Berkenaan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara berkenan untuk melakukan perbaikan/penyesuaian data sesuai ketersediaan anggaran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Teguh Wibowo

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Lampiran 1

Nomor : 283/SJ.7/PL.410/IV/2026

Tanggal : 7 April 2026

**REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM
PENGADAAN TRIWULAN 1 TAHUN ANGGARAN 2026 LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

No	Kode E1	Nama Unit Eselon I	Σ Satker	Persentase RUP Terumumkan					% Target IKU TW 1	Capaian IKU TW - 1 TA. 2026	
				Σ Pagu Pengadaan	Σ Pagu Terumumkan	Σ Selisih Terumumkan	% RUP Terumumkan	Keterangan		% Capaian	Keterangan
1	01	Sekretariat Jenderal	3	470,068,437,000	470,068,437,000	0	100.0000%	Sesuai	85.00	100.00%	Capaian target maksimal
2	13	Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	47	304,871,258,000	304,871,258,000	0	100.0000%	Sesuai	77.00	100.00%	Capaian target maksimal
3	08	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	1	50,518,334,000	50,518,334,000	0	100.0000%	Sesuai	75.00	100.00%	Capaian target maksimal
4	05	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	15	758,474,978,000	758,474,978,000	0	100.0000%	Sesuai	77.00	100.00%	Capaian target maksimal
5	12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	42	326,938,554,000	326,938,554,000	0	100.0000%	Sesuai	77.00	100.00%	Capaian target maksimal
6	03	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	24	6,234,837,443,000	6,234,837,443,000	0	100.0000%	Sesuai	77.00	100.00%	Capaian target maksimal
7	02	Inspektorat Jenderal	1	15,127,914,000	15,127,743,000	(171,000)	99.9989%	Kurang Terumumkan	77.00	99,99%	Capaian melebihi target
8	06	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2	158,066,570,000	158,069,244,000	2,674,000	100.0017%	Lebih Terumumkan	77.00	99,99%	Capaian melebihi target
9	07	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	5	1,172,905,904,000	1,166,768,126,000	(6,137,778,000)	99.4767%	Kurang Terumumkan	76.00	99.48%	Capaian melebihi target
10	04	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	16	917,960,850,000	897,634,697,000	(20,326,153,000)	97.7857%	Kurang Terumumkan	77.00	97.79%	Capaian melebihi target
TOTAL			156	10,409,770,242,000	10,383,308,814,000	(26,461,428,000)	99.7458%	KURANG TERUMUMKAN		99.75%	CAPAIAN MELEBIH TARGET



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Teguh Wibowo

Lampiran 2

Nomor : 283/SJ.7/PL.410/IV/2026

Tanggal : 7 April 2026

**REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM
PENGADAAN TRIWULAN 1 TAHUN ANGGARAN 2026 PER SATUAN KERJA**

 (01) Sekretariat Jenderal – 3 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER PAGU PENGADAAN	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	TOTAL			
	01	SEKRETARIAT JENDERAL	470,068,437,000	470,068,437,000			
1	632004	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	14,473,809,000	14,473,809,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	622081	BIRO UMUM SETJEN KKP	447,214,323,000	447,214,323,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	660056	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	8,380,305,000	8,380,305,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

 (13) Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan – 47 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER PAGU PENGADAAN	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	TOTAL			
13		BADAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	304,871,258,000	304,871,258,000			
1	427598	BALAI BESAR KIPM DAN KHP MAKASSAR	19,484,769,000	19,484,769,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	567610	BALAI KIPM DAN KHP BALIKPAPAN	1,143,921,000	1,143,921,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	649615	BALAI KIPM DAN KHP LAMPUNG	1,029,385,000	1,029,385,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
4	649750	BALAI KIPM DAN KHP AMBON	1,339,462,000	1,339,462,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
5	649593	BALAI KIPM DAN KHP BANJARMASIN	1,057,310,000	1,057,310,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
				PAGU PENGADAAN			
			TOTAL	TOTAL			
13	BADAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN		304,871,258,000	304,871,258,000			
6	427624	BALAI KIPM DAN KHP DENPASAR	2,030,406,000	2,030,406,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
7	649568	BALAI KIPM DAN KHP ENTIKONG	526,628,000	526,628,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
8	649682	BALAI KIPM DAN KHP JAKARTA II	2,027,441,000	2,027,441,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
9	567812	BALAI KIPM DAN KHP JAYAPURA	942,893,000	942,893,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
10	567631	BALAI KIPM DAN KHP MANADO	1,141,041,000	1,141,041,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
11	567758	BALAI KIPM DAN KHP MATARAM	922,433,000	922,433,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
12	427567	BALAI KIPM DAN KHP MEDAN I	1,053,502,000	1,053,502,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
13	649661	BALAI KIPM DAN KHP SEMARANG	1,436,067,000	1,436,067,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
14	427542	BALAI KIPM DAN KHP SURABAYA I	2,120,230,000	2,120,230,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
15	649788	BALAI KIPM DAN KHP SURABAYA II	3,290,509,000	3,290,509,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
16	649640	BALAI KIPM DAN KHP TJ. PINANG	388,074,000	388,074,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
17	649572	BALAI KIPM DAN KHP TARAKAN	872,480,000	872,480,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
18	662897	BALAI UJI STANDAR KIPM DAN KHP	23,387,383,000	23,387,383,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
19	440807	SEKRETARIAT BPPMKHP	222,620,591,000	222,620,591,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
20	567694	STASIUN KIPM DAN KHP KENDARI	228,306,000	228,306,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
21	645691	STASIUN KIPM DAN KHP MAMUJU	132,060,000	132,060,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
22	649711	STASIUN KIPM DAN KHP SORONG	264,756,000	264,756,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
23	649589	STASIUN KIPM DAN KHP ACEH	1,094,470,000	1,094,470,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
24	645693	STASIUN KIPM DAN KHP BANDUNG	753,105,000	753,105,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
25	427649	STASIUN KIPM DAN KHP BATAM	683,227,000	683,227,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	PAGU PENGADAAN			
13	BADAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN		304,871,258,000	304,871,258,000			
26	649792	STASIUN KIPM DAN KHP BAUBAU	160,800,000	160,800,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
27	649622	STASIUN KIPM DAN KHP BENGKULU	574,268,000	574,268,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
28	649814	STASIUN KIPM DAN KHP BIMA	784,570,000	784,570,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
29	649732	STASIUN KIPM DAN KHP CIREBON	928,366,000	928,366,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
30	649678	STASIUN KIPM DAN KHP GORONTALO	493,789,000	493,789,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
31	649636	STASIUN KIPM DAN KHP JAMBI	195,176,000	195,176,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
32	649551	STASIUN KIPM DAN KHP KUPANG	380,500,000	380,500,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
33	649771	STASIUN KIPM DAN KHP LUWUK BANGGAI	171,170,000	171,170,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
34	649684	STASIUN KIPM DAN KHP MEDAN II	978,651,000	978,651,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
35	649688	STASIUN KIPM DAN KHP MERAK	996,270,000	996,270,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
36	649704	STASIUN KIPM DAN KHP MERAUKE	903,509,000	903,509,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
37	567432	STASIUN KIPM DAN KHP PADANG	748,892,000	748,892,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
38	649657	STASIUN KIPM DAN KHP PALANGKARAYA	858,250,000	858,250,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
39	567481	STASIUN KIPM DAN KHP PALEMBANG	390,073,000	390,073,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
40	649601	STASIUN KIPM DAN KHP PALU	397,648,000	397,648,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
41	649699	STASIUN KIPM DAN KHP PANGKAL PINANG	1,284,545,000	1,284,545,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
42	567453	STASIUN KIPM DAN KHP PEKANBARU	754,512,000	754,512,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
43	567538	STASIUN KIPM DAN KHP PONTIANAK	833,020,000	833,020,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
44	649800	STASIUN KIPM DAN KHP TAHUNA	508,760,000	508,760,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
45	649746	STASIUN KIPM DAN KHP TJ. BALAI ASAHAN	726,335,000	726,335,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
46	649767	STASIUN KIPM DAN KHP TERNATE	705,319,000	705,319,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
47	649725	STASIUN KIPM DAN KHP YOGYAKARTA	1,126,386,000	1,126,386,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

 (08) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut – 1 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
				PAGU PENGADAAN			
			TOTAL	TOTAL			
08	DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT		50,518,334,000	50,518,334,000			
1	417154	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	50,518,334,000	50,518,334,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

 (05) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan – 15 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	PAGU PENGADAAN			
05	DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		758,474,978,000	758,474,978,000			
1	440822	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG	20,299,569,000	20,299,569,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	440816	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA	16,681,384,000	16,681,384,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	440853	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL	20,840,752,000	20,840,752,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
4	325156	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BATAM	18,809,471,000	18,809,471,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
5	225135	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BENOA	15,211,781,000	15,211,781,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
6	065135	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP LAMPULO	21,461,321,000	21,461,321,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
7	449520	SETDITJEN PENGAWASAN SDKP	549,904,060,000	549,904,060,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
8	440831	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	16,852,683,000	16,852,683,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
9	440847	STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK	18,740,296,000	18,740,296,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
10	215141	STASIUN PENGAWASAN SDKP AMBON	9,711,004,000	9,711,004,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
11	250263	STASIUN PENGAWASAN SDKP BIAK	7,617,665,000	7,617,665,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
12	031665	STASIUN PENGAWASAN SDKP CILACAP	13,622,708,000	13,622,708,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
13	245160	STASIUN PENGAWASAN SDKP KUPANG	12,492,975,000	12,492,975,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
14	170445	STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA	9,671,447,000	9,671,447,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
15	355105	STASIUN PENGAWASAN SDKP TARAKAN	6,557,862,000	6,557,862,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

 (12) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan – 42 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
				PAGU PENGADAAN			
			TOTAL	TOTAL			
12	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN		326,938,554,000	326,938,554,000			
1	352595	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	990,954,000	990,954,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	403827	BBR BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	6,529,483,000	6,529,483,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	403835	BBR PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KP	4,985,346,000	4,985,346,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
4	403836	BBR SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	1,643,813,000	1,643,813,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
5	238755	BPPP AMBON	16,013,469,000	16,013,469,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
6	238762	BPPP BANYUWANGI	6,245,814,000	6,245,814,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
7	239260	BPPP BITUNG	12,257,656,000	12,257,656,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
8	238741	BPPP MEDAN	4,518,648,000	4,518,648,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
9	239188	BPPP TEGAL	39,950,140,000	39,950,140,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
10	653526	BALAI DIKLAT APARATUR SUKAMANDI	5,196,446,000	5,196,446,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
11	403830	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS	2,868,988,000	2,868,988,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
12	403832	BALAI RISET PEMULIAAN IKAN	3,231,545,000	3,231,545,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
13	403824	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	2,104,748,000	2,104,748,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
14	403828	BRP BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	6,817,145,000	6,817,145,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
15	403829	BRP BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	7,759,499,000	7,759,499,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
16	403822	BALAI RISET PERIKANAN LAUT	1,093,050,000	1,093,050,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
17	403823	BRP PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	6,931,859,000	6,931,859,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
18	403820	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	1,466,192,000	1,466,192,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
19	403833	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT	1,219,765,000	1,219,765,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
20	403834	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	928,933,000	928,933,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
21	403826	LOKA RISET PERIKANAN TUNA	1,701,958,000	1,701,958,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER PAGU PENGADAAN	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	TOTAL			
12		BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN	326,938,554,000	326,938,554,000			
22	403817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	1,730,900,000	1,730,900,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
23	427511	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN	57,281,778,000	57,281,778,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
24	238010	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	2,633,984,000	2,633,984,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
25	403839	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	3,306,385,000	3,306,385,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
26	403875	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI	12,655,559,000	12,655,559,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
27	440013	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA	2,047,982,000	2,047,982,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
28	403837	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	19,357,989,000	19,357,989,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
29	403838	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	1,823,939,000	1,823,939,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
30	403879	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN	2,467,483,000	2,467,483,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
31	622035	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	18,089,136,000	18,089,136,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
32	634146	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	5,759,647,000	5,759,647,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
33	403821	Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7,980,873,000	7,980,873,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
34	652009	SUPM KOTA AGUNG LAMPUNG	4,715,445,000	4,715,445,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
35	427551	SUPM LADONG	2,407,153,000	2,407,153,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
36	427573	SUPM PARIAMAN	4,821,203,000	4,821,203,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
37	427582	SUPM PONTIANAK	1,668,251,000	1,668,251,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
38	427630	SUPM SORONG	1,336,284,000	1,336,284,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
39	237373	SUPM TEGAL	4,040,473,000	4,040,473,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
40	427618	SUPM WAEHERU	2,018,843,000	2,018,843,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
41	626402	SEKRETARIAT BADAN RISET PPSDM KP	34,580,706,000	34,580,706,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
42	389090	PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SDM KP	1,759,090,000	1,759,090,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

 (03) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap – 24 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
				PAGU PENGADAAN			
			TOTAL	TOTAL			
03	DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP		6,234,837,443,000	6,234,837,443,000			
1	239150	BBPI SEMARANG	4,266,256,000	4,266,256,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	622461	PPN AMBON	2,888,215,000	2,888,215,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	427692	PPN BRONDONG	5,550,267,000	5,550,267,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
4	239146	PPN KARANGANTU	4,975,865,000	4,975,865,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
5	622482	PPN KEJAWANAN	76,447,767,000	76,447,767,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
6	310719	PPN KWANDANG	3,808,313,000	3,808,313,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
7	239171	PPN PEKALONGAN	2,624,978,000	2,624,978,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
8	560393	PPN PELABUHAN RATU	4,966,852,000	4,966,852,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
9	239991	PPN PEMANGKAT	2,169,663,000	2,169,663,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
10	633693	PPN PENGAMBENGAN	277,833,054,000	277,833,054,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
11	427670	PPN PRIGI	2,946,640,000	2,946,640,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
12	560401	PPN SIBOLGA	3,526,343,000	3,526,343,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
13	239214	PPN SUNGAILIAT	3,715,198,000	3,715,198,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
14	239221	PPN TANJUNG PANDAN	1,437,176,000	1,437,176,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
15	427661	PPN TERNATE	4,335,453,000	4,335,453,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
16	622475	PPN TUAL	2,121,021,000	2,121,021,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
17	239235	PPP TELUK BATANG	2,044,222,000	2,044,222,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
18	427655	PPS BELAWAN	8,432,114,000	8,432,114,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
19	633707	PPS BITUNG	10,659,664,000	10,659,664,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
20	531488	PPS BUNGUS	1,676,910,000	1,676,910,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
21	518117	PPS CILACAP	10,461,664,000	10,461,664,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
22	537695	PPS KENDARI	43,633,886,000	43,633,886,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
23	537611	PPS NIZAM ZACHMAN	29,534,068,000	29,534,068,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
24	238720	SETDITJEN PERIKANAN TANGKAP	5,724,781,854,000	5,724,781,854,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

 (02) Inspektorat Jenderal – 1 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
				PAGU PENGADAAN			
			TOTAL	TOTAL			
02	INSPEKTORAT JENDERAL		15,127,743,000	15,127,914,000			
1	622098	INSPEKTORAT JENDERAL	15,127,743,000	15,127,914,000	(171,000)	99.9989%	Kurang Terumumkan

 (06) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan – 2 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
				PAGU PENGADAAN			
			TOTAL	TOTAL			
06	DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN		158,069,244,000	158,066,570,000			
1	427686	BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN HASIL PERIKANAN	7,347,589,000	7,347,589,000	0	100.0000%	Sudah Sesuai
2	622131	SETDITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	150,721,655,000	150,718,981,000	2,674,000	100.0018%	Lebih Terumumkan

 (07) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan – 5 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
				PAGU PENGADAAN			
			TOTAL	TOTAL			
07	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN		1,170,166,198,000	1,169,007,198,000			
1	499352	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL BKKPN KUPANG	6,455,753,000	6,455,753,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	3,199,403,000	3,199,403,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	2,736,010,000	2,736,010,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
4	477456	Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru	2,970,613,000	2,970,613,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
5	622145	SETDITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	1,154,804,419,000	1,153,645,419,000	1,159,000,000	100.10%	Lebih Terumumkan

 (04) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya – 16 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
				PAGU PENGADAAN			
			TOTAL	TOTAL			
04	DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA		897,634,697,000	917,960,850,000			
1	239192	BBPB AIR PAYAU JEPARA	33,776,312,000	33,776,312,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
2	238734	BBPB AIR TAWAR SUKABUMI	26,301,351,000	26,301,351,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
3	427706	BBPB LAUT LAMPUNG	17,815,644,000	17,815,644,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
4	445393	BLU PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KARAWANG	126,396,102,000	126,396,102,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
5	567800	BPKIL SERANG	3,287,862,000	3,287,862,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
6	567350	BPB AIR PAYAU SITUBONDO	48,941,145,000	48,941,145,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
7	567680	BPB AIR PAYAU TAKALAR	15,771,406,000	15,771,406,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
8	567385	BPB AIR PAYAU UJUNG BATEE	10,567,720,000	10,567,720,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
9	567584	BPB AIR TAWAR MANDIANGIN	16,416,369,000	16,416,369,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
10	237657	BPB AIR TAWAR SUNGAI GELAM	19,225,478,000	19,225,478,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
11	538911	BPB AIR TAWAR TATELU	11,923,306,000	11,923,306,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
12	567720	BPB LAUT AMBON	14,325,630,000	14,325,630,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
13	567474	BPB LAUT BATAM	9,292,277,000	9,292,277,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
14	567762	BPB LAUT LOMBOK	13,441,592,000	13,441,592,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
15	445394	BPI UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	6,052,854,000	6,052,854,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
16	632462	SETDITJEN PERIKANAN BUDI DAYA	524,099,649,000	544,425,802,000	(20,326,153,000)	96.27%	Kurang Terumumkan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Teguh Wibowo

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK)
BALAI PPMHKP BALIKPAPAN**

NAMA INDIKATOR : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT LINGKUP BALAI PPMHKP BALIKPAPAN
NAMA TIMJA : DUKUNGAN MANAJERIAL
PERIODE LAPORAN : TRIWULAN I / 2026

Nama Sasaran Kegiatan		: Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel lingkup Balai PPMHKP Balikpapan							
Nama Indikator Kinerja		: Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup Balai PPMHKP Balikpapan							
T / R	Tahun 2026							Capaian Tahun 2026	Target Tahun 2026
	Q1	Q2	SM. 1	Q3	Q4	SM. 2	Tahunan		
Target	3,50								3.5
Realisasi	3,91								
% Capaian	111,71								

Catatan :
Q1, Q2, Q3, Q4 : Capaian selama triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4
SM. 1 : Capaian Q1 + Capaian Q2
SM. 2 : Capaian Q3 + Capaian Q4
Tahunan : Capaian di akhir tahun 2024

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya ?)

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan instrumen penting dalam mengukur tingkat kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada pengguna jasa atau layanan. Pelaksanaan SKM berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik, dinamika perubahan internal maupun eksternal menuntut adanya evaluasi berkelanjutan terhadap kualitas layanan. Oleh karena itu, pelaksanaan survei atau jajak pendapat menjadi krusial guna memperoleh gambaran objektif terhadap persepsi dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Balikpapan sebagai salah satu Unit Pelayanan Publik (UPP) di Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), perlu menyelenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat.

Terdapat beberapa isu utama yaitu :

1. Perubahan organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, terjadi perubahan yang semula dari Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) menjadi Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (BPPMHKP), perubahan struktur organisasi berdampak pada penyesuaian alur kerja, pembagian tugas, serta adaptasi pegawai terhadap sistem baru. Hal ini berimplikasi pada potensi ketidakkonsistenan layanan di masa transisi sehingga diperlukan sosialisasi terhadap stakeholder pada organisasi baru.

2. Tugas dan Fungsi yang diampu

Berdasarkan Permen KP No. 16 Tahun 2024 Tentang kewenangan pembinaan dan pengendalian dalam rangka penerbitan sertifikat jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, yang terdiri dari CPIB (Kapal), CPIB (pembenihan), CBIB, CPIB (pembuatan pakan), CPOIB, CDOIB, SKP, PPMMT dan Penerapan Distribusi Ikan. Kompleksitas tugas dan fungsi yang semakin berkembang menuntut peningkatan kapasitas layanan. Tanpa penyesuaian yang memadai, hal ini dapat memengaruhi kualitas output pelayanan.

3. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan tugas dan fungsi yang diampu oleh BPPMHKP saat ini terjadi kekurangan sumber daya manusia. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM berdampak langsung pada kecepatan, ketepatan, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaannya tidak optimal.

4. Sarana dan Prasarana

Kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan terbatasnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, yang berimplikasi pada kenyamanan dan efektivitas dalam mendukung kegiatan pada Balai PPMHKP Balikpapan menjadi kurang memadai.

5. Anggaran pelaksanaan kegiatan

Optimalisasi penggunaan anggaran menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi dan kualitas pelayanan, yang secara langsung memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi.

Isu-isu tersebut menegaskan pentingnya penyelenggaraan SKM secara berkala untuk mengidentifikasi kesenjangan antara harapan dan kenyataan layanan, serta sebagai dasar dalam penyusunan strategi perbaikan berkelanjutan.

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan /kegagalan pencapaian indikator disertakan foto/ dokumentasi

Pada Triwulan I Tahun 2026, Balai PPMHKP Balikpapan berhasil merealisasikan indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada sasaran kegiatan tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dengan capaian yang tergolong baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini tercermin dari nilai rata-rata IKM sebesar 3,91, yang merupakan agregasi dari dua jenis layanan, yaitu layanan hasil uji mutu produk perikanan dengan nilai 3,96 dan layanan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan (SMHKP) dengan nilai 3,90. Kedua layanan tersebut menunjukkan kinerja yang konsisten dan berada dalam kategori sangat baik, sehingga secara umum menggambarkan bahwa proses pelayanan publik yang diberikan telah berjalan efektif, responsif, dan sesuai dengan ekspektasi pengguna layanan.

Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas layanan teknis yang berkaitan langsung dengan output utama organisasi (pengujian mutu dan sertifikasi) telah mampu memberikan kepuasan yang tinggi kepada masyarakat. Tingginya nilai pada layanan hasil uji mutu produk perikanan (3,96) mengindikasikan bahwa aspek ketepatan hasil, keandalan proses pengujian, serta kecepatan layanan telah dirasakan optimal oleh pengguna. Sementara itu, layanan SMHKP dengan nilai 3,90 juga menunjukkan performa yang stabil, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan terutama pada aspek pendukung pelayanan.

Hasil pengukuran IKM juga mengidentifikasi beberapa unsur pelayanan yang masih memerlukan perhatian khusus. Tiga unsur dengan nilai terendah adalah Kompetensi Pelaksana (3,82), Perilaku Pelaksana (3,84), dan Biaya/Tarif (3,86). Nilai pada unsur kompetensi pelaksana yang paling rendah mengindikasikan bahwa masih terdapat persepsi pengguna layanan terhadap perlunya peningkatan kapasitas teknis maupun pemahaman petugas dalam memberikan layanan secara profesional dan informatif. Hal ini dapat mencakup aspek kejelasan informasi, kemampuan menjawab pertanyaan pengguna, hingga ketepatan dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, unsur perilaku pelaksana yang juga berada pada kategori relatif rendah menunjukkan bahwa aspek sikap, keramahan, serta konsistensi pelayanan prima masih perlu ditingkatkan. Meskipun secara umum layanan telah berjalan baik, pengalaman pengguna terhadap interaksi langsung dengan petugas menjadi faktor penting yang mempengaruhi persepsi kepuasan secara keseluruhan. Adapun pada unsur biaya dan tarif, nilai 3,86 mengindikasikan adanya persepsi pengguna terkait kejelasan informasi biaya yang masih perlu diperbaiki, meskipun tidak menunjukkan permasalahan yang signifikan.

Selain itu, terdapat beberapa aduan yang menjadi perhatian utama pengguna layanan, yaitu terkait perlunya peningkatan penggunaan dan kinerja aplikasi HC Siap Mutu, khususnya dalam hal optimalisasi fungsi dan kualitas layanan aplikasi. Aduan ini menunjukkan bahwa digitalisasi layanan yang telah diimplementasikan masih menghadapi tantangan dalam hal pengalaman pengguna, stabilitas sistem, maupun kemudahan akses oleh pengguna.

Sebagai tindak lanjut, Balai PPMHKP Balikpapan akan melakukan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam aspek kompetensi pelaksana, akan dilakukan penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis, peningkatan pemahaman standar pelayanan, serta pembinaan berkelanjutan untuk memastikan petugas memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan layanan. Pada aspek perilaku pelaksana, akan diperkuat budaya pelayanan prima melalui internalisasi nilai-nilai pelayanan. Untuk unsur biaya dan tarif, upaya yang akan dilakukan meliputi peningkatan informasi melalui publikasi lebih jelas dan mudah diakses, serta sosialisasi kepada pengguna layanan agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait struktur biaya.

Sementara itu, dalam merespons aduan terkait aplikasi HC Siap Mutu, akan dilakukan evaluasi dan pengembangan sistem secara berkelanjutan, termasuk peningkatan fitur, perbaikan bug, serta optimalisasi performa aplikasi agar lebih responsif.

Secara keseluruhan, capaian IKM Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan keberhasilan dalam memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, namun tetap memerlukan upaya perbaikan berkelanjutan pada aspek-aspek tertentu. Dengan strategi tindak lanjut yang terarah dan berkesinambungan, diharapkan kualitas pelayanan publik di Balai PPMHKP Balikpapan dapat terus meningkat dan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat.

Dokumentasi kegiatan :

1. Kegiatan survey kepuasan masyarakat terhadap layanan sehingga mendapatkan *feedback* dalam rangka peningkatan layanan terhadap masyarakat



2. Rencana tindak lanjut 3 (tiga) unsur yang memiliki nilai terendah

No.	Prioritas Unsur	Program Kegiatan	Waktu (Triwulan I Tahun 2026)			Penanggung Jawab
			April	Mei	Juni	
1.	Kompetensi Pelaksana	1. Rapat internal petugas pelayanan dengan pembahasan (kecepatan jaringan internet, kendala aplikasi OSS, aplikasi SIAPMUTU) 2. Melakukan refreshment pelatihan pelayanan publik bagi petugas pelayanan	√			Tim Pelayanan Publik
2.	Perilaku Pelaksana	1. Sosialisasi secara daring maupun luring kepada pengguna jasa terkait penggunaan aplikasi SIAPMUTU dan OSS 2. Melakukan asistensi penggunaan aplikasi SIAPMUTU dan OSS di ruang pelayanan	√			Tim Pelayanan Publik
3.	Biaya dan Tarif	1. Membuat Infografis biaya/tarif Layanan sesuai dengan 2. Sosialisasi secara daring maupun luring kepada pengguna jasa terkait biaya/tarif pelayanan	√			Tim Pelayanan Publik

Rekomendasi rencana aksi untuk triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
• Pendampingan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat secara langsung • Penentuan standar layanan • Refreshment petugas pelayanan publik	Timja Dukungan Manajerial

Hasil TL rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
-----	Timja Dukungan Manajerial


 Balikpapan, 06 April 2026
 Kepala Balai KIPM Balikpapan

 Eko Sulystianto



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppmhkp@kkp.go.id

Nomor	: 1066/BPPMHKP.1/HM.450/IV/2026	10 April 2026
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: 1 berkas	
Hal	: Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BPPMHKP Triwulan I Tahun 2026	

Yth. (Daftar Terlampir)
Di tempat

Sehubungan dengan berakhirnya periode Triwulan I tahun 2026 telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna jasa layanan OP BPPMHKP dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik (OP).

Target Indeks SKM yang ditetapkan pada Triwulan I tahun 2026 adalah 3,5 sebagaimana telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2026 masing-masing OP lingkup BPPMHKP. Sebagai pedoman perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pada periode berikutnya, berikut adalah capaian dari hasil validasi SKM berdasarkan Nota Dinas Nomor 1273/SJ.8/TU.140/IV/2026 perihal Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I Tahun 2026 oleh Kepala Pusat Data dan Informasi.

1. Indeks SKM yang didapatkan dari seluruh OP BPPMHKP pada Triwulan I Tahun 2026 adalah **3,85** dan mutu pelayanan diperoleh “**A**” kategori “**Sangat Baik**”. Jumlah responden yang diperoleh sebanyak 2.783 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) responden yang melakukan survei.
2. Jumlah OP BPPMHKP yang mendapatkan nilai SKM dengan kategori sangat baik tercatat sebanyak 46 (empat puluh enam) OP dan kategori baik sebanyak 1 (satu) OP. OP dengan nilai SKM tertinggi diraih oleh Stasiun PPMHKP Gorontalo, Stasiun PPMHKP Palu, dan Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan .

3. Hasil SKM berdasarkan rekap per produk layanan dari 13 (tiga belas) produk layanan terdapat 9 (sembilan) layanan mendapatkan kategori “Sangat Baik” dan 1 (satu) produk layanan mendapatkan kategori “Baik” yaitu Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB). Kemudian, terdapat 3 (tiga) produk layanan yang tidak memiliki responden yaitu Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPOIB), Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB), dan Sertifikat keikutsertaan dan *final report*.
4. Rekapitulasi per unsur layanan didapatkan rincian nilai sebagai berikut:

Unsur Layanan	Indeks	Nilai SKM
Unsur 1 : Persyaratan Pelayanan	3,88	97,01
Unsur 2 : Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	3,86	96,56
Unsur 3 : Waktu Penyelesaian Pelayanan	3,85	96,15
Unsur 4 : Biaya/Tarif Pelayanan	3,86	96,55
Unsur 5 : Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,86	96,49
Unsur 6 : Kompetensi Pelaksana	3,79	94,74
Unsur 7 : Perilaku Pelaksana	3,81	95,13
Unsur 8 : Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,87	96,78
Unsur 9 : Sarana dan Prasarana	3,85	96,31

Nilai terendah ada pada 3 (tiga) unsur yakni U6 (Kompetensi Pelaksana), U7 (Perilaku Pelaksana) dan U3 (Waktu Penyelesaian Pelayanan).

5. Berdasarkan hasil validasi tersebut mohon kepada kepala OP untuk dapat memberikan perhatian lebih pada produk layanan dan unsur layanan yang mempunyai nilai rendah, serta kritik dan saran dalam melakukan tindak lanjut perbaikan pada aspek-aspek yang dapat meningkatkan kinerja setiap unsur pelayanan pada seluruh jenis layanan yang diampu oleh OP masing-masing.

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan PPMHKP
Sekretaris Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariati

Tembusan:

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Lampiran Surat Dinas

Nomor : 1066/BPPMHKP.1/HM.450/IV/2026

Tanggal : 10 April 2026

Kepala Unit Kerja lingkup Badan PPMHKP

1. Kepala Pusat Manajemen Mutu
2. Kepala Pusat Mutu Produksi Primer
3. Kepala Pusat Mutu Pascapanen
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPMHKP
5. Plt. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPMHKP

a.n. Kepala Badan PPMHKP
Sekretaris Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariati

Rekapitulasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik (OP)
lingkup BPPMHKP Triwulan I Tahun 2026

NO	OP	INDEKS PER-UNSUR LAYANAN									INDEKS	NILAI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	Metode SKM
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
1	Stasiun PPMHKP Gorontalo	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	A	Sangat Baik	55	Online
2	Stasiun PPMHKP Palu	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	A	Sangat Baik	28	Online
3	Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	A	Sangat Baik	11	Online
4	Stasiun PPMHKP Merak	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,98	3,98	4,00	3,98	3,99	99,81	A	Sangat Baik	43	Online
5	Balai PPMHKP Banjarbaru	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,97	3,99	3,99	3,99	3,99	99,77	A	Sangat Baik	157	Online
6	Stasiun PPMHKP Ternate	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	99,54	A	Sangat Baik	54	Online
7	Stasiun PPMHKP Pekanbaru	3,99	3,98	3,99	3,97	3,98	3,96	3,98	3,97	3,98	3,98	99,46	A	Sangat Baik	225	Online
8	Stasiun PPMHKP Pangkal Pinang	4,00	3,94	3,97	3,92	3,94	4,00	3,97	3,94	4,00	3,97	99,15	A	Sangat Baik	36	Online
9	Stasiun PPMHKP Sorong	3,98	4,00	3,98	3,95	3,98	3,95	3,93	3,95	3,95	3,96	99,07	A	Sangat Baik	42	Online
10	Balai PPMHKP Mataram	3,96	3,92	3,96	3,96	3,96	3,92	3,96	3,96	3,96	3,95	98,82	A	Sangat Baik	26	Online
11	Stasiun PPMHKP Bengkulu	3,80	4,00	4,00	3,95	4,00	3,90	3,90	4,00	3,95	3,94	98,61	A	Sangat Baik	20	Online
12	Stasiun PPMHKP Bima	4,00	3,88	3,88	3,75	4,00	4,00	4,00	3,88	4,00	3,93	98,26	A	Sangat Baik	8	Online
13	Stasiun PPMHKP Aceh	3,67	4,00	4,00	3,67	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,93	98,15	A	Sangat Baik	3	Online
14	Stasiun PPMHKP Yogyakarta	3,91	3,70	3,87	3,96	3,96	4,00	4,00	4,00	3,91	3,92	98,07	A	Sangat Baik	23	Online
15	Balai PPMHKP Makassar	3,93	3,92	3,92	3,90	3,93	3,90	3,91	3,92	3,92	3,92	97,96	A	Sangat Baik	368	Online
16	Stasiun PPMHKP Padang	4,00	4,00	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	4,00	3,88	3,92	97,92	A	Sangat Baik	8	Online
17	Balai PPMHKP Balikpapan	3,89	3,88	3,95	3,86	3,91	3,82	3,84	4,00	4,00	3,91	97,66	A	Sangat Baik	57	Online
18	Balai PPMHKP Denpasar	3,92	3,91	3,87	3,90	3,91	3,88	3,90	3,92	3,92	3,90	97,61	A	Sangat Baik	151	Online
19	Stasiun PPMHKP Pontianak	3,96	3,96	3,96	3,98	3,98	3,79	3,77	3,79	3,79	3,89	97,22	A	Sangat Baik	53	Online
20	Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai	3,93	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,93	3,93	3,93	3,89	97,22	A	Sangat Baik	14	Online
21	Stasiun PPMHKP Cirebon	3,94	3,92	3,92	3,91	3,87	3,85	3,84	3,89	3,86	3,89	97,20	A	Sangat Baik	118	Online
22	Stasiun PPMHKP Merauke	3,91	3,91	3,82	3,82	3,86	3,91	3,82	3,86	3,82	3,86	96,46	A	Sangat Baik	22	Online

23	Balai PPMHKP Ambon	3,88	3,86	3,84	3,79	3,83	3,90	3,86	3,90	3,86	3,86	96,46	A	Sangat Baik	58	Online
24	Balai PPMHKP Tanjung Pinang	3,88	3,85	3,62	3,90	3,86	3,85	3,85	3,91	3,87	3,84	96,05	A	Sangat Baik	138	Online
25	Stasiun PPMHKP Bandung	3,84	3,79	3,84	3,79	3,84	3,84	3,84	3,79	3,84	3,82	95,61	A	Sangat Baik	19	Online
26	Balai PPMHKP Jakarta	3,86	3,84	3,81	3,88	3,84	3,75	3,79	3,77	3,79	3,81	95,37	A	Sangat Baik	57	Online
27	Balai PPMHKP Tarakan	3,82	3,79	3,85	3,85	3,80	3,77	3,79	3,80	3,77	3,81	95,13	A	Sangat Baik	61	Online
28	Balai PPMHKP Medan I	3,84	3,81	3,84	3,84	3,81	3,81	3,84	3,81	3,63	3,80	95,09	A	Sangat Baik	43	Online
29	Balai PPMHKP Entikong	3,86	3,81	3,81	3,71	3,81	3,78	3,83	3,79	3,83	3,80	95,06	A	Sangat Baik	72	Online
30	Stasiun PPMHKP Bau-Bau	3,74	3,83	3,83	3,78	3,87	3,78	3,83	3,78	3,78	3,80	95,05	A	Sangat Baik	23	Online
31	Stasiun PPMHKP Medan II	3,87	3,81	3,75	3,85	3,79	3,71	3,75	3,88	3,77	3,80	94,93	A	Sangat Baik	52	Online
32	Balai PPMHKP Jayapura	3,60	4,00	3,80	3,80	4,00	3,60	3,80	3,80	3,60	3,78	94,44	A	Sangat Baik	5	Online
33	Balai PPMHKP Manado	3,73	3,77	3,77	3,77	3,73	3,73	3,77	3,77	3,82	3,76	94,07	A	Sangat Baik	22	Online
34	Balai PPMHKP Surabaya II	3,96	3,95	3,95	3,96	3,92	3,01	3,03	3,93	3,94	3,74	93,51	A	Sangat Baik	104	Online
35	Stasiun PPMHKP Palembang	3,83	3,76	3,72	3,76	3,76	3,55	3,72	3,86	3,69	3,74	93,49	A	Sangat Baik	29	Online
36	Stasiun PPMHKP Kupang	3,74	3,75	3,74	3,71	3,73	3,71	3,71	3,75	3,73	3,73	93,21	A	Sangat Baik	139	Online
37	Stasiun PPMHKP Palangkaraya	3,62	3,81	3,76	3,71	3,67	3,81	3,71	3,71	3,62	3,71	92,86	A	Sangat Baik	21	Online
38	Stasiun PPMHKP Mamuju	3,77	3,69	3,69	3,69	3,69	3,77	3,62	3,77	3,69	3,71	92,74	A	Sangat Baik	13	Online
39	Stasiun PPMHKP Kendari	3,81	3,75	3,69	3,66	3,78	3,53	3,72	3,69	3,72	3,70	92,62	A	Sangat Baik	32	Online
40	Stasiun PPMHKP Batam	3,69	3,66	3,69	3,86	3,66	3,55	3,59	3,72	3,62	3,67	91,76	A	Sangat Baik	29	Online
41	Balai PPMHKP Semarang	3,67	3,62	3,65	3,67	3,64	3,53	3,58	3,71	3,68	3,64	91,06	A	Sangat Baik	101	Online
42	Balai Besar PPMHKP Surabaya I	3,67	3,63	3,62	3,69	3,63	3,53	3,59	3,65	3,63	3,63	90,71	A	Sangat Baik	133	Online
43	Stasiun PPMHKP Jambi	3,67	3,67	3,53	3,67	3,47	3,60	3,60	3,67	3,60	3,61	90,19	A	Sangat Baik	15	Online
44	Pusat Manajemen Mutu	3,65	3,55	3,50	3,65	3,55	3,60	3,60	3,60	3,55	3,58	89,58	A	Sangat Baik	20	Online
45	Balai PPMHKP Lampung	3,73	3,65	3,57	3,59	3,54	3,43	3,43	3,68	3,51	3,57	89,26	A	Sangat Baik	37	Online
46	Balai Uji Standar PPMHKP Jakarta	3,68	3,59	3,38	3,59	3,54	3,41	3,51	3,59	3,54	3,54	88,44	A	Sangat Baik	37	Online
47	Stasiun PPMHKP Tahuna	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,11	77,78	B	Baik	1	Online

Rekapitulasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Produk Layanan BPPMHKP Triwulan I Tahun 2026

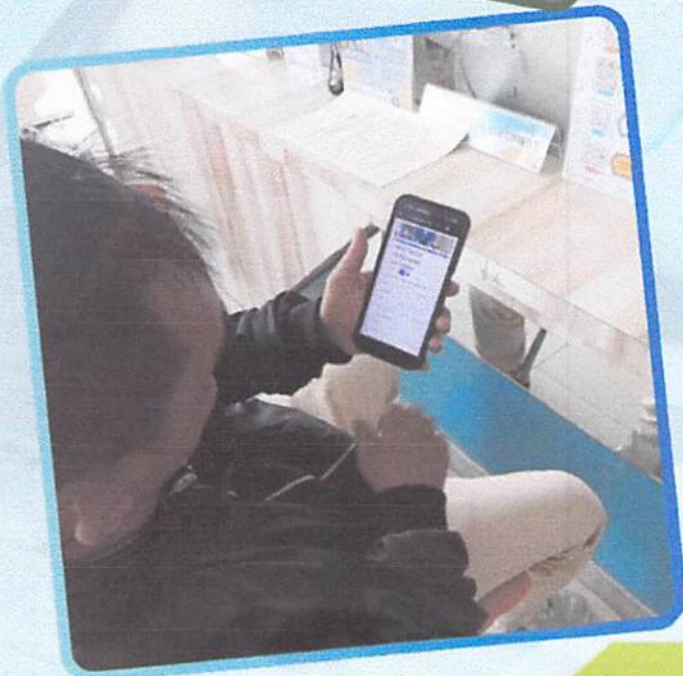
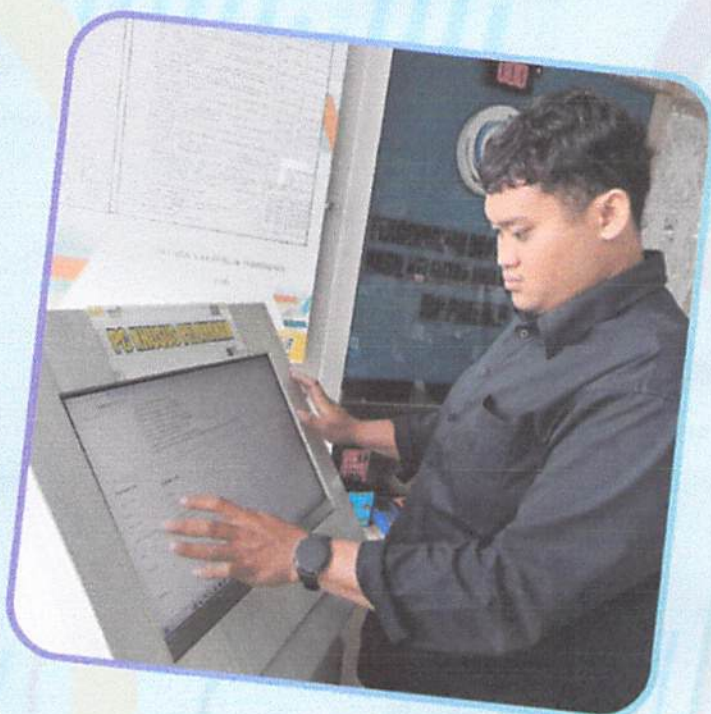
NO	PRODUK LAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	INDEKS PER-UNSUR LAYANAN									INDEKS	NILAI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9				
1	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	1952	3,92	3,91	3,89	3,92	3,90	3,84	3,86	3,91	3,90	3,90	97,38	A	Sangat Baik
2	Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)	69	3,86	3,83	3,80	3,81	3,87	3,83	3,87	3,93	3,84	3,85	96,18	A	Sangat Baik
3	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP)	200	3,84	3,82	3,80	3,76	3,81	3,75	3,75	3,83	3,79	3,79	94,75	A	Sangat Baik
4	Laporan hasil uji mutu produk perikanan	345	3,80	3,77	3,74	3,72	3,74	3,63	3,66	3,77	3,74	3,73	93,24	A	Sangat Baik
5	Sertifikat Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB)	42	3,76	3,76	3,86	3,79	3,79	3,69	3,57	3,81	3,69	3,71	93,65	A	Sangat Baik
6	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	120	3,71	3,68	3,61	3,72	3,73	3,58	3,63	3,68	3,68	3,67	91,69	A	Sangat Baik
7	Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)	24	3,79	3,71	3,67	3,67	3,58	3,46	3,63	3,67	3,67	3,65	91,20	A	Sangat Baik
8	Sertifikat pengesahan nomor registrasi (<i>approval number</i>)	20	3,65	3,55	3,50	3,65	3,55	3,60	3,60	3,60	3,55	3,58	89,58	A	Sangat Baik
9	Bahan acuan yang disertai dengan <i>Certificate of Analysis</i> (CoA)	4	3,75	3,75	3,50	3,50	3,50	3,25	3,75	3,50	3,50	3,56	88,89	A	Sangat Baik
10	Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)	7	3,57	3,29	3,29	3,29	3,29	3,14	3,14	3,43	3,14	3,29	82,14	B	Baik
11	Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Sertifikat keikutsertaan dan <i>final report</i>	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seluruh Layanan BPPMHKP		2783	97,01	96,56	96,15	96,55	96,49	94,74	95,13	96,78	96,31	3,85	96,19	A	Sangat Baik

LAPORAN

MONITORING EVALUASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

TRIWULAN I

2026



**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN BALIKPAPAN
TRIWULAN I TAHUN 2026



BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan petunjuk-Nya sehingga Laporan Monitoring Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat/ Pelanggan Pada Triwulan I Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan Tahun 2026 dapat diselesaikan.

Laporan Monitoring Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat/ Pelanggan Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan ini dimaksudkan untuk mengukur dan mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/ pelanggan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan dengan tujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat/ pelanggan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan. Diharapkan laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan, peningkatan dan pengambilan kebijakan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan di masa yang akan datang, khususnya dilingkup Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan.

Kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat kami harapkan guna perbaikan-perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga Laporan Monitoring Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat/ Pelanggan Triwulan I Tahun 2026 Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan pelayanan.

Balikpapan, 06 April 2026

Kepala Balai Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Keamanan Hasil
Perikanan Balikpapan



Eko Sulystianto

NIP. 197002111997031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
BAB II	4
PENGUMPULAN DATA SKM	4
2.1 Pelaksana SKM	4
2.2 Metode Pengumpulan Data.....	4
2.3 Lokasi Pengumpulan Data.....	5
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM.....	5
2.5 Penentuan Jumlah Responden	6
BAB III	7
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	7
3.1 Jumlah Responden SKM.....	7
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan).....	9
BAB IV	10
ANALISIS HASIL SKM	10
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan.....	10
4.2 Rencana Tindak Lanjut	11
4.3 Tren Nilai SKM.....	12
BAB V	14
KESIMPULAN	14
LAMPIRAN	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan sebagai salah satu Unit Pelayanan Publik (UPP) di Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik; dan
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan; dan
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada UPP Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2026 (sebagaimana terlampir).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner *online* melalui link <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/22> yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 (sembilan) pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan melalui link kuesioner yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik per-triwulan dengan jangka waktu (periode) yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 4 (empat) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Januari 2026	8
2.	Pengumpulan Data	Januari – Maret 2026	60
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	April 2026	7
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	April 2026	7

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan triwulan IV tahun 2025, maka populasi penerima layanan pada Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan dalam kurun waktu triwulan IV tahun 2025 adalah sebanyak 125 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 92 orang.

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 57 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	24	42%
		Perempuan	33	58%
2	Usia	<25	11	19%
		25-45	31	54%
		46-60	15	26%
		>60	0	0%
3	Pendidikan	SD	0	0%
		SMP	0	0%
		SMA	34	60%
		D3	0	0%
		S1	23	40%
		S2	0	0%
		S3	0	0%
4	Pekerjaan	ASN	0	1%
		TNI/POLRI	0	0%
		Pelaku Usaha KKP	1	2%
		Pegawai Swasta	55	96%
		Wirausaha Non KKP	1	2%
		Pelajar/Mahasiswa	0	0
5	Jenis Layanan	Uji Profisiensi bagi laboratorium pengujian penyakit ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	0	0%
		Penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif	0	0%

		Laporan hasil uji mutu produk perikanan	3	5%
		Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)	0	0%
		Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	54	95%
		Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik	0	0%

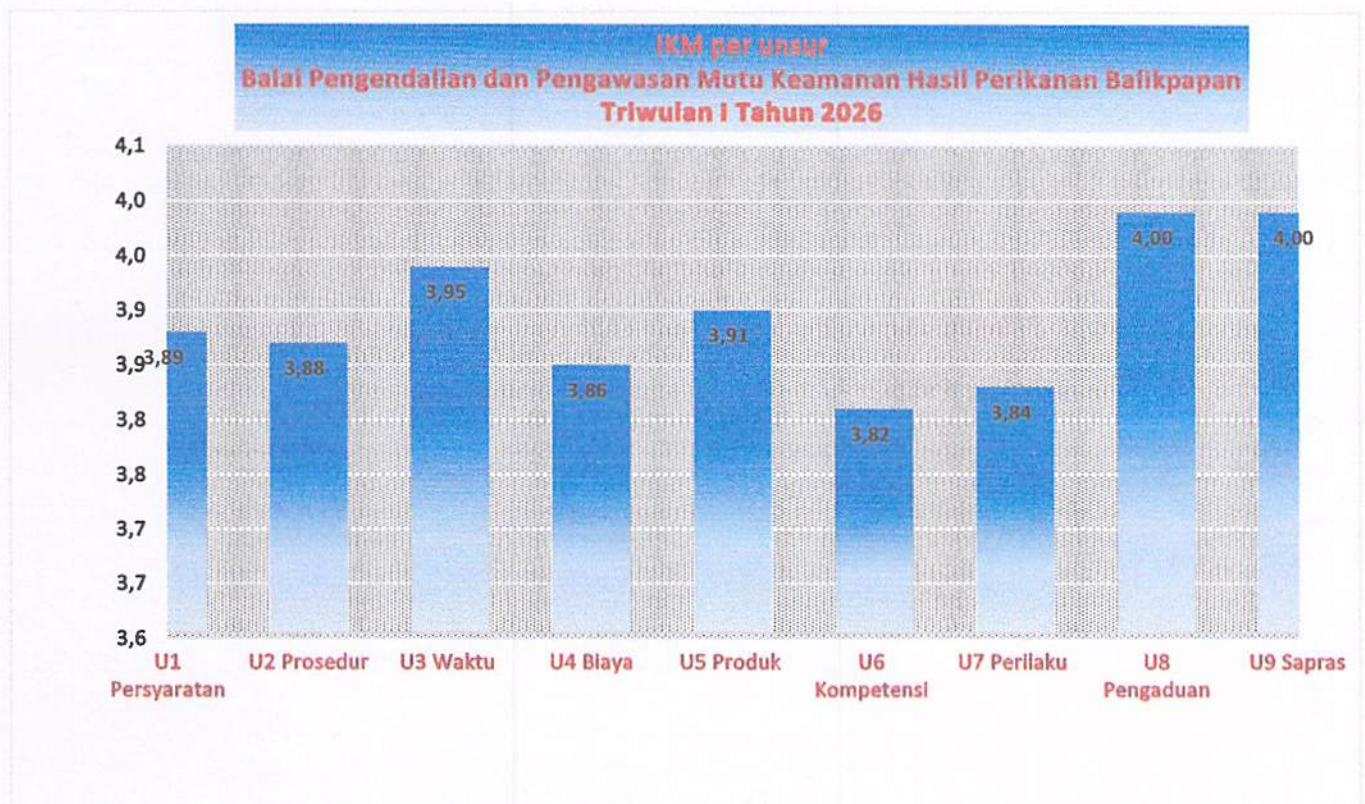
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,89	3,88	3,95	3,86	3,91	3,82	3,84	4,0	4,0
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	97,66 (A atau Sangat Baik)								

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/ Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Tiga unsur layanan terendah yang didapatkan ialah Kompetensi Pelaksana mendapatkan nilai terendah yaitu 3,86. Selanjutnya Perilaku Pelaksana mendapatkan nilai 3,84 adalah nilai terendah kedua dan Biaya dan Tarif yang mendapatkan nilai 3,86 adalah nilai terendah ketiga.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan serta Sarana dan Prasarana mendapatkan nilai tertinggi yaitu 4,00 dan selanjutnya Waktu Penyelesaian mendapatkan nilai yaitu 3,90.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/ kritik serta pengaduan yang masuk melalui link kuesioner pengisian SKM Online yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- Terus ditingkatkan penggunaan aplikasi HC Siap Mutu
- Terus ditingkatkan layanan aplikasinya

Adapun kondisi permasalahan/ kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Adaptasi terhadap sistem/aplikasi baru, sehingga perlu optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan aplikasi layanan digital
- Terdapat kecenderungan pelayanan yang bersifat administratif
- Sosialisasi terkait tarif dan biaya belum optimal.
- Masih terdapat pengguna yang belum memahami cara penggunaan aplikasi dan pengguna layanan mengharapkan aplikasi layanan yang lebih cepat, stabil, dan mudah diakses

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui monitoring dan evaluasi serta rapat internal petugas pelayanan dengan pembahasan pada bulan April sampai dengan Juni 2026. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek kurang dari 12 bulan. Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut :

No.	Prioritas Unsur	Program Kegiatan	Waktu (Triwulan I Tahun 2026)			Penanggung Jawab
			April	Mei	Juni	
1.	Kompetensi Pelaksana	1. Rapat internal petugas pelayanan dengan pembahasan (kecepatan jaringan internet, kendala aplikasi OSS, aplikasi SIAPMUTU) 2. Melakukan refreshment pelatihan pelayanan publik bagi petugas pelayanan	√			Tim Pelayanan Publik
2.	Perilaku Pelaksana	1. Sosialisasi secara daring maupun luring kepada pengguna jasa terkait penggunaan aplikasi SIAPMUTU dan OSS 2. Melakukan asistensi penggunaan aplikasi SIAPMUTU dan OSS di ruang pelayanan	√			Tim Pelayanan Publik
3.	Biaya dan Tarif	1. Membuat Infografis biaya/tarif Layanan sesuai dengan 2. Sosialisasi secara daring maupun luring kepada pengguna jasa terkait biaya/tarif pelayanan	√			Tim Pelayanan Publik

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel grafik kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada Triwulan II Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, diketahui bahwa capaian kinerja menunjukkan pola fluktuatif. Pada Triwulan III tahun 2025 terjadi penurunan kinerja dibandingkan Triwulan II. Namun demikian, pada periode berikutnya yaitu triwulan IV tahun 2025 dan triwulan I tahun 2026 menunjukkan peningkatan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan publik telah dilakukan, namun belum berjalan secara optimal dan konsisten. Oleh karena itu, diperlukan langkah evaluasi dan penguatan berkelanjutan terhadap perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kinerja agar capaian kinerja pelayanan publik dapat meningkat secara stabil dan berkesinambungan.

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode Triwulan I mulai Januari hingga Maret 2026, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 97,66.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana dan Biaya dan Tarif.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Penanganan, pengaduan, Saran dan Masukan serta Sarana dan Prasarana, dan unsur selanjutnya adalah Waktu Penyelesaian.

LAMPIRAN

1. Kuesioner Online

2. Hasil Pengolahan Data SKM

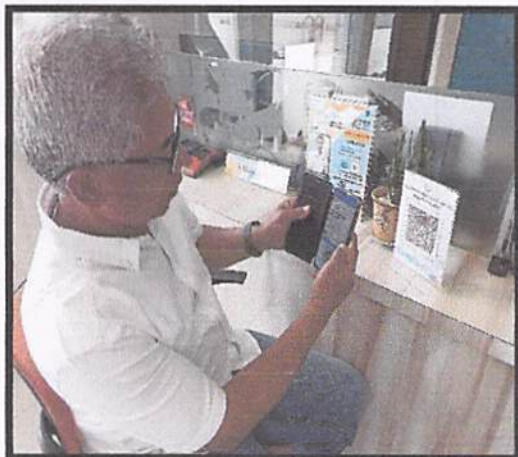
TABEL PERHITUNGAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)																
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALKUPAPAN																
PERIODE TRIWULAN I 2026																
No	JENIS LAYANAN	JENIS KELOMPOK	JENIS	PENGESKAN	PEKERJA	NILAI URUTAN PELAYANAN								KRITIK DAN SARAN	NILAI PER JENIS LAYANAN	RBR PER JENIS LAYANAN
						01	02	03	04	05	06	07	08			
1	Sentral Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKMHP)	P	25-45	SI	terampil	4	4	4	4	4	4	4	4	PELAYANAN SANGAT MEMUKJIKAN	100,00	
2	Sentral Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKMHP)	P	46-60	SI	terampil	3	3	3	3	3	3	3	3	4 Apresiasi sistem layanan untuk SKMHP tetap dan terus ditingkatkan	100,00	
3	Sentral Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKMHP)	P	25-45	SI	terampil	4	4	4	4	4	4	4	4	PELAYANAN SANGAT MEMUKJIKAN	100,00	
4	Sentral Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKMHP)	P	25-45	SI	terampil	4	4	4	4	4	4	4	4	PELAYANAN SANGAT MEMUKJIKAN	100,00	
5	Sentral Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKMHP)	P	46-60	SI	terampil	4	3	4	3	3	3	3	3	4 Tetap dan ditingkatkan untuk aplikasi sistem layanan SKMHP	100,00	
6	Sentral Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKMHP)	P	25-45	SI	terampil	4	4	4	4	4	4	4	4	4 Sap ikat ada	100,00	
7	Sentral Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKMHP)	P	25-45	SI	terampil	4	4	4	4	4	4	4	4	4 Sap ikat ada	100,00	
8	Sentral Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKMHP)	P	46-60	SI	terampil	3	3	3	3	3	3	3	3	4 Apresiasi sistem layanan khususnya SKMHP tetap dan ditingkatkan lagi	77,70	
9	Sentral Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKMHP)	P	25-45	SI	terampil	4	4	4	4	4	4	4	4	4 Sap ikat ada	100,00	
10	Sentral Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKMHP)	P	25-45	SI	terampil	4	4	4	4	4	4	4	4	4 Sap ikat ada	100,00	
11	Sentral Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKMHP)	L	46-60	SI	terampil	4	4	4	3	3	3	3	3	4 Tetap perkenalkan kualitas pelayanan dengan baik	79,67	
12	Sentral Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKMHP)	P	25-45	SI	terampil	4	4	4	4	4	4	4	4	PELAYANAN SANGAT BAIK	100,00	
13	Sentral Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKMHP)	P	46-60	SI	terampil	3	3	3	3	3	3	3	3	4 Terus ditingkatkan program aplikasi HC Sap Mutu	95,56	
14	Sentral Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKMHP)	P	25-45	SI	terampil	4	4	4	4	4	4	4	4	4 Sap ikat ada	100,00	
15	Sentral Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKMHP)	P	25-45	SI	terampil	4	4	4	4	4	4	4	4	4 SANGAT BAIK PELAYANANNYA	100,00	
16	Sentral Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKMHP)	P	25-45	SI	terampil	4	4	4	4	4	4	4	4	4 Sel almanak yang Terbak	100,00	
17	Sentral Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKMHP)	P	25-45	SI	terampil	4	4	4	4	4	4	4	4	4 Sap ikat ada	100,00	
18	Sentral Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKMHP)	P	25-45	SI	terampil	4	4	4	4	4	4	4	4	4 Sap ikat ada	100,00	
19	Sentral Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKMHP)	L	25-45	SI	terampil	4	4	4	4	4	4	4	4	4 Pelayanan yang sangat memuaskan	100,00	
20	Sentral Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKMHP)	P	25-45	SI	terampil	4	4	4	4	4	4	4	4	PELAYANAN SANGAT MEMUKJIKAN	100,00	
21	Sentral Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKMHP)	P	25-45	SI	terampil	4	4	4	4	4	4	4	4	PELAYANAN SANGAT MEMUKJIKAN	100,00	
22	Sentral Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKMHP)	P	25-45	SI	terampil	4	4	4	4	4	4	4	4	PELAYANAN SANGAT MEMUKJIKAN	100,00	
23	Sentral Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKMHP)	P	46-60	SI	terampil	3	3	3	3	3	3	3	3	4 Ditingkatkan terus aplikasinya	95,56	
24	Sentral Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKMHP)	P	25-45	SI	terampil	4	4	4	4	4	4	4	4	PELAYANAN SANGAT MEMUKJIKAN	100,00	
25	Sentral Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKMHP)	P	25-													

NO	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTAS
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	24	42%
		Perempuan	33	58%
2	Usia	Dibawah 25	11	18%
		25-45	31	54%
		46-60	15	26%
		>60	0	0%
3	Pendidikan	SD	0	0%
		SMP	0	0%
		SMA	34	58%
		D3	0	0%
		S1	23	40%
		S2	0	0%
		S3	0	0%
4	Pekerjaan	ASN	0	0%
		TNI/Polri	0	0%
		Pelaku Usaha KKP	1	2%
		Pegawai Swasta	55	96%
		Wiraswasta Non KKP	1	2%
		Pelajar/Mahasiswa	0	0%
5	Jenis Layanan	Uji Profisiensi bagi laboratorium pengujian penyakit ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	0	0%
		Penyediaan koleksi standar bahan acuan/kontrol positif	0	0%
		Jasa pengujian hama penyakit ikan/karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air	3	5%
		Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PM/THACCP)	0	0%
		Penjaminan Kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk pengeluan dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Eksport)	54	95%
		Penerbitan Sertifikat Kelulusan Pengolahan	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembastan Pakan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembastan Obat Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik	0	0%

NO	UNSUR PELAYANAN	AKTUAL MASYARAKAT		
		INDEKS KONVERSI	MUTU	KINERJA
U1	Persyaratan	97,37	A	Sangat Baik
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	96,93	A	Sangat Baik
U3	Waktu Penyelesaian	98,68	A	Sangat Baik
U4	Biaya/Tarif	96,49	A	Sangat Baik
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	97,81	A	Sangat Baik
U6	Kompetensi Pelayanan	95,61	A	Sangat Baik
U7	Perilaku Pelaksana	96,05	A	Sangat Baik
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	100,00	A	Sangat Baik
U9	Sarana dan Prasarana	100,00	A	Sangat Baik

NO	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,0000 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,6000 - 3,0640	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,5320	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,0000	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM



Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Triwulan I Tahun 2026

Mutu Pelayanan :



Sangat Baik

Unsur Pelayanan :

Periode Survei : Januari s/d Maret 2026

Usia:

<25 : 11 Responden

25 - 45 : 31 Responden

46 - 60 : 15 Responden

>60 : 0 Responden

Jenis Kelamin :

Laki - laki : 24 Responden

Perempuan : 33 Responden

Pendidikan:

SD : 0 Responden

SMP : 0 Responden

SMA : 34 Responden

Diploma : 0 Responden

S1 : 23 Responden

S2 : 0 Responden

S3 : 0 Responden



57 Responden

1 PERSYARATAN 3,89

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR 3,88

3 WAKTU PENYELESAIAN 3,95

4 BIAYA / TARIF 3,86

5 PRODUK SPESIFIKASI JENIS PELAYANAN 3,91

6 KOMPETENSI PELAKSANA 3,82

7 PERILAKU PELAKSANA 3,84

8 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN 4,0

9 SARANA DAN PRASARANA 4,0



BPPMHKP BALIKPAPAN

Terima kasih atas penilaian yang telah diberikan, kritik dan saran yang sangat berharga bagi kemajuan unit kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan kami"

**BADAN MUTU KKP
BALIKPAPAN**

BADAN MUTU KKP BALIKPAPAN

YTES
bppmhkp Balikpapan

ppid.kkp.go.id/unp/balai-bppmhkp-balikpapan/



**bar
me
bar
BerAK**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN BALIKPAPAN**

JALAN KOLONEL SYARIFUDDIN YOES RT.094 NO.10 BALIKPAPAN 76115

TELEPON (0542) 7581284

LAMAN www.kkp.go.id, SUREL bkipmbalikpapan@kkp.go.id

**SURAT TUGAS
KEPALA BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN BALIKPAPAN
NOMOR : B.12/BKIPM.BPN/KP.440/II/2026**

TENTANG

**PENUNJUKKAN TIM PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN
MASYARAKAT/PELANGGAN
TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN BALAI PPMHKP BALIKPAPAN
TAHUN 2026**

Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui kinerja pelayanan yang diberikan oleh Balai PPMHKP Balikpapan kepada masyarakat dalam hal pelanggan/pengguna jasa, perlu dilakukan penilaian atas pendapat pelanggan/pengguna jasa terhadap pelayanan melalui penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat;

b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi/pelaporan terhadap penyelenggaraan pelayanan;

c. bahwa untuk melakukan survei tersebut perlu dibentuk tim pengelola untuk melaksanakan tugas tersebut yang ditetapkan dalam Surat Tugas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan,

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMBERI TUGAS

Menetapkan : Surat Tugas Kepala Balai PPMHKP Balikpapan Tentang Penunjukkan Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat/Pelanggan Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Balai PPMHKP Balikpapan Tahun 2026.

PERTAMA : Menunjuk pegawai Balai PPMHKP Balikpapan yang namanya tercantum dibawah ini sebagai tim Kegiatan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat/Pelanggan terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Balai PPMHKP Balikpapan Tahun 2026 dengan susunan:

Pembina/Pengarah	: Eko Sulystianto, S.Pi, M.Si
Ketua	: Winda Anggraini, S.St.Pi
Penanggung Jawab	: Drh. Frederica Ethis M
Sekretaris	: Novita, S.St.Pi
Anggota	: Heri Supriadi
	Frederik Sanda
	Zainal, S.Pi
	Moochamad Eko Y
	Nadia Rizki Oktaviani

KEDUA : Uraian Tugas Tim Pelaksanaan Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat/Pelanggan pada Balai PPMHKP Balikpapan sebagai berikut:

- 1. Pembinaan/Pengarah : - Memberikan arahan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat agar dapat berjalan dengan baik.**
- 2. Ketua : - Membantu Penanggungjawab dalam mengkoordinasikan seluruh kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat.**
- 3. Penanggung Jawab : - Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan sistem yang ada.**

3. Sekretaris : - Mengumpulkan dan mengarsipkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat.
- Melakukan kompilasi dan pengolahan data operasional dalam rangka penyusunan laporan Survei Kepuasan Masyarakat.
- Bertanggung jawab atas penyelesaian laporan Survei Kepuasan Masyarakat.
4. Anggota : - Membantu pelaksanaan dan penyusunan laporan Survei Kepuasan Masyarakat.
- Melaksanakan tugas lain yang dibebankan kepadanya oleh pengarah kegiatan maupun ketua.

KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Balai PPMHKP Balikpapan Tahun Anggaran 2026, Nomor: SP DIPA-032 13.2.567610/2026 Tanggal 1 Desember 2025.

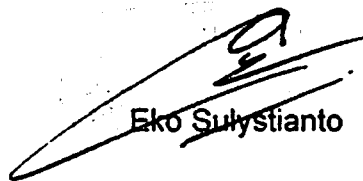
KEEMPAT : Pelaksanaan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat/Pelanggan dilakukan empat kali dalam setahun, yaitu pada bulan Maret, Juni, September dan Desember 2026.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas tim bertanggung jawab kepada Kepala Balai PPMHKP Balikpapan.

KEENAM : Surat Tugas ini berlaku pada sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan serta perbaikan seperlunya dikemudian hari apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Balikpapan, 2 Januari 2026
Kepala Balai PPMHKP Balikpapan,

Lembar Pengesahan	
Nama Jabatan	Paraf
Kasubbag Umum	


Eko Sulystianto

3. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya

**Laporan Hasil Tindak Lanjut Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
Periode Triwulan IV Tahun 2025**



**Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Balikpapan
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan
2026**

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam laporannya, World Bank menjelaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan kebutuhan dari pengguna layanan diakomodir dalam proses penyediaan pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan salah satu asas dari penyelenggaraan pelayanan publik yang tertulis dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas partisipatif selanjutnya diatur dalam bab khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional telah merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk mencapai berbagai tujuan tersebut, maka Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Balikpapan perlu menyusun rencana tindak lanjut dan laporan hasil tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan

agar proses *continuous improvement* dalam proses layanan publik dapat dipastikan dan pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II

DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Balikpapan periode triwulan IV tahun 2025 menunjukkan angka yang sangat baik nilai 92,06 (sembiliah puluh dua koma nol enam) dengan kualitas mutu A pada berbagai unsur pelayanan, seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode Triwulan III Tahun 2025

No	Unsur	IKM	Mutu Layanan
1	Persyaratan	3,8	A
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,8	A
3	Waktu Penyelesaian	3,9	A
4	Biaya/Tarif	3,8	A
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	3,8	A
6	Kompetensi Pelaksana	3,7	A
7	Perilaku Pelaksana	3,8	A
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,8	A
9	Sarana dan Prasarana	3,8	A

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 3 (tiga) unsur

dengan nilai terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu (Triwulan IV 2025)			Penanggung Jawab
			Okt	Nop	Des	
1.	U6 - Kompetensi Pelaksana	- Rapat internal petugas pelayanan dengan pembahasan (kecepatan jaringan internet, kendala aplikasi OSS, aplikasi SIAPMUTU dsb) - Melakukan refreshment pelatihan bagi petugas pelayanan (Inspektur Mutu dan Petugas Administrasi)	√			Tim Pelayanan Publik
2.	U7 - Perilaku Pelaksana	- Sosialisasi secara daring maupun luring kepada pengguna jasa terkait penggunaan aplikasi SIAPMUTU dan OSS - Melakukan asistensi penggunaan aplikasi SIAPMUTU dan OSS di ruang pelayanan	√			Tim Pelayanan Publik
3.	U2 - Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Sosialisasi secara daring maupun luring kepada pengguna jasa terkait produk spesifikasi jenis pelayanan	√			Tim Pelayanan Publik

BAB III
REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan	Tantangan / Hambatan
1.	U6 Kompetensi Pelaksana Balai PPMHKP Balikpapan melakukan kegiatan Rapat internal dan refreshment pelatihan kepada petugas pelayanan (Inspektur Mutu dan Petugas Administrasi)	Sudah	Balai PPMHKP Balikpapan melakukan rapat internal dan refreshment tentang Pelayanan Prima melalui briefing pagi yang dilaksanakan setiap pagi di Kantor Balai PPMHKP Balikpapan. Petugas pelayanan mengikuti pelatihan teknis dengan tujuan meningkatkan kemampuan pelaksana dalam melaksanakan layanan sesuai standar operasional dan regulasi yaitu dengan mengikuti kegiatan pelatihan "TOT CPIB Kapal" secara daring. (laporan terlampir)	 	Tidak ada hambatan saat pelaksanaan

2.	U7 - Perilaku Pelaksana Sosialisasi dan asistensi kepada pengguna layanan terkait penggunaan aplikasi SIAPMUTU dan OSS.	Sudah	Balai PPMHKP Balikpapan melakukan asistensi kepada pengguna layanan terkait penggunaan aplikasi SIAPMUTU dan OSS, secara langsung di ruang pelayanan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi secara tepat dan efektif.		Tidak ada hambatan saat pelaksanaan
----	--	-------	--	--	--

3.	U5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Balai PPMHKP Balikpapan melakukan Publikasi prosedur layanan melalui media cetak dan media elektronik dan	Sudah	Melakukan publikasi prosedur layanan melalui media cetak dan media elektronik dan sosialisasi kepada pengguna layanan secara langsung	    
----	--	-------	---	---

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan dan Perikanan Balikpapan telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100%.
2. Guna memastikan rencana tindak lanjut tetap terimplementasi, maka perlu disusun berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Strategi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut, dan mendorong diimplementasikannya rencana tindak lanjut antara lain :

No	RTL	Strategi Penyelesaian	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Stakeholder Terkait
1.	U6 Kompetensi Pelaksana Balai PPMHKP Balikpapan melakukan kegiatan Rapat internal dan refreshment pelatihan kepada petugas pelayanan (Inspektur Mutu dan Petugas Administrasi)	melakukan rapat internal dan refreshment tentang Pelayanan Prima melalui briefing pagi yang dilaksanakan setiap pagi di Kantor Balai PPMHKP Balikpapan dan petugas pelayanan (Inspektur Mutu dan Petugas Administrasi) mengikuti pelatihan teknis	< 3 bulan	Tim pelayanan publik	-----
2.	U7 Perilaku Pelaksana Sosialisasi dan asistensi kepada pengguna layanan terkait penggunaan aplikasi SIAPMUTU dan OSS.	Balai PPMHKP Balikpapan melakukan asistensi kepada pengguna layanan terkait penggunaan aplikasi SIAPMUTU dan OSS, secara langsung di ruang pelayanan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengguna dalam	< 3 bulan	Tim pelayanan publik	-----

3.	U5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Balai KIPM Balikpapan melakukan Publikasi prosedur layanan melalui media cetak dan media elektronik dan	mengoperasikan aplikasi secara tepat dan efektif. Melakukan publikasi prosedur layanan melalui media cetak dan media elektronik dan sosialisasi kepada pengguna layanan secara langsung	< 3 bulan	Tim pelayanan publik	-----
----	---	--	-----------	----------------------	-------

Balikpapan, 06 April 2026

Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan
Balikpapan



Eko Sulystianto, S.Pi, M.Si
NIP. 197002111997031003



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN BALIKPAPAN

JALAN KOLONEL SYARIFUDDIN YOES RT.41 NOMOR 10 BALIKPAPAN 76114

TELEPON (0542) 7581284

LAMAN www.kkp.go.id, SUREL bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR B.251/BKIPM.BPN/KP.440/II/2026

Menimbang : Sehubungan dengan adanya Undangan *Training of Trainer* (ToT) Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI) maka dipandang perlu memberi tugas nama sebagaimana tercantum dalam surat tugas ini untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Dasar : Surat Kepala Pusat Pelatihan KP Nomor : B.297/BPPSDM.4/TU.330/II/2026 Tanggal 26 Februari 2026 Perihal Undangan *Training of Trainer* (ToT) Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI).

MEMBERI TUGAS

Kepada : 1. Ir. Kadson Batubara M.Si / NIP. 19680404 199403 1 005
2. Amrul Hasani, S.Pi, M.Tr.Pi / NIP. 19830206 201001 1 015
3. Zainal, S.Pi / NIP. 19820131 201101 1 002
4. Heri Supriadi / 19800104 200312 1 005

Untuk : Mengikuti Kegiatan *Training of Trainer* (ToT) Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI) pada tanggal 2-4 Maret 2026 secara *self learning* di e-Milea.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Balikpapan, 27 Februari 2026
Kepala Balai PPMHKP Balikpapan,

Eko Sulystianto

Untuk Perhatian :

Dilarang memberikan sesuatu atau janji
yang dapat mengakibatkan KKN

LAPORAN KEGIATAN

WEBINAR TRAINING OF TRAINER (TOT) CPIB KAPAL

1. Pendahuluan

Dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, khususnya pada penanganan ikan di atas kapal, telah dilaksanakan kegiatan Webinar Training of Trainer (TOT) Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) Kapal. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai prinsip, standar, serta implementasi CPIB pada kapal penangkap ikan.

Melalui kegiatan ini diharapkan peserta mampu menjadi trainer atau fasilitator yang dapat menyampaikan materi CPIB kepada nelayan, awak kapal, dan pihak terkait lainnya sehingga penerapan penanganan ikan yang baik dapat dilakukan secara konsisten.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan mengikuti Webinar TOT CPIB Kapal antara lain:

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang prinsip CPIB pada kapal penangkap ikan.
 2. Memahami standar penanganan ikan yang baik sejak penangkapan hingga pembongkaran di pelabuhan.
 3. Meningkatkan kompetensi peserta sebagai trainer/fasilitator CPIB.
 4. Mendukung penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
-

3. Waktu dan Tempat

- **Hari/Tanggal** : Senin – Rabu / 2-4 Maret 2026
 - **Waktu** : (08.00 – 16.00 WIB)
 - **Tempat** : Online melalui aplikasi meeting (Zoom)
 - **Penyelenggara** : (Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan / instansi terkait)
-

4. Materi Kegiatan

Beberapa materi yang disampaikan dalam kegiatan Webinar TOT CPIB Kapal antara lain:

- 1. Kebijakan dan Regulasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan**
 - 2. Prinsip Dasar Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)**
 - 3. Penerapan CPIB pada Kapal Penangkap Ikan**
 - 4. Sanitasi dan Higiene di Kapal Perikanan**
 - 5. Pengendalian Suhu dan Rantai Dingin (Cold Chain)**
 - 6. Teknik Penanganan Ikan yang Baik di Atas Kapal**
 - 7. Metode Pelatihan dan Teknik Penyampaian Materi sebagai Trainer CPIB**
 - 8. Diskusi dan Studi Kasus Implementasi CPIB di Lapangan**
-

5. Hasil yang Diperoleh

Setelah mengikuti kegiatan Webinar TOT CPIB Kapal, beberapa hasil yang diperoleh antara lain:

- 1. Peserta memahami konsep dan prinsip penanganan ikan yang baik di atas kapal.**
 - 2. Peserta mengetahui pentingnya menjaga kualitas dan kesegaran ikan sejak proses penangkapan.**
 - 3. Peserta memahami standar sanitasi, higiene, dan pengendalian suhu dalam penanganan hasil perikanan.**
 - 4. Peserta mendapatkan pemahaman mengenai peran trainer dalam memberikan edukasi kepada nelayan dan awak kapal.**
 - 5. Peserta memperoleh materi dan referensi yang dapat digunakan untuk kegiatan sosialisasi dan pelatihan CPIB di lapangan.**
-

6. Manfaat Kegiatan

Manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini antara lain:

- Meningkatkan kompetensi peserta dalam bidang jaminan mutu hasil perikanan.**
 - Mendukung penerapan CPIB pada kapal penangkap ikan.**
 - Membantu menjaga mutu, keamanan, dan nilai ekonomi hasil perikanan.**
 - Mendukung program pemerintah dalam peningkatan daya saing produk perikanan.**
-

7. Kesimpulan

Kegiatan Webinar Training of Trainer (TOT) CPIB Kapal berjalan dengan baik dan memberikan tambahan pengetahuan serta pemahaman kepada peserta mengenai penerapan cara

penanganan ikan yang baik di atas kapal. Diharapkan ilmu yang diperoleh dapat diterapkan serta disebarluaskan kepada nelayan dan pihak terkait untuk meningkatkan mutu dan keamanan hasil perikanan.

8. Saran

Agar pelaksanaan kegiatan serupa lebih optimal, disarankan:

1. Kegiatan TOT CPIB dilaksanakan secara berkelanjutan.
2. Diperbanyak sesi **studi kasus dan praktik penerapan di lapangan**.
3. Dilakukan pendampingan kepada nelayan dalam penerapan CPIB di kapal.

Mengetahui :
Kepala Balai PPMHKP Balikpapan



Eko Selystianto, S.Pi, M.Si



SERTIFIKAT

Nomor : B.433/BDA/KP.510/III/2026

Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa



Nama	Kadson Batubara
NIP	196804041994031005
Tempat Lahir	Hutaraja
Tanggal Lahir	4 April 1968
Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina / IV a
Jabatan	Inspektur Mutu
Instansi	BPPMHKP Balikpapan

Telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui Pelatihan

Training of Trainer (ToT) Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI)

oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan metode Distance Learning pada Hari Senin s.d. Rabu, 02 s.d. 04 Maret 2026 meliputi 20 (dua puluh) jam pelajaran (JP).



6 March 2026

Kepala Pusat Pelatihan
Kelautan dan Perikanan

Lilly Aprilya Pregiwati



SERTIFIKAT

Nomor : B.433/BDA/KP.510/III/2026

Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa :



Nama : Zainal Zainal
NIP : 198201312011011002
Tempat Lahir : Samarinda
Tanggal Lahir : 31 January 1982
Pangkat/ Gol. Ruang : Penata/ IIIc
Jabatan : Inspektur Mutu
Instansi : Balai PPMHKP Balikpapan

Telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui Pelatihan:

Training of Trainer (ToT) Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI)

oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan metode Distance Learning pada Hari Senin s.d. Rabu, 02 s.d. 04 Maret 2026 meliputi 20 (dua puluh) jam pelajaran (JP).



6 March 2026

Kepala Pusat Pelatihan
Kelautan dan Perikanan



Lilly Aprilia Pregiwati

DAFTAR MATERI PELATIHAN

1. Kebijakan Terkait Sistem Jaminan Mutu Sektor Produksi Primer	1 JP
2. Penerapan Standar Penanganan Ikan Hasil Tangkapan	3 JP
3. Kemunduran Mutu Ikan dan Penilaian Mutu Ikan	3 JP
4. Penjaminan Mutu Ikan hasil Tangkapan	3 JP
5. Penerapan Standar Pembongkaran Ikan di Pelabuhan Perikanan	3 JP
6. Mekanisme Sertifikasi CPIB Kapal	2 JP
7. Metodologi Pembelajaran	3 JP
8. Pengenalan Aplikasi Pelatihan Masyarakat E- Laut	2 JP

Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Kementerian Kelautan dan Perikanan



R. Hernan Mahardhika



SERTIFIKAT

Nomor : B.433/BDA/KP.510/III/2026

Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa :



Nama : Amrul Hasani
NIP : 198302062010011015
Tempat Lahir : Blitar
Tanggal Lahir : 6 February 1983
Pangkat/ Gol. Ruang : III D
Jabatan : Inspektur Mutu
Instansi : Balai KIPM Balikpapan

Telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui Pelatihan:

Training of Trainer (ToT) Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI)

oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan metode Distance Learning pada Hari Senin s.d. Rabu, 02 s.d. 04 Maret 2026 meliputi 20 (dua puluh) jam pelajaran (JP).



6 March 2026
Kepala Pusat Pelatihan
Kelautan dan Perikanan
Lilly Aprilia Pregiwati

DAFTAR MATERI PELATIHAN

1. Kebijakan Terkait Sistem Jaminan Mutu Sektor Produksi Primer	1 JP
2. Penerapan Standar Penanganan Ikan Hasil Tangkapan	3 JP
3. Kemunduran Mutu Ikan dan Penilaian Mutu Ikan	3 JP
4. Penjaminan Mutu Ikan hasil Tangkapan	3 JP
5. Penerapan Standar Pembongkaran Ikan di Pelabuhan Perikanan	3 JP
6. Mekanisme Sertifikasi CPIB Kapal	2 JP
7. Metodologi Pembelajaran	3 JP
8. Pengenalan Aplikasi Pelatihan Masyarakat E- Laut	2 JP

Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Kementerian Kelautan dan Perikanan



R. Hernan Mahardhika



SERTIFIKAT

Nomor : B.433/BDA/KP.510/III/2026

Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa :



Nama	: HERI SUPRIADI
NIP	: 19800104 200312 1 005
Tempat Lahir	: Parigi
Tanggal Lahir	: 4 January 1980
Pangkat/ Gol. Ruang	: Penata Muda Tk.I/IIIb
Jabatan	: PHPI MAHIR
Instansi	: BPPMHKP

Telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui Pelatihan:

Training of Trainer (ToT) Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI)

oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan metode Distance Learning pada Hari Senin s.d. Rabu, 02 s.d. 04 Maret 2026 meliputi 20 (dua puluh) jam pelajaran (JP).



DAFTAR MATERI PELATIHAN

1. Kebijakan Terkait Sistem Jaminan Mutu Sektor Produksi Primer	1 JP
2. Penerapan Standar Penanganan Ikan Hasil Tangkapan	3 JP
3. Kemunduran Mutu Ikan dan Penilaian Mutu Ikan	3 JP
4. Penjaminan Mutu Ikan hasil Tangkapan	3 JP
5. Penerapan Standar Pembongkaran Ikan di Pelabuhan Perikanan	3 JP
6. Mekanisme Sertifikasi CPIB Kapal	2 JP
7. Metodologi Pembelajaran	3 JP
8. Pengenalan Aplikasi Pelatihan Masyarakat E- Laut	2 JP

Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Kementerian Kelautan dan Perikanan



R. Hernan Mahardhika